

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Oktober 2020

**MAS MENTERI
PALING DISOROT**

**PREDIKSI RESESI
EKONOMI AKIBAT
PANDEMI**

RESHUFFLE KABINET JOKOWI

Tidak adanya program terobosan dalam penanganan Covid-19 membuat Presiden Jokowi marah besar. Dia tak segan-segan akan melakukan perombakan kabinet, jika situasinya tetap tak terkondisikan. Oktober ini menjadi bulan penentuan mengenai kepastian kocok ulang kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri menjadi sorotan.



9 772746 105042

Mudahnya berinvestasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking



#yaREKSADANAaja

BNI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Mulai kelola keuangan Anda dengan kemudahan investasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking.
#yaREKSADANAaja



Segera unduh BNI Mobile Banking di Google Play dan App Store.

Step by Step Top Up Reksadana :

1. Buka aplikasi mobile banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Produk & Jasa lainnya.
5. Pilih menu Reksadana.
6. Baca Surat Pernyataan Nasabah.
7. Centang pada "saya setuju dengan syarat dan ketentuan diatas", dan klik lanjut.
8. Lakukan Top Up pembelian pada produk Reksadana yang diinginkan, dan klik lanjut.
9. Masukkan nominal yang ingin anda tambahkan, password transaksi anda, dan klik lanjut.
10. Anda akan mendapatkan notif "Transaksi sedang diproses".

Step by Step Cek Saldo Investasi:

1. Buka aplikasi Mobile Banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Rekeningku.
5. Masuk menu Investasi.
6. Anda akan mendapatkan halaman produk reksadana yang telah anda miliki.

Bagi Anda yang belum memiliki Reksa Dana, kunjungi Kantor Cabang BNI terdekat untuk melakukan pembelian.

Info lebih lanjut mengenai Reksa Dana klik <https://reksadana.ojk.go.id> atau <https://reksadanacommunity.com/video/> atau hubungi BNI Call 1500046.

1500046
BNI Call



Top Up Reksa Dana as simple as you swap the screen! #yaREKSADANAaja

DAFTAR ISI

TAJUK

KOCOK ULANG KABINET INDONESIA MAJU 5

LAPORAN UTAMA

PUBLIK DESAK PEROMBAKAN KABINET 10

SIAPA DALAM PREDIKSI RESHUFFLE 12

NADIEM, NETFILX DAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN 15

WAWANCARA KHUSUS

DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., M.A.

KINERJA MENTERI BIASA-BIASA SAJA, PRESIDEN PERLU
TURUN TANGAN! 20

NASIONAL

AGAR MEREKA TETAP BELAJAR 23

ERA NORMAL BARU DAN KESIAPAN SEKOLAH INKLUSI 26

KSDI, UTAMAKAN KESEHATAN DARIPADA POLITIK 34

SALAH SASARAN, SUBSIDI KUOTA MENYASAR KE
ANGGOTA OMBUDSMAN 29

INTERNASIONAL

TERJUN BEBAS EKONOMI GLOBAL 43

CHINA DAN AS ABSEN, 156 NEGARA BUAT SKEMA
VAKSIN GLO BALS 45

OPINI

WATAK OLIGARKI MILENIAL MAS NADIEM 46

JAKSA PINANGKI, AKTOR FIGURAN YANG DIKORBANKAN? 48

BASIS PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM 50

BAHASA

BAHASA DAN PERLAKUAN PADA BINATANG 54

ASAL MUASAL BAHASA 56

RESENSI

MENYOAL FENOMENA HIJRAH DAN KOMODIFIKASI

AGAMA 58

BELAJAR KETEKUNAN DARI GURU AINI 60

BUDAYA

TERSIRAT TAK TERUCAP 62

TEKNOLOGI

BARU MELUNCUR, REDMI 9C SIAP DICoba 64

ARTIS

ATIQOH HASIHOLOAN, TERGERAK BANTU PROMOSI UMKM

ARIEL NOAH, TANGGAPI GIRING NYAPRES 2024 66

THE SILENT SEA, SERIAL TERBARU GONG YOO 67

KOLOM

SESAT PIKIR PELAKSANAAN PILKADA 68



LAPORAN UTAMA

MENTERI TERAWAN PALING LAYAK DIGANTI?

Oktober menjadi bulan penantian bagi prediksi banyak pihak tentang realisasi perombakan kabinet (*reshuffle*). Sejak diumumkan sekaligus dilantik pada 23 Oktober 2019, maka praktis pada bulan ini Kabinet Indonesia Maju tengah berusia satu tahun. Jadi, sangat layak bila Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kinerja.

6



NASIONAL
BERULAH, CHARLIE
HEBDO TERBITKAN
KARIKATUR NABI
MUHAMMAD

40



TEKNOLOGI
INTEL LUNCURKAN
PROSESOR TIGER LAKE
BERKEKUATAN IGPU XE
SERIES

65



NASIONAL
WARISAN TIGA
TOKOH BESAR 28

Butuh Kesadaran Diri Memakai Masker

Meski pemerintah dan berbagai pihak telah mengampanyekan pentingnya memakai masker, baik di jalan, tempat kerja, maupun di tempat wisata, namun hingga saat ini masih mudah kita jumpai banyak orang yang mengabaikannya. Padahal, dengan disiplin menggunakan masker, bisa menjadi cara sederhana yang efektif mencegah penularan Covid-19.

Lama sebenarnya saya tidak berwisata atau bepergian ke tempat-tempat ramai sejak pandemi terjadi di Indonesia Maret lalu. Tapi, seiring *new normal* yang terus disuarakan pemerintah hingga saat ini, perlahan ketakutan saya agak mereda, dan mulai memberanikan diri beraktifitas di kantor maupun berwisata di tempat terbuka.

Sayangnya, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, banyak orang yang justru abai dengan protokol kesehatan sebagai pra syarat dibukanya situasi *new normal* ini. Selain itu, di tempat wisata juga, orang-orang seperti tak menghiraukan bahaya Covid-19. Seperti biasa, mereka tetap berkerumun, tanpa bermasker dan tidak berjarak.

Pantas saja, saat ini, setiap hari lebih dari tiga ribu penambahan korban yang terinfeksi Covid-19. Jakarta sebagai Ibu Kota akhirnya memberlakukan PSBB lagi mengingat penambahan korban tersebut, bahkan tenaga kesehatan terus berguguran.

Jika orang-orang tetap tak memiliki kesadaran untuk mengaktualisasikan protokol kesehatan, maka sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara di urutan ketiga sebagai yang paling

terdampak virus mematikan ini.

Sebab itu, penting membenihkan kesadaran diri untuk senantiasa disiplin memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, tidak berkerumun. Jikapun harus melakukan pertemuan, rapat atau aktivitas kerja, maka semua protokol kesehatan itu harus dijalankan.

Kita semua berharap agar pandemi ini

bisa segera hilang dari bumi ini. Sambil menunggu vaksin Covid-19 ditemukan dan dipasarkan secara legal, kita hendaknya senantiasa berdoa agar virus ini tidak semakin merajalela. Semoga negara ini dijauhkan dari mara bahaya, bencana, bala' dan waba'. *Amin ya rabbal alamin*

Khoiruddin Bashari
Jakarta



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Yayan Sopyani, Michael Malik **Pemimpin Redaksi :** Nafik Muthohirin
Redaktur Pelaksana : Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur :** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis :** Hengki, Dwi Saputra, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT :** Zulfikar Iskandar **Fotografer :** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter :** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Tebet Dalam IV Nomor 7B, RT 11/RW 01, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12081 Telp: (021) 21383521

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

KOCOK ULANG KABINET INDONESIA MAJU

Dimulai dari unggahan official *YouTube* Sekretariat Presiden yang memuat Sidang Kabinet Paripurna pada Minggu (28/6), jagat maya mendadak ramai dipenuhi “bisik-bisik” perombakan kabinet. Pasalnya, video berdurasi 10 menit 20 detik tersebut mengungkap kekesalan Presiden Jokowi atas kinerja para menteri yang tak cepat merespons dampak persebaran pandemi Covid-19. Bila hingga akhir September tetap tak ada perubahan ke arah yang lebih baik, Jokowi tak segan akan melakukan *reshuffle* sejumlah menteri.

Salah satu menteri yang menjadi sorotan utama bagi sebagian pihak adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Kinerjanya dianggap belum cukup maksimal dalam menghadirkan solusi bagi terlaksananya pendidikan jarak jauh akibat pandemi. Justru, sejumlah pemberitaan yang mengemuka belakangan ini, mempertontonkan beberapa kebijakan yang kontroversial dan tak memiliki sensitifitas atas merebaknya wabah Covid-19, seperti halnya pelaksanaan Program Orga-nisasi Penggerak (POP) yang dinilai sarat kepentingan sejumlah pihak.

Selain itu, menteri-menteri yang lain juga belum tampak ada terobosan program untuk menangani Covid-19 ini. Tak pelak, bila video tersebut, sengaja diunggah oleh kantor kepresidenan supaya menjadi “peringatan” bagi kabinet Jokowi untuk cepat berbenah. Sebab, jika tidak, Covid-19 akan menjadi ancaman yang nyata bagi tata kelola ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor kebangsaan yang lain.

Hingga saat ini saja, sudah lebih dari 187 ribu orang lebih yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia. Meski angka kesembuhan juga tinggi mencapai 134 ribu orang, namun korban yang meninggal dunia juga fantastis sebanyak 7.832 orang (Senin, 7/9). Problem ini baru pada aspek kesehatan, belum dampaknya terhadap ekonomi, pendidikan dan ketahanan nasional, sebab itu jika tidak ada terobosan program dari menteri-menteri Jokowi,

maka Covid-19 ini akan memberikan kenangan buruk bagi periode akhir pemerintahan Jokowi.

Jokowi tak ingin bayangan buruk itu terjadi. *Alhasil*, pada sejumlah kesempatan, dia seolah memberikan isyarat kepada menteri-menteri di “Kabinet Indonesia Maju” yang dibentuknya pada 19 Oktober 2019, bahwa siapa yang tak beres mengurus pandemi ini, maka akan di-*reshuffle*. Meski pihak Istana mengonfirmasi wacana ini tidak benar adanya, namun sejumlah politisi di DPR punya pandangan berbeda. Politik adalah kenyataan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun pesan atau makna mendalam di balik tindakan dan ungkapan itulah yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai fakta politik.

Praktis, unggahan video yang menunjukkan kekesalan Jokowi terhadap para menteri tersebut disambut juga oleh sejumlah lembaga survei politik, seperti halnya Charta Politika dan Indikator Politik. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Charta Politika, sebanyak 73,1 persen atau 2 ribu responden setuju Jokowi melakukan *reshuffle*. Sementara itu, riset Indikator Politik juga menunjukkan hal yang demikian. Sebanyak 64,8 persen atau 1.200 responden yang setuju presiden segera melakukan kocok ulang kabinetnya.

Dari beberapa riset yang mengemuka belakangan ini, terdapat sejumlah menteri yang menjadi sorotan dalam arus *reshuffle*, di antaranya yaitu Mendikbud Nadiem Makarim, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menag Fachrul Razi.

Sebab itu, dalam edisi perdana Majalah Cara Pandang ini, kami ingin mengulas secara lebih komprehensif terkait *reshuffle* Kabinet Indonesia Maju. Edisi ini berupaya untuk memperkaya data dan isu, serta memberikan cara pandang yang baru tentang seberapa pentingnya wacana *reshuffle* ini untuk disuarakan, terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. • **Carapandang**



MENTERI TERAWAN PALING LAYAK DIGANTI?

Oktober menjadi bulan penantian bagi prediksi banyak pihak tentang realisasi perombakan kabinet (*reshuffle*). Sejak diumumkan sekaligus dilantik pada 23 Oktober 2019, maka praktis pada bulan ini Kabinet Indonesia Maju tengah berusia satu tahun. Jadi, sangat layak bila Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kinerja para menterinya. Jika ada menteri yang tidak sesuai ekspektasi –sebagaimana yang diungkapkannya pada Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu– maka *reshuffle* adalah satu pilihan terbaik agar kinerja kementerian yang bersangkutan tidak stagnan.

Terawan Agus Putranto, adalah menteri yang paling dosorot publik saat ini karena bersamaan dengan terjadinya krisis kesehatan akibat *Corona Virus Disease* –biasa disebut Covid-19. Hingga saat ini, belum ada jalan keluar atas bencana pandemi yang telah menginfeksi sekitar 200 ribu orang dan merenggut nyawa sebanyak 8.230 orang di Indonesia (Kemenkes, 9/9). Sangat mungkin kasus positif dan meninggal dunia akan terus bertambah seiring dengan belum ditemukannya vaksin yang bisa menghentikan penyebaran virus tersebut.

Apalagi, kebijakan *new normal* yang disosialisasikan pemerintah, tidak diikuti oleh sebagian besar warga untuk benar-benar menjaga tingkat kewaspadaan terhadap Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat sebagaimana pedoman yang dikeluarkan World Health Organization (WHO). Di banyak tempat, masih mudah di-

jumpai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, tidak menjaga jarak, serta tidak disiplin memakai masker dan cuci tangan.

Alhasil, korban terus berjatuhan. Setiap hari, ada saja informasi yang memenuhi akun media sosial kita tentang orang-orang terdekat yang terinfeksi, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya merenggang nyawa. Ironis sekali, karena sebenarnya pandemi ini bisa dicegah bila masyarakat mau bersikap disiplin. Juga, seharusnya pemerintah bersikap tegas sejak awal Covid-19 telah merembet ke sejumlah negara tetangga.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di bawah kepemimpinan Terawan Agus Putranto adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Pasalnya, sejak kemunculan virus ini di sejumlah negara tetangga, dia secara pribadi menganggap keberadaan pandemi ini bukan sebagai ancaman. Berbagai pemberitaan media merekam pernyataannya yang satir dengan menganggap

virus ini sebagai flu biasa, sehingga kementeriannya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif.

Padahal, publik bisa menyaksikan sekarang, bahwa korban terus berjatuhan. Ribuan orang terinfeksi dan ratusan orang yang meninggal setiap hari. Tidak ada langkah-langkah serius yang benar-benar muncul dari dalam kementeriannya. Apalagi, penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih sedikit sekali padahal telah dianggarkan senilai Rp75 triliun. Jokowi sendiri mengungkapkan akan melakukan segala hal bagi menteri yang berkinerja buruk selama terjadi wabah Covid-19.

Tak pelak, pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada akhir Juni lalu adalah sindiran telak yang salah satunya ditujukan kepada Terawan dan kementerian yang dipimpinnya.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja *reshuffle*. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu, jika itu diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. (Jika) bapak/ibu tidak merasakan itu, ya susah,” tegas Jokowi yang memperingatkan para menterinya untuk membikin program-program terobosan sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19.

Meski di kemudian hari, Jokowi mengonfirmasinya sebagai pernyataan biasa. Bukan ancaman untuk dilakukan



Menteri Terawan dalam sebuah kesempatan jumpa pers di Istana Negara Presiden RI

reshuffle di kemudian hari, namun publik terlanjur menyambut ucapan tegas Presiden di Sidang Kabinet Paripurna tersebut sarat bermuatan isu perombakan kabinet. Dan, dalam berbagai komentar pemerhati politik dan hasil survei sejumlah lembaga konsultan politik menempatkan Terawan sebagai salah satu menteri yang terancam lengser.

Lembaga survei Charta Politica

Indonesia bekerja dengan cepat mengumpulkan pendapat publik tentang wacana kocok ulang Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia Yunarto Wijaya mengungkapkan, sebanyak 73,1 persen responden menyetujui rencana *reshuffle*. Hanya 13,3 persen yang tidak setuju, dan 13,6 persen memilih tidak menjawab/tidak mengetahui.

“Sebanyak 73,1 persen mengatakan setuju (*reshuffle*). Ini lebih ekstrem dibandingkan dengan rilis survei Indikator Politik Indonesia,” kata Yunarto saat konferensi pers hasil survei bertajuk

Tren Tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, di Jakarta, Rabu (22/7).

Di tempat yang lain, dalam diskusi webinar bertajuk *Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan*, (Sabtu, 4/7), Yunarto Wijaya menganggap Menkes Terawan paling layak diganti jika Presiden Jokowi melakukan *reshuffle* kabinet. Dia menilai kinerja Terawan dalam menangani pandemi Covid-19 tidak terlalu baik.

“Kalau bicara tentang kesehatan layak diganti atau tidak, harusnya yang berbicara adalah pakar epidemiologi.



Pemakaman jenazah Covid-19.

Kalau berbicara menteri ekonomi atau Sri Mulyani pantas diganti atau tidak harusnya yang berbicara ekonom,” kata Yunarto.

Tetapi sisi kemanusiaan Yunarto menjawab, karena ada rasa takut berlebih akan persebaran pandemi ini, sehingga jika ditanya siapa yang paling bertanggung dan layak diganti,

dia menilai Menkes Terawan lah yang paling layak di-*reshuffle*. Dia tidak sigap membuat program-program teknis menanggulangi wabah ini. Ada perasaan takut berlebih jika mengonsumsi pemberitaan media tentang wabah Covid-19 ini.

“Sebagai warga jika ditanya yang hanya berdasarkan informasi yang saya

baca di media, ketakutan saya terhadap pandemi secara kesehatan, perasaan saya sebagai makhluk ekonomi yang merasakan suasana krisis, misalnya, saya berani mengatakan Terawan (layak diganti),” ucapnya tegas.

Meski Terawan menjadi menteri yang paling disorot dalam isu perombakan kabinet, namun dia sama sekali tidak memberikan tanggapan. Mulanya, sejumlah pihak memang menyebutnya sebagai salah satu menteri yang dipuji-puji Jokowi, tapi karena tak bisa membuat terobosan program dalam penanganan pandemi, maka sekarang dia disebut-sebut sebagai menteri yang paling membuat kesal presiden.

Karena mendapat sorotan tajam, belakangan Terawan menunjukkan kepedulian terhadap bahaya Covid-19, salah satunya dengan berkantor di Surabaya demi memantau perkembangan penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang angka penularannya paling tinggi.

“Iya betul, Pak Menkes *ngantor* di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes M. Budi Hidayat melalui keterangan pers, Minggu (12/7).

Selain itu, dia juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan langsung datang ke daerah setempat yang dinilai banyak terdampak kasus penularan Covid-19. Pada Senin (6/7), Terawan mengadakan rapat membahas penanganan Covid-19 di Maluku dan Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku. “Kami terus berupaya mengatasi masalah pandemi ini dengan langsung terjun ke setiap provinsi,” kata Terawan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Juli 2020.

Saat itu, Terawan menghadiri rapat

bersama Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan perwakilan Komisi Kesehatan DPR dalam kunjungan ke Ambon.

Meski beberapa program dan aksi nyata penanganan Covid-19 sudah dilakukan, namun publik masih belum merasakan kepuasan atas kinerja Terawan sebagai Menkes. Faktanya, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO), dikatakan sebanyak 52,4 persen responden memilih Terawan sebagai salah satu menteri yang paling layak di-*reshuffle*.

“Beberapa menteri yang dinilai layak *reshuffle* justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, hal ini menjadi ujian dilematis baginya,” jelas Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam sebuah diskusi bertajuk *Menanti Perombakan Kabinet*, Sabtu (4/7).

Memulihkan Kepercayaan Publik

Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution dalam keterangan persnya mengatakan, penyegaran kabinet saat ini diperlukan untuk memastikan negeri ini siap menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mengatasi pandemi.

Secara garis besar, dia melanjutkan, perombakan tersebut dirasa perlu apabila kinerja para menteri tidak lagi menunjukkan kemajuan dan peningkatan, atau justru cenderung lambat dan menghambat. Dengan demikian, wacana *reshuffle* harus



benar-benar diwujudkan guna mempercepat kinerja pemerintahan dalam menangani krisis.

Beberapa fakta membuktikan, baik yang terjadi pada sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan, kinerja menteri-menteri di bidang tersebut tengah menunjukkan ketidakpuasan. Tak sedikit yang menilai kinerja di tiga kementerian ini lambat sebagai akibat dari sistem birokrasi yang tidak fleksibel. Hal ini dapat disaksikan dari realisasi pencairan anggaran dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang tidak maksimal.

Padahal, sejak awal Covid-19 merajalela di Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 Triliun untuk penanganan pandemi. Tetapi, hingga pertengahan Juni 2020, realisasi anggaran dana yang sudah disiapkan belum bisa diserap secara maksimal oleh kementerian-kementerian.

“Presiden Jokowi jangan ragu

me-*reshuffle* para pembantunya. Hal ini untuk mempercepat dan mengakselerasi kerja penanganan Covid-19. Masyarakat ingin aksi nyata, bukan retorika. Jika ada Menteri yang dirasa tidak bisa membantu kerja Presiden dan lambat kinerjanya, maka lebih baik diganti,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini, dikutip *Antaranews* (Rabu, 5/8).

Meski isu perombakan kabinet ini belakangan ditepis oleh pihak istana kepresidenan, namun wacana ini terus bergulir karena publik butuh kepastian sikap pemerintah dalam menormalkan keadaan sosial, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Kemudian, khusus bagi para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, kemuculan isu kocok ulang menteri ini bisa menjadi alat kejut bagi mereka, sehingga isu ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para Menteri agar bekerja lebih keras lagi.

• Nafik, Edi, Amir, Ika



PUBLIK DESAK PEROMBAKAN KABINET

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan hampir satu tahun. Di tahun pertama pemerintahannya berbagai persoalan menghantam. Mulai pandemi Covid-19 hingga ancaman resesi ekonomi. Akibat pagebluk itu, berbagai persoalan lain muncul, misalnya, di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri. Angka pengangguran meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk menangani berbagai persoalan itu, Jokowi tidak bisa dibantu para menteri yang bekerja biasa-biasa saja. Presiden harus dibantu menteri-nya yang berkinerja optimal dan berani melakukan gebrakan-gebrakan baru.

Bukan malah menjadi beban dalam mewujudkan program-programnya.

Publik merasakan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju masih jauh dari harapan. "Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Dorongan Masyarakat

Melihat lambatnya kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju ini, muncul desakan publik agar presiden melakukan *reshuffle*. Desakan publik

tersebut tergambar dari beberapa hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei (baca artikel sebelumnya berjudul *Menteri Terawan Layak Diganti*).

Desakan publik yang berharap Presiden Jokowi melakukan *reshuffle* kabinet merupakan suara hati rakyat. Sebab, rakyat merasakan bahwa kinerja para menteri Jokowi tidak optimal. Sehingga program-program yang diharapkan Jokowi berjalan tersendat.

"Ibarat mobil, ini jalannya tersendat-sendat. Mobil yang namanya Republik Indonesia ini jalannya tersendat-sendat karena komponen dari mobil tersebut (*Kabinet-red*) tidak bisa mengakselerasikan program-program

Presiden Jokowi,” ujar pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Junaedi kepada *Majalah CaraPandang* di Jakarta (23/9).

Dia menyoroti sejumlah menteri yang sudah selayaknya direshuffle, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ari menilai kinerja Menteri Kesehatan sangat buruk. Di tengah pandemi Covid-19, Indonesia merasa tidak memiliki seorang Menteri Kesehatan. Sebab, kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan selama ini tidak menyentuh kepada persoalan pandemi Covid-19.

“Dimana Menteri Kesehatan hari ini? Kebijakannya selama ini tidak bisa menyentuh persoalan pandemi Covid-19. Saya menilai sekarang ini diambang ambruknya sistem kesehatan kita. Melihat Wisma Atlet Kemayoran kalau sudah diaktifkan tower 8, 9, dan 10 ini sudah titik kulminasi. Ini baru di wilayah Jakarta, belum di wilayah yang lain. Kita perlu sosok Menkes yang jauh lebih memahami persoalan kesehatan,” tegas Ari.

Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja, Ari menilai kurang bekerja dengan cepat di tengah wabah pandemi Covid-19. Di tengah gelombang PHK belum ada solusi yang praktis. “Saya lihat Menaker kurang seirama dengan Presiden. Kurang cepat dan perlu ada gebrakan baru untuk menyelamatkan pekerja,” jelasnya menambahkan.

Untuk Menteri Pertanian (Mentan) juga tidak memiliki gebrakan. Seharusnya di tengah pandemi Covid-19 ini Mentan harus fokus menggenjot produksi pangan. Sebab, ini yang akan menjadi penopang terbesar pangan bangsa agraris ini.



Ari Junaedi

Pengamat Komunikasi Politik
Universitas Indonesia

Selanjutnya pada Mendikbud, dia menilai lebih banyak pro dan kontranya dibanding kerjanya. Di tengah permasalahan pandemi ini, Mendikbud kerap melakukan blunder. Misalnya yang terbaru soal penghapusan mata pelajaran sejarah.

Menurutnya seharusnya Mendikbud lebih fokus mencari terobosan-terobosan pendidikan di tengah pandemi. Misalnya bagaimana siswa/peserta didik agar bisa dengan mudah belajar daring. Dan masalah-masalah lainnya seperti persoalan guru honorer yang berlarut-larut, dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan berjalannya waktu Presiden Jokowi salah menempatkan orang. Seharusnya Nadiem lebih cocok di Kementerian yang mengurus soal kreatifitas dan bidang UKM. Mendikbud seharusnya berasal dari kalangan akademisi. Sehingga menteri bisa memahami hakikat dari pendidikan yang sebenarnya,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri KKP sangat jauh beda dengan menteri sebelumnya dalam soal kebijakan kelautan, misalnya soal ekspor benih lobster. Kebijakan ini sangat mengganggu keberlangsungan lobster di Indonesia.

“Kabinet sekarang ini jauh berbeda

dengan Kabinet Jokowi di periode pertama. Ibarat klasemen di Liga Inggris, kabinet ini sudah terdegradasi. Tantangannya semakin besar, sementara para menteri di Kabinet Indonesia Maju sedang berada pada level *championship* di kasta kedua. Harusnya berada di kasta tertinggi,” ujarnya.

Ari mengatakan *reshuffle* kabinet sudah seharusnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jika tidak segera dilakukan maka persoalan bangsa akan semakin berlarut-larut. Menu-rutnya di periode kedua ini Jokowi seharusnya dalam bekerja tidak memiliki beban politik. Sebab, ini adalah periode terakhir dalam memimpin. Maka itu, sudah sepantas memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.

Namun sangat disayangkan, hingga saat ini Presiden Jokowi masih ragu untuk melakukan perombakan kabinet seperti yang disuarakan oleh publik. Masih ragunya Jokowi, karena dia masih mempertimbangkan untung dan ruginya.

Jokowi selalu menimbang untung ruginya melakukan *reshuffle*. Padahal ini sangat berbeda dengan di periode pertama. Di periode kedua Jokowi tidak ada beban politik untuk kembali maju lagi. Di tengah persoalan bangsa yang sulit ini, Jokowi seharusnya dalam mempertahankan para pembantunya berdasarkan pada kinerja bukan atas pertimbangan politik.

“Jokowi masih mengedepankan politik Jawa, yang tidak mau menyakiti. Seharusnya kalau ada menteri yang kurang bagus, bisa meminta kader baru yang lebih bagus dan berani dari partai yang bersangkutan. Menurut saya, ini tidak lagi masanya uji coba. Ini akan menjadi persoalan besar jika pandemi Covid-19 tidak dilandaikan,” ujar Ari. • **Amir Fiqih**

SIAPA DALAM PREDIKSI RESHUFFLE

Menurut prediksi sejumlah pengamat politik dan politisi DPR, jika tidak ada aral melintang dan Presiden Jokowi berani mengambil tindakan tegas, tahun ini akan dilakukan *reshuffle*. Kocok ulang kabinet ini diperlukan agar pergerakan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tidak stagnan. Siapa saja menteri yang akan diputus dalam kocok ulang tersebut?

Seperti halnya pernyataan Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rustam Ibrahim yang memprediksi *reshuffle* akan terjadi pada akhir Oktober 2020. Dia mengatakan, melalui akun *Twitter*-nya @RustamIbrahim, jikapun ada kocok ulang kabinet pada pemerintahan Jokowi, sifatnya akan terbatas dan momentum yang tepat bagi presiden adalah akhir Oktober 2020.

Menurut Rustam, Jokowi bukanlah sosok yang biasa melakukan perombakan di tubuh menternya secara besar-besaran. Dia orang yang penuh perhitungan, sehingga jikapun ada *reshuffle*, maka sifatnya akan terbatas saja. Beda halnya dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, yang mengaku mendapat informasi dari Presiden Jokowi bahwa akan ada perombakan kabinet pada akhir tahun 2020.

Pernyataan Rustam dan Neta S.

Pane tersebut bukanlah api yang tiba-tiba dinyalakan begitu saja. Argumentasinya mengemuka seiring maraknya perbincangan tentang wacana perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam beberapa pekan terakhir, terutama pasca Jokowi menggelar sidang kabinet pada Kamis, (18/6) dan video rapat diunggah oleh Kantor Kesekretariatan Presiden.

Praktis, banyak pihak yang kemudian merespons isu besar ini, dengan memberikan komentar terhadapnya. Ada yang setuju, dan pasti ada yang tidak. IPW sendiri memprediksi sedikitnya akan ada 11 menteri, atau paling banyak 18 menteri yang akan dikocok ulang. Perombakan tersebut bisa sekedar dipindah atau dirotasi, bisa juga diganti.

Dalam *press release*-nya, yang dikutip dari *detik.com*, Neta menyebut sejumlah nama menteri yang diprediksi akan direshuffle, mulai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna



Laoly, Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Mensos Juliari P Batubara.

Kemudian, diamanatkan, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) FachrulRazi, dan Kepala Bulog Budi Waseso. Netamengatakan, PDIP akan mendapat tambahan pos menteri.

Menkes Terawan berada di zona



Dalam Rapat Kabinet Paripurna, Jokowi akan melakukan langkah *extraordinary* jika tetap tak ada program terobosan dari para menteri untuk menangani pandemi. Langkah luar biasa ini bisa menghapus lembaga atau merombak kabinet.



berbahaya dalam isu *reshuffle* ini karena sebelumnya dia dianggap menyepelekan penyebaran virus Covid-19. Akibat kealpaannya, kementeriannya terlambat memetakan penyebaran virus paling berbahaya saat ini tersebut, sehingga berujung juga pada keterlambatan melakukan tindakan dan penilaian yang dalam penanganan Covid-19.

Pada Januari lalu, ketika Covid-19 belum terdeteksi di Indonesia, Terawan berucap dengan nada nyinyir bahwa jika persebaran Covid-19 sampai ke negeri ini, kementeriannya telah menyiapkan langkah-langkah

antisipasi. Namun, pada praktiknya, ketika Maret lalu, kasus pertama muncul, Kemenkes kelabakan dan hingga saat ini belum memiliki solusi jitu dalam menangani pandemi paling berbahaya tersebut. Tak pelak, Wakil Sekretaris Dewan Majelis Syuro PKB Maman Imanulhaq dalam sebuah diskusi bertajuk “Menanti Perombakan Kabinet” pada Sabtu (4/7) mengatakan, Menkes Terawan merupakan menteri pertama yang layak untuk direshuffle Jokowi.

Selain Menkes, sejumlah menteri lain yang disebutkan layak untuk digeser adalah Menag Fachrul Razi. “Kemenag tak memiliki *sense of pandemic crisis*. Kita sisir programnya.

Neta S. Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)



Terawan Agus Putranto

Tidak satu pun yang menyentuh pandemi. Tambahan anggaran yang diusulkan Kemenag tak menyentuh kelompok ustaz hingga habaib yang terdampak,” ujar Anggota Komisi VIII DPR tersebut.

Selain itu, Menag Fachrul Razi pantas masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti posisinya karena beberapa statemennya kerap kontroversial. Pada awal menjabat, dia berencana melarang penggunaan *niqab* atau cadar untuk masuk ke instansi yang dimiliki pemerintah. Dia juga sempat mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang. Belum selesai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi kembali menuai pro-kontra terkait pemebrian surat rekomendasi perpanjangan izin organisasi ke masyarakatan yang kerap melakukan tindak kekerasan atas nama agama, yaitu Front Pembela Islam (FPI).

Ida Fauziyah Disorot

Sementara itu, kiprah Menaker Ida Fauziyah juga menjadi sorotan publik. Hingga Juni lalu, setidaknya ada tiga juta pekerja yang dirumah-



Ida Fauziyah

kan akibat Covid-19. Untuk menanggulangi pemutusan hubungan kerja ini, pemerintah melalui Kemnaker meluncurkan Kartu Prakerja. Namun program yang seharusnya menjadi andalan dalam menanggulangi pemutusan kerja justru menjadi olok-olok.

“Kemnaker tidak banyak gerak. Harusnya bisa dipastikan bahwa alokasikan dana kepadat karya agar orang yang terkena PHK bisa mendapat pekerjaan, ternyata ya berapa persen itu, masih di bawah lima persen yang terserap untuk padat karya,” kata Pakar Kebijakan Publik UGM, Wahyudi Kumorotomonya, seperti dikutip dari *Detik.com* (Selasa, 30/6).

Jika dilihat secara lebih jeli, sebe-



Fachrul Razi

narnya berbagai konten materi yang ada dalam program-program tersebut sudah banyak tersedia di internet secara gratis. Namun apa fungsinya kartu pra kerja jika sebenarnya hanya mengambil data dari internet yang tanpa itu semua, setiap individu bisa melakukannya sendiri.

Sehingga pada Juni lalu, program Kartu Pra Kerja dihentikan pemerintah. Walaupun demikian ancaman PHK di Indonesia akibat Covid-19 masih membayangi, sedangkan pemerintah masih gagap dalam menanggulangi masalah tersebut. Setelah Kartu Prakerja, tidak ada lagi inovasi untuk memberi pekerjaan atau pelatihan bagi mereka yang terdampak PHK. • **Amir/Nafik/Ika**

KEMENAKER TIDAK BANYAK GERAK. HARUSNYA BISA DIPASTIKAN BAHWA ALOKASIKAN DANA KEPADAT KARYA AGAR ORANG YANG TERKENA PHK BISA MENDAPAT PEKERJAAN, TERNYATA YA BERAPA PERSEN ITU, MASIH DI BAWAH LIMA PERSEN YANG TERSERAP UNTUK PADAT KARYA

Wahyudi Kumorotomonya
Pakar Kebijakan Publik UGM

NADIEM, NETFLIX DAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN



Nadiem Makarim, Mendikbud

Rencana Mendikbud Nadiem Makarim yang ingin berkolaborasi dengan Netflix, sebuah layanan penyedia video streaming berbayar dari Amerika Serikat (AS) menuai kritik beberapa waktu lalu. Meski dimaksudkan sebagai jalan keluar atas realisasi pendidikan jarak jauh di masa pandemi, namun sejumlah pihak menganggap program tersebut lebih dekat dengan upaya komersialisasi pendidikan. Tak pelak, gagasan ini mengusik suasana kebatinan para stakeholder pendidikan, terlebih provider asal Paman Sam tersebut berbayar mahal.



Salah satu kritik tajam berasal dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Hardly Stefano. Dia menyalahkan kebijakan Mendikbud yang lebih memilih berkolaborasi dengan *Netflix* sebagai lanjutan program belajar dari rumah. Pasalnya, dia kerap mendapat aduan dari wali peserta didik bahwa sejumlah tayangan dinilai memberikan pesan yang keliru.

Perlu dipahami bahwa *Netflix* bukanlah satu-satunya penyedia jasa VOD secara streaming digital, yang memungkinkan akses global. Industri hiburan Indonesia saat ini juga sudah membangun layanan VOD melalui internet. “Jika tidak ingin dipandang sebagai endorser *Netflix*, ada baiknya Kemendikbud juga menjalin kemitraan dengan provider layanan VOD lainnya,” dikutip dari *kpi.go.id*, pada Selasa (8/9).

Sebenarnya banyak perusahaan TV swasta di Indonesia yang mempunyai program serupa. Menurut Hardly, ini bisa menjadi peluang memberdayakan program maupun konten kreator

dalam negeri. Kemudian, TVRI bisa berperan dengan mensupervisi program-program tersebut untuk menunjang pelaksanaan PJJ.

Kerjasama bernilai Rp14 milyar tersebut semakin disorot karena *Netflix*, mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belum memenuhi kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak dari bisnisnya di tanah air. Tak pelak, kolaborasi tersebut dianggap punya motif komersialisasi pendidikan. Hal ini diamini oleh Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni.

“Kita tahu bahwa latar belakang Mas

Menteri pebisnis. Saya khawatir ada *conflict of interest* antara Kemendikbud dengan *Netflix*. Jangan sampai dunia pendidikan terus dikomersilkan karena memanfaatkan bencana Covid-19,” jelas Ali.

Respons yang Lambat

Nadiem juga tidak cepat merespons dampak Covid-19 terhadap peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan lainnya, terutama dalam hal memberlakukan relaksasi terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Kemendikbud tidak memberi bantuan subsidi berupa kuota atau Bantuan

“JIKA TIDAK INGIN DIPANDANG SEBAGAI ENDORSER *NETFLIX*, ADA BAIKNYA KEMENDIKBUD JUGA MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PROVIDER LAYANAN VOD LAINNYA.

Hardly Stefano.
Komisioner KPI





SEJAUH INI, DARI CURHATAN PARA PEJABAT KEMENDIKBUD BELUM ADA ARAHAN YANG JELAS BAGAIMANA DESAIN MANAJEMEN SDM DI DALAM. INI YANG MEMBUAT SEMANGAT KARYAWAN KEMENTERIAN JATUH DAN PASTINYA AKAN BERDAMPAK PADA PELAYANAN PENDIDIKAN.

Saleh Partaonan Daulay,
Anggota DPR RI

Langsung Tunai (BLT) secara cepat. Tek pelak, muncul desakan dari masyarakat yang meminta untuk segera dicarikan jalan keluar. Hingga lahir Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020, meski dinilai lambat.

Kebijakan tersebut juga tak luput dari kritik tajam masyarakat karena prosentasi potongan dan sistematika relaksasi biaya diserahkan kepada Universitas masnig-masing. Hal ini dinilai berpotensi terjadi kesewenang-wenang kebijakan.

Begitupun dengan bantuan kuota internet atau pulsa bagi peserta didik dan mahasiswa. Program tersebut untuk mendukung PJJ ini juga dirasa lambat, walau akhirnya janji itu baru akan dipenuhi pada 11 September 2020 dengan nilai anggaran sebesar 9 triliun. Subsidi bagi guru, tenaga kependidikan, dosen dan guru besar juga telah disiapkan sebesar 1,7 triliun.

Bersikap Elitis

Problem lain pada diri Mendikbud Nadiem Makarim yang disorot publik adalah soal gaya komunikasi yang tampak elitis. Wakil Sekjen Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Achmad Zuhri menilai, gaya komunikasi Nadiem terkesan elitis. Menurutnya, Nadiem tidak melakukan komunikasi dengan banyak pihak yang bergelut di dunia pendidikan. Juga,

tidak ada iktikad turun ke bawah dan mendengarkan bagaimana suara di bawah.

Sebab itu, sejumlah organisasi yang memiliki perhatian di sektor pendidikan memintanya untuk memperbaiki pola komunikasi dengan para guru. Ketua Umum Forum Guru Muhammadiyah (FGM) M. Pahri meminta agar Nadiem menghidupkan kembali pola komunikasi dengan guru.

Berdasarkan hasil survei FGM terhadap 1.000 guru menunjukkan menujukkan kinerja Nadiem masih dibawah rata-rata. Pahri menyebutkan, dari sisi komunikasi Menteri Nadiem patut diberikan nilai "D" karena sering menggunakan bahasa tidak biasa dan multi tafsir.

"Masih ada waktu yang panjang ke depan bagi Mendikbud Nadiem Makarim bersama jajaran Kemendikbud memperbaiki komunikasi yang tersumbat yang terjadi selama ini," kata Pahri pada diskusi daring bertajuk *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional*, beberapa waktu lalu.

Senada dengan Pahri, Ikatan Guru Indonesia (IGI) menggelar jejak pendapat tentang kinerja Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem. Hasil survei IGI menyimpulkan bahwa kinerja kemendikbud masih dianggap biasa saja. Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim menjelaskan, hal pertama

yang disurvei terkait komunikasi Kemendikbud selama satu semester terakhir. Hasilnya, sebanyak 54,2 persen responden menganggap kemampuan komunikasi Mendikbud Nadiem mendapat nilai "C".

Sementara itu, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay Saleh menilai, tak ada prestasi yang membanggakan dari diri Nadiem selama menjabat sebagai menteri. Karena itu, Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud.

"Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini," tegas Saleh dalam rilisnya.

Dia menambahkan, komunikasi Mendikbud di internal juga dinilai kurang baik, juga dengan kalangan pemerintah daerah guna berkolaborasi menjalankan program strategis pendidikan nasional. "Sejauh ini, dari curhatan para pejabat Kemendikbud belum ada arahan yang jelas bagaimana desain manajemen SDM di dalam. Ini yang membuat semangat karyawan kementerian jatuh dan pastinya akan berdampak pada pelayanan pendidikan," ujar Saleh kepada *Majalah Cara Pandang*. • Ika/Nafik/Amir

POLEMIK MENTERI NADIEM

Dalam sejumlah pendapat pengamat politik belakangan ini, nama Mendikbud Nadiem Makarim masuk dalam daftar sebagai salah satu menteri yang layak di-*resuffle* karena dianggap tidak cukup pandai merealisasikan sejumlah program pendidikan dan mengomunikasikannya kepada *stakeholder* pendidikan di Indonesia. Tak jarang, program yang maksudnya baik, tapi justru mendapat olok-olok publik karena tidak memiliki sensitifitas terhadap sejumlah organisasi yang telah memiliki kiprah panjang di bidang pendidikan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam realisasi Program Organisasi Penggerak yang bernilai milyaran rupiah. Beberapa kebijakan Kemendikbud yang dinilai kontroversial selama kepemimpinan Nadiem Makarim, yaitu:

Program Merdeka Belajar

Pada Desember 2019, Mendikbud Nadiem meluncurkan empat pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Saat itu, program ini disambut antusias oleh khalayak pendidikan di Tanah Air. Apalagi dengan munculnya turunan kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN), lembar Rencana Pokok Pembelajaran (RPP) menjadi cukup satu halaman, dan Fleksibilitas Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, belakangan diketahui, program ini terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.

Program Organisasi Penggerak (POP)

Program ini menuai polemik seiring mundurnya Muhammadiyah, NU dan PGRI karena merasa ada ketidakberesan dalam proses seleksi. POP adalah program pelatihan dan pendampingan bagi guru untuk meningkatkan kualitas peserta didik dengan menggandeng banyak organisasi. Dari 4.464 ormas yang mengajukan proposal, terdapat 156 ormas yang lolos seleksi evaluasi. Organisasi yang terpilih akan mendapat hibah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu Gajah dengan bantuan maksimal Rp20 milyar, Macan Rp5 milyar, dan Kijang Rp1 milyar per tahun selama dua tahun. POP mengundang polemik lantaran dua organisasi CSR Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation menjadi dua organisasi yang terpilih dalam kategori Gajah.

Komunikasi Buruk

Wakil Sekjen Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Achmad Zuhri menilai gaya komunikasi Mendikbud Nadiem Makarim terkesan elitis. Nadiem juga tidak berkomunikasi dengan banyak pihak terkait pendidikan. Tidak ada iktikad turun ke bawah, berkomunikasi dengan pihak-pihak pengelola lembaga pendidikan. Nadiem juga sering menggunakan bahasa tidak biasa dan multi tafsir.

Pelibatan Netflix dalam Realisasi Pembelajaran Jarak Jauh

Mendikbud dianggap lambat menghadirkan solusi alternatif dalam realisasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Justru, di tengah kegelisahan publik, Nadiem menggandeng Netflix yang merupakan provider konten *video streaming* luar negeri berbayar mahal. Untuk konsumsi peserta didik, justru penggunaan Netflix akan salah sasaran.



Strategi Pemasaran Properti ditengah Pandemi Virus Corona

Pada medio Desember 2019 di Wuhan, China digegerkan adanya wabah virus Corona atau Covid 19 adalah jenis penyakit flu yang menyerang manusia. Saat ini telah menjadi pandemi global menjangkiti ratusan negara dengan jumlah korban positif mencapai ratusan ribu orang termasuk Indonesia. Virus Corona di Indonesia terdeteksi pada awal Maret 2020 pada suatu acara dansa di Jakarta yang saat ini telah menjangkiti ratusan ribuan orang. Adanya pandemi virus corona ini mengakibatkan terganggunya hampir semua industri bisnis dari berbagi sektor kecuali bidang kesehatan dan merubah pola perilaku masyarakat dunia di semua kalangan. Begitu pula dengan dunia properti, ini menjadi tantangan yang tidak mudah untuk kedepan agar bisnis tetap bisa berjalan. Untuk mengatasi semua ini tentunya perlu dilakukan perubahan pola strategi pemasaran properti agar dengan kondisi saat ini tetap menjadi peluang yang menguntungkan.

Ada beberapa langkah strategi pemasaran properti ditengah pandemi virus corona saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

• Media Online

Kondisi saat ini hampir semua orang disarankan agar selalu dirumah. Sudah pastinya orang akan lebih banyak waktu untuk mengakses berita – berita dari media online. Properti kita bisa kita iklankan di portal – portal online yang banyak di akses orang. Tentunya dengan materi gambar atau video yang menarik agar orang dapat berkunjung ke iklan kita.

• Media sosial

Banyak orang saat ini melakukan kegiatan di rumah akan tetapi komunikasi dengan orang lain akan tetap dilakukan agar silaturahmi tetap terjalin. Kondisi seperti ini sudah seharusnya dapat kita manfaatkan produk properti kita di iklankan di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, twitter, youtube dan lainnya. Agar maksimal iklan kita di media sosial kita bisa memasukkan materi baru sehari 3 kali dan dengan cara iklan berbayar.

• SEO / Ads Google

Tidak dipungkiri saat ini hampir semua orang jika mencari sesuatu di dunia online akan mengakses Google. Inilah saatnya produk properti kita bisa iklankan secara maksimal di Google. Agar iklan kita selalu tampil di halaman pertama kita bisa manfaatkan SEO (Search Engine Optimization) dan Ads Google

yang berbayar. Agar iklan kita di Google bisa maksimal kuncinya adalah pemilihan keyword (kata kunci) yang lagi hits saat ini, tidak harus nama properti kita.

• SMS / WA blast

Saat ini di Indonesia ratusan juta orang telah menggunakan alat komunikasi berupa handphone. Produk properti kita bisa di iklankan dengan cara mengirimkan SMS ataupun WA yang akan diterima langsung oleh target customer yang kita tuju. Agar iklan kita bisa maksimal tepat sasaran kita harus memilih profil calon pembeli sesuai dengan produk properti yang kita iklankan.

• Televisi

Dengan banyaknya orang saat ini melakukan kegiatan dirumah, sudah tentunya juga akan mengakses berita atau memilih hiburan di Televisi. Ini juga bisa kita pilih untuk mmengiklankan produk properti kita. Keunggulan dari iklan di televisikita bisa menampilkan produk properti kita dengan visual yang bagus sehingga bisa lebih meyakinkan calon pembeli dan jangkauannya sangat luas.

• Tidak melakukan kegiatan Pameran

Sumber penjualan properti dari kegiatan pameran tidak dipungkiri bisa menghasilkan lebih dari 50 %. Kondisi saat ini dimana semua orang disarankan untuk tidak bepergian dan banyaknya mall yang dibatasi kegiatan operasinya bahkan sampai ditutup maka untuk kegiatan pameran seharusnya sementara ditiadakan. Anggaran pameran yaang sudah direncanakan bisa dialokasikan untuk kegiatan iklan.

• Pemberian Diskon dan kemudahan cara bayar

Kebiasaan orang Indonesia dari berbagai macam kalangan jika membeli sesuatu produk akan menanyakan potongan harga atau diskon. Ini bisa dilakukan tentunya besaran nya disesuaikan dengan hitungan harga jual setelah dikurangi biaya – biaya yang ada. Selain pemberian diskon, kemudahan cara bayar di properti juga sangat menentukan penjualan. Cara bayar di properti bisa lewat KPA / KPR bank atau langsung ke developer dengan cara bertahap. Saat ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan himbauan kepada perusahaan perbankan atau pemberi kredit untuk melakukan relaksasi kredit dikarenakan kondisi saat ini. Di properti bisa kita



APARTEMEN
SENTRA TIMUR
RESIDENCE

JADE TOWER

New!
Tower at
Sentra Timur
Residence

MULAI
RP **500** JUTAAN*

MARKETING GALLERY
Jl. Sentra Primer Timur
Jakarta Timur 13950 Indonesia
www.sentratimur.com | 021 4870 4999 | sentratimur | sentratimursuperblock

lakukan misalnya dengan menerapkan cicilan bertahap dengan tempo yang agak panjang.

• Pemberian hadiah langsung

Orang membeli sesuatu produk dengan harga ratusan juta biasanya selain diskon akan menanyakan hadiah. Ini bisa kita lakukan dengan pemberian hadiah yang menarik berupa paket hadiah untuk merangsang calon pembeli agar bisa memutuskan untuk mengambil produk properti kita.

• Kekuatan tim Sales

Tidak bisa dipungkiri, suatu produk apapun termasuk properti sangat mengandalkan tim sales. Agar tercipta sales yang militan maka harus diberikan benefit – benefit yang menguntungkan. Selain memberikan pelatihan atau motivasi, kondisi saat ini tim sales juga harus diberikan sesuatu yang sangat menarik agar selalu bersemangat menjual produk properti kita. Misalnya memberikan komisi yang lebih ditengah pandemi virus corona seperti saat ini dan paket hadiah ataupun bentuk lainnya. Tim sales juga perlu diberikan edukasi mengenai protokol kesehatan agar setiap ketemu calon pembeli merasakan kenyamanan baik dari sisi sales sendiri maupun customer.

Kondisi apapun hunian akan selalu menjadikan kebutuhan dikarenakan manusia hidup sudah barang tentu memerlukan tempat tinggal.

Saat kondisi pandemi virus corona seperti ini, diharapkan properti juga tidak

ikut larut terbawa pengaruh yang kurang baik. Makanya perlu dilakukan terobosan – terobosan agar selalu tetap menjadikan kebutuhan yang akan terus dicari. • **adv**

WIDODO

Praktisi Branding Property

-Email : dodo270607@gmail.com

DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., M.A.
ANGGOTA KOMISI II DPR RI

KINERJA MENTERI BIASA-BIASA SAJA, PRESIDEN PERLU TURUN TANGAN!

Kabinet Indonesia Maju genap berusia satu tahun pada Oktober 2020. Isu perombakan menteri pun banyak disuarakan pakar politik maupun sejumlah politisi senayan, karena setahun ini, mengutip pernyataan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, tidak terobosan program dari menteri-menterinya yang menyentuh permasalahan sosial secara langsung. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung

sejak Maret lalu di Indonesia, kenyataan ini semakin menguatkan dorongan publik agar Presiden segera melakukan perombakan kabinet. Beberapa menteri diprediksi akan di-*reshuffle*, salah satunya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim. Berikut adalah petikan wawancara kontributor *Majalah Cara Pandang* Faisal Aristama dengan Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA:

Presiden Jokowi marah-marah kepada para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna. Katanya nggak punya sense of crisis di era pandemi Covid-19. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu kan pernyataan Presiden. Apakah menterinya itu betul nggak punya *sense of crisis*? Jadi menurut saya menteri-menteri yang bekerja itu sekarang sedang mengupayakan segala kemampuan yang mereka miliki untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Nah, masalahnya sampai sekarang, itu kan belum teratasi, karena memang pandemi adalah virus baru, jadi bukan hanya kita yang kesulitan, negara-negara lain juga kesulitan untuk mengatasinya.

Tetapi, dalam konteks melawan pandemi, tentunya mesti ada upaya-upaya luar biasa oleh para menteri itu, termasuk melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemda,

kementerian, dan lembaga yang ada. Sekarang itu menjadi satu poin yang mesti dijadikan sebagai catatan kritis untuk melihat yang sudah terjadi.

Presiden Jokowi sempat mengancam reshuffle, tapi belum ada realisasi sampai sekarang. Apakah itu tanda menteri sudah punya sense of crisis?

Begini, kalau soal *reshuffle* adalah hak prerogatif presiden. Kalaupun presiden menganggap ada kinerja dari menterinya yang misalnya belum maksimal lalu presiden belum melakukan *reshuffle*, bisa jadi presidennya sedang memberikan waktu kepada para menterinya untuk memperbaiki kinerjanya.

Jadi, bisa jadi arahnya ke situ?

Kalau saya berharap supaya presiden segera melakukan *reshuffle* kepada menteri-menteri yang dianggap kinerjanya enggak baik. Katakanlah tidak mencapai

target sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Karena bagaimanapun memang presiden membutuhkan orang-orang pekerja yang siap untuk berbuat lebih dari yang biasa-biasa. Jadi pandemi ini bukan urusan biasa, tapi luar biasa. Karena itu, kita mengharapkan presiden turun tangan nanti.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat banyak kritik karena pembelajaran jarak jauh merepotkan siswa, orang tua, dan guru. Tanggapan Anda?

Hemat saya, dari sisi pendidikan ini memang apa yang dilakukan Kemendikbud belum maksimal. Secara jujur harus diakui begitu. Sebab sekarang yang paling sibuk mengurus pendidikan bukan Kemendikbud, tetapi emak-emak beserta guru-gurunya.

Kemendikbud tidak melakukan



apa-apa untuk misalnya membina, memfasilitasi bagaimana ada kelas-kelas jauh itu aturannya seperti apa dan seterusnya, itu enggak ada. Dan belakangan ini aja ada program pemberian pulsa itu kan. Itu pun setelah mendapat kritik masyarakat.

Berarti kebijakan Mendikbud belum mencerminkan kebijakan di masa krisis?

Iya. Jadi belum bisa, katakanlah menjawab kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan era pandemi ini. Ini kan ada hal-hal misalnya orang tidak boleh datang ke sekolah, lalu kalau sudah 6 bulan enggak datang ke sekolah bagaimana, kan gitu.

Orang datang ke sekolah orang pingin begini begitu, ah solusi itu apa? Kan sekarang orang tidak boleh saja, tidak boleh datang ke sekolah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lalu kalau tidak begitu terus bagaimana? Dibiarkan saja?

Ini faktornya apa, apakah karena Mas Menteri sendiri atau memang karena birokrasi di Kemendikbud

yang rumit?

Harus ada terobosan-terobosan dong! Orang berharap dulu waktu Nadiem Makarim jadi menteri akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, ekstraordinari yang betul-betul bisa membawa perubahan besar bagi dunia pendidikan kita. Ternyata setelah duduk biasa aja. Menurut saya biasa aja. Kalau saya sih menilainya begitu. Tolong catat, pendapat subjektif saya itu biasa saja dia (Nadiem) jadi menteri ini.

Program Organisasi Penggerak Kemendikbud juga sempat mendapat penolakan dari PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI. Bagaimana menurut Anda mengenai terobosan program ini?

Kalau POP kan lagi dievaluasi, ditunda sebentar. Menurut saya, Nadiem Makarim harus mendengar masukan-masukan dari ormas besar yang sudah punya pengalaman dalam mengurus pendidikan seperti Muhammadiyah dan NU.

Karena itu, saya melihat bahwa itu harus dijadikan sebagai dasar untuk

membentuk satu program. Ini kan anggarannya Rp525 milyar kalau nggak salah ya. Itu harus dipergunakan secara maksimal dan mencapai target sasaran untuk mensejahterakan, membahagiakan masyarakat kita. Jangan uangnya habis, ternyata hasil pencapaiannya tidak maksimal.

Kebijakan POP ini mendapat penolakan masif. Apakah menurut anda kebijakan ini tidak dipikirkan matang atau memang bagian dari berpikir out of the box Nadiem Makarim?

Tapi di situ kan si Nadiem ini kan punya orang-orang yang saya kira kan dia punya staf khusus atau tenaga-tenaga teknis yang mendukung. Saya denger ini malah ini didiskusikan dengan orang-orang seperti itu kan. Nah berarti kan ada diskusi sebetulnya, tetapi mungkin belum mendapat masukan dari masyarakat.

Berarti bukan langkah ekstraordinari Mas Menteri?

Ya, itu kan ada banyak program. Dia juga ternyata kan cuma *copy paste* dari program orang lain yang sudah



berjalan sebelumnya. Katakanlah seperti Program Merdeka Belajar. Kan itu sudah milik orang bahwa itu bukan murni programnya si Nadiem ini.

Teranyar, ada wacana penghapusan pelajaran sejarah dari kurikulum, bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya itu tidak boleh. Sejarah itu tetap harus ada. Di mana-mana orang selalu menjadikan sejarah itu sebagai dasar untuk melakukan refleksi terhadap kejadian-kejadian masa lalu dalam rangka memprediksi apa yang harus dilakukan di masa depan.

Itu fungsi daripada sejarah itu. Jadi, enggak boleh itu. Presiden Soekarno pernah mengatakan Jas Merah, jangan pernah melupakan sejarah. Hal itu karena sejarah menjadi ukuran sebuah bangsa untuk melihat keberhasilan-keberhasilan di masa lalu, juga sekaligus melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Itu yang harus diperbaiki dan disempurnakan.

Sejumlah kebijakan Kemendikbud

hampir mendapat penolakan yang masif dari berbagai kalangan, kira-kira layak nggak Nadiem Makarim masuk daftar reshuffle?

Kalau soal siapa yang mau di-reshuffle itu sebetulnya urusan presiden. Kita serahkan kepada Presiden siapa yang dia mau

untuk di-reshuffle, bukan kita yang menentukan. Tetapi tentu berbagai opini masyarakat terkait kebijakan, prestasi, capaian, itu harus jadi dasar dari presiden untuk melakukan penilaian terhadap kinerja menteri-menterinya.

Masyarakat ingin Mendikbud masuk daftar yang di-reshuffle?

He..he.. bisa jadi. Desakan publik yang tentu harus didengar dan dipertimbangkan.

Kalau masyarakat ingin, kira-kira siapa yang layak mengganti Mendikbud?

Jadi gini, Indonesia ini punya tokoh dan ahli-ahli pendidikan yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan yang nanti tinggal dipilih saja oleh presiden, siapa di antara mereka yang paling layak. Saya kira negeri ini tidak akan kekurangan figur yang pakar di bidang pendidikan. •

Identitas Personal

Riwayat Pendidikan

- SDN 2 Sibuhuan. Tahun: 1981 - 1987
- MTsN YAPI Sibuhuan. Tahun: 1987 - 1990
- MAN I Medan. Tahun: 1990 - 1993
- USU Medan. Tahun: 1993 - 1997
- UI - Jakarta. Tahun: 2000 - 2002
- UIN Syahid Jakarta. Tahun: 1998 - 2000
- Colorado State University. Tahun: 2007 - 2009
- UIN Syahid Jakarta. Tahun: 2004 - 2009

Riwayat Pekerjaan

- UIN Syahid, Sebagai: Dosen. Tahun: 2009 - 201
- IAIN Raden Fatah, Sebagai: Dosen. Tahun: 2001 - 2009

Riwayat Organisasi

- PP Pemuda Muhammadiyah, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2010 - 2014
- MUI Pusat, Sebagai: Ketua Komisi Luar Negeri. Tahun: 2010 - 2015
- ICMI Pusat, Sebagai: Wakil Sekretaris Dewan Pakar. Tahun: 2010 - 2015
- PP Muhammadiyah, Sebagai: Sekretaris LH dan HAM. Tahun: 2005 - 2010
- IMM, Sebagai: Ketua Komisariat. Tahun: 1995 - 1997
- Himpunan Mahasiswa Islam, Sebagai: Bendahara Komisariat. Tahun: 1994 - 1995



AGAR MEREKA TETAP BELAJAR

Dukasih Nur (17 tahun) adalah seorang peserta didik berkebutuhan khusus di kelas XII di salah satu SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Pagi itu, Senin (7/9), dia duduk dan memperhatikan layar laptopnya. Dia sedang mengikuti kelas dalam jaringan yang diselenggarakan sekolahnya. Setiap pagi, sejak masa pandemi mulai Maret lalu, proses belajar-mengajar memang dialihkan melalui *online*. Satu kali waktu, Nur memanggil orangtuanya untuk meminta penjelasan karena tidak cukup mengerti pelajaran yang sedang diajarkan gurunya.

Nur biasa mengikuti aktifitas belajar

dari guru pendidikan khusus setiap hari, dan bergaul dengan teman-teman sebayanya seperti siswa lain pada umumnya. Namun karena memiliki keterbatasan dalam mencerna pelajaran, maka ia mendapatkan bimbingan khusus dari seorang guru.

Selain Nur, salah satu peserta didik ABK lain yang ditemui *Majalah Cara Pandang* di kediamannya adalah Larasati (16 tahun). Saat ini, Larasati duduk di kelas X SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Dia memiliki keterbatasan pendengaran (tuna rungu). Karena keterbatasannya tersebut, dia sulit melakukan aktifitas seperti teman sebayanya, sehingga

pengasuhannya memberikan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, yaitu dengan mengupayakan edukasi atau stimulasi belajar bagi anak tersebut.

Menurut pengasuhnya Choirul Umamah, ada beberapa kegiatan yang di berikannya agar laras tetap mengisi waktu luang selama pembelajaran di rumah. Beberapa kegiatan itu seperti memperkenalkan lingkungan, melatih pekerjaan yang sesuai kemampuan, mengikutsertakan kegiatan di rumah, memberikan tugas mandiri, memotivasi diri agar tidak mudah putus asa, serta berbagai aktifitas yang mendorong pada peningkatan minat dan bakat yang ada dalam dirinya.

Situasi pandemi Covid-19 ini, menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sebab, pada umumnya, proses pengajaran ABK tentu berbeda dengan anak pada umumnya yang cenderung sensitif dalam menanggapi perubahan di sekitarnya.

Covid-19 membuat peserta didik ABK kehilangan rutinitasnya sehari-hari. Jika hal kondisi ini berlangsung lama, tentu akan berdampak pada perkembangan kemampuan ABK. Sangat mungkin mereka mengalami stres. Bahkan, dalam hal kemampuan berfikir dapat mengalami kemunduran, karena tidak ada stimulasi yang biasa dilakukan di sekolah.

Salah satu Guru Pendidikan Khusus Bu Devi mengatakan, kunci dari keberhasilan pembelajaran terhadap peserta didik ABK di masa pandemi ini adalah memastikan mereka memiliki kesibukan belajar seperti ketika berlangsung pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, peserta didik ABK seolah merasakan bahwa aktifitas mereka normal-normal saja setiap harinya.

“Efektifitas pembelajaran secara daring bagi peserta didik ABK tidak bisa maksimal. Jika diprosentasikan,

**“EFEKTIFITAS
PEMBELAJARAN SECARA
DARING BAGI PESERTA
DIDIK ABK TIDAK BISA
MAKSIMAL. JIKA
DIPROSENTASIKAN, YANG
DISERAP OLEH MEREKA
MUNGKIN HANYA 20%.”**

yang diserap oleh mereka mungkin hanya 20%,” ungkap Devi, ketika diwawancarai oleh *Majalah Cara Pandang* melalui layanan perbincangan maya *WhatsApp*, Jum’at (11/9).

Devi melanjutkan, kenyataan tersebut dapat dilihat dari keaktifan siswa di *Google Meet*, salah satu layanan aplikasi pertemuan di media sosial, yang hanya mencapai 10%, sementara dalam penyelesaian tugas hanya 10%.



MENURUT Dosen Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Joko Yuwono, pembelajaran di rumah untuk peserta didik ABK haruslah difokuskan pada tiga hal, yaitu mendorong produktivitas, kemandirian dan mengisi waktu luang.

Joko menambahkan, pengondisiannya berbeda-beda, tergantung pada kemampuan peserta didik ABK. Bisa dikelompokkan secara sendiri-sendiri, mana peserta didik yang berdaya pikir berat, sedang dan ringan. Bagi peserta didik yang berorientasi hanya pada kemandirian, bisa jadi membutuhkan pendampingan yang cukup ketat. Sementara untuk ABK yang berorientasi pada kebutuhan mengisi waktu luang, maka anak membutuhkan pendampingan yang ekstra.

Joko menyarankan lima hal yang dapat dilakukan orangtua peserta didik ABK dalam strategi pembelajaran di rumah, orangtua sebaiknya bekerjasama dengan sekolah, ikuti arahan dari sekolah, lakukan perubahan dan penyesuaian, kenali sumber daya yang ada di rumah, dan buat kegiatan di rumah juga belajar harian yang efektif.

“Joko menyebutkan, memang menjadi orang tua ABK dalam masa pandemi Covid-19 bukanlah perkara yang mudah. Orangtua dan anak harus sa-



ling memahami satu sama lain dalam kondisi yang seperti ini,” jelas Joko.

Sekali lagi, kata Joko, pembelajaran peserta didik inklusi di rumah melibatkan peran aktif orang tua, karena keluarga merupakan pilar penting dalam perkembangan daya berfikir ABK.

Perlu dimaklumi bersama, Covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali yang terjadi pada sektor pendidikan. Segala aktivitas belajar mengajar kini dilakukan melalui daring.

Menurut Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 7 Surabaya Tonny Santoso, yang lebih mendasar kaitannya dengan kebutuhan proses belajar daring untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah kurikulum yang diterapkan haruslah bermuara pada kebutuhan anak. Menurut dia, anak-anak yang bersekolah di SLB adalah peserta didik yang memiliki hambatan intelektual, sehingga para guru harus benar-benar



Guru mendampingi proses belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di rumah selama masa pandemi Covid-19.

memahami kompetensi siswanya.

“Kurikulum yang diterapkan untuk pembelajaran daring ABK harus bermuara pada kebutuhan anak. Sebab itu, setiap guru harus benar-benar mengenali anak didiknya,” terang Tonny dalam sebuah Webinar bertajuk *Pembelajaran Jarak Jauh Pada Satuan Pendidikan Khusus*, Selasa (2/6).

Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengenali peserta didik ABK ini, tanya Tonny, maka seorang guru perlu melakukan identifikasi dan *assesment* terhadap setiap peserta didiknya. Permasalahannya, tidak semua guru hal yang mendasar tentang substansi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus karena pada umumnya masih banyak yang terpaku pada definisi. Padahal, implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus merupakan rerata sehingga

guru dapat melakukan akomodasi kurikulum.

“Akomodasi kurikulum berupa modifikasi dan adaptasi. Modifikasi dilakukan setara dengan muatan kurikulum. Guru yang tidak memahami Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus, maka mereka tidak akan bisa merancang proses pembelajaran untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus,” urai Tonny.

Identifikasi dan assesment dalam pendidikan khusus itu menjadi kunci pembuka untuk guru melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan khusus bisa dilakukan dalam beberapa tahapan, di antaranya: *Pertama*, identifikasi dan *assesment* (penilaian) itu sendiri. Menurut dia, karakteristik anak didik di SLB itu unik, sehingga keunikan itulah yang harus dibidik oleh para guru. Identifikasi dan *assesment* ini penting untuk memetakan anak didik, yang mengala-

“GURU YANG TIDAK MEMAHAMI KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN KHUSUS, MAKA MEREKA TIDAK AKAN BISA MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN UNTUK PESERTA DIDIK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS.”

mi tuna rungu bagaimana kebiasaannya, dan untuk anak yang tuna wicara bagaimana cara berkomunikasi. Pada akhirnya, *assesment* akan menghasilkan profil individu peserta didik yang kemudian bisa dijadikan acuan dalam proses pembelajaran.

Kedua, setelah tahap identifikasi dan *assesment*, maka guru bisa menyandingkan hasilnya dengan memodifikasi kurikulum. *Ketiga*, adaptasi kurikulum pendidikan khusus. Adaptasi proses pembelajaran untuk siswa SLB meliputi: (1) waktu belajar diperpanjang dengan jeda waktu-waktu tertentu; (2) penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran; (3) pemberian tugas khusus yang berbeda dengan tugas tatap muka secara langsung; (4) pemberian penjelasan secara khusus; (5) penggunaan sumber/bahan ajar dan media yang berbeda/khusus.

Penggunaan bahan ajar berbasis daring untuk peserta didik ABK bisa memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran daring yang banyak tersedia seperti *WhatsApp Grup*, *Video Call* dengan jeda tertentu, *Zoom Meeting*, *Google Classroom*, dan lainnya.

• **Amir/Nafik**

ERA NORMAL BARU DAN KESIAPAN SEKOLAH INKLUSI



Peserta didik berkebutuhan khusus harus tetap mendapatkan pendidikan yang layak meski masa pandemi belum dapat dipastikan kapan akan usai. Jika harus dilakukan secara tatap muka, maka segala kebiasaan baru dalam belajar di sekolah, mesti disiapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Khusus untuk sekolah inklusi, pemberlakuan proses belajar dalam kenormalan baru jelas lebih ketat dibanding sejumlah satuan pendidikan lain yang berada di zona hijau. Beberapa kebiasaan baru yang perlu dijalankan di antaranya memakai masker, membawa tisu, masker cadangan dan tempat masker kotor, *hand sanitizer* dan perlengkapan ibadah sendiri, berbekal makan dan minum dari rumah, cuci tangan, tidak pinjam-meminjam barang ke temannya, jaga jarak, meng-

Syarat agar sekolah bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka adalah dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

hindari kerumunan, maksimal 5 siswa di kelas, diantar sendiri ke sekolah oleh walinya, guru memakai masker transparan, dan lainnya.

Salah satu video yang diunggah akun *YouTube* Kemendikbud RI bertajuk *Seru Belajar Kebiasaan Baru (ABK)*, digambarkan pentingnya menjaga jarak tempat duduk di ruang kelas bagi peserta didik ABK. Jarak tempat duduk satu peserta didik ke peserta didik yang lain minimal 1,5 meter. Begitupun dengan para guru jika duduk di dalam kantor atau di transportasi umum. Laman ini juga berpesan supaya pengantar anak didik tidak boleh mampir ke tempat lain selain ke sekolah.

“Bila perlu, dampingi anak-anak hingga masuk ke gerbang sekolah. Di

sekolah, ingatkan anak-anak didik untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas,” pesan video tersebut lebih lanjut.

Namun, pemberlakuan proses belajar ABK untuk tatap muka ini hanya bisa dilakukan di daerah-daerah yang berada pada zona hijau, selain itu dilarang dan tetap melaksanakan belajar dari rumah secara penuh.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap belajar dari rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar pemeriksaan dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid

menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh,” tegas Nadiem.

Penerapan protokol kesehatan ketat merujuk pada Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19*. Untuk peserta didik ABK memang proses pembelajarannya berbeda, terlebih jika dilakukan melalui tatap muka. Ada beberapa kebiasaan baru yang mutlak ditetapkan demi menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Nadiem dalam sebuah kesempatan koordinasi kementerian melalui seminar online. Menurutnya, secara umum bahwa prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Dia melanjutkan, tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, masih dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah,” terang Nadiem.

Untuk zona hijau boleh melaksanakan proses belajar di sekolah, dengan syarat memberlakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Dalam hal ini, khususnya ada pembatasan jumlah peserta didik di kelas, menghindari keru-



Peserta didik melakukan cuci tangan sebelum memulai aktifitas di sekolah.

munan di lingkungan sekolah, dan jam belajar yang dikurangi.

Sementara peserta didik yang berada di zona selain hijau, sebagaimana pesan Mendikbud Nadiem Makarim, akan tetap belajar dari rumah hingga bisa dipastikan kapan berakhirnya pagebluk ini. Pakar Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Yusuf mengatakan, belajar dari rumah tak akan mengurangi substansi pembelajaran kepada peserta didik, tak terkecuali bagi ABK, jika guru-guru bisa beradaptasi dengan model pembelajaran daring yang lebih kreatif.

“Memang, patut diakui, bahwa model daring untuk ABK perlu usaha lebih karena tak mungkin mengajarkan peserta didik ABK yang memiliki keung-

gulan masing-masing dalam satu forum aplikasi belajar online,” jelasnya.

Menurut pengakuan salah satu guru SLB di Surabaya M. Aziz, dengan merujuk pada pengalamannya mengajar online peserta didik ABK, selama ini dia terkadang harus menelfon satu per satu anak didiknya melalui aplikasi *zoom meeting* atau *video call* lewat *WhatsApp*. “Satu murid biasanya sampai satu jam hingga satu jam setengah untuk satu mata pelajaran,” cerita Aziz.

Dengan demikian, yang paling penting dalam hal ini adalah memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi seluruh peserta didik, tak terkecuali untuk ABK. Jadi, baik pembelajaran berbasis daring maupun luring, harus tetap berjalan agar sektor pendidikan di negeri ini tidak mengalami stagnasi yang berimbas bagi masa depan generasi saat ini di kemudian hari. • **Nafik**



WARISAN PENGETAHUAN TIGA TOKOH BESAR

Setelah wafatnya guru bangsa Abdul Malik Fadjar, lalu disusul pendiri Kompas Jakoeb Oetama dan intelektual Muhammadiyah sekaligus budayawan MT Arifin. Praktis, negeri ini, tengah dinaungi langit mendung nan pekat, karena dalam waktu bersamaan kehilangan tiga sosok yang berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Ilmu pengetahuan yang ketiganya wariskan tidak akan pernah luntur.



Abdul Malik Fadjar

Dalam satu pekan kedua September lalu, Indonesia begitu berduka karena kehilangan tiga figur penting yang menginspirasi, yaitu Abdul Malik Fadjar, Jakob Oetama dan MT. Arifin. Masing-masing memiliki kiprah dan keteladanannya sendiri. Kontribusi ketiganya, di bidang pendidikan, pers, dan sosial budaya di negeri ini tak bisa dilupakan. Semuanya menjadi warisan berharga yang sampai kapanpun tetap bisa digali, diajarkan, dan diteladankan.

Abdul Malik Fadjar, biasa disapa Pak Malik, meninggal pada usia 81 tahun, tepat pada Senin (7/9). Dia pernah menjabat Menteri Agama pada era Presiden BJ Habibie dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Kemudian, ia sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ad-interim menggantikan Jusuf Kalla yang kala itu mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada 2004. Di luar pemerintahan, Pak Malik aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pak Malik dikenal sebagai tokoh bangsa yang sangat peduli pada dunia pendidikan. Darah Guru menancap dalam dirinya sejak ia menjadi guru di sebuah desa terpencil di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Selama puluhan tahun menjadi guru di Muhammadiyah, ia tak sekedar menjadi pendidik tapi berkontribusi besar membangun banyak sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia.

Bahkan, Pak Malik sempat menjadi dua rektor sekaligus di dua PTM, yakni Universitas Muhammadiyah Malang (periode 1983-2000) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (1994 – 1995).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mengungkapkan, wafatnya pria kelahiran Yogyakarta ini menyisakan duka sangat mendalam. “Pak Malik adalah mentornya di bidang pendidikan dan pemerintahan,” ujar Muhadjir.

Dia menambahkan, Pak Malik merupakan mantan Mendikbud dan Menko PMK, jabatan yang pernah dan sedang dijabat oleh Muhadjir. “Saya mengenal baik Prof. Malik, beliau adalah senior yang telah lama berkiprah di Muhammadiyah. Pendahulu saya di Mendiknas dan Menko Kesra, saya banyak belajar dari beliau,” sambung Muhadjir.

Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling kehilangan guru besar di bidang filsafat pendidikan ini. Jasanya begitu besar di Persyarikatan Muhammadiyah. Begitu juga dengan pemikirannya yang senantiasa mewarnai gerak dan langkah organisasi, terutama di bidang pendidikan.

“Jadi, Pak Malik adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki



MT. Arifin

Muhammadiyah. *Almarhum adalah salah seorang kader/tokoh terbaik Muhammadiyah sehingga dapat mewakili Muhammadiyah dalam banyak jabatan politik kenegaraan,*” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9).

Sementara itu, dua hari berselang, Indonesia kehilangan tokoh pers, pebisnis sekaligus pendiri *Kompas Gramedia Grup* Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9), karena menderita gangguan multiorgan. Sebelum meninggal, Jakob sempat mengalami koma dengan kondisi membaik, lalu kembali memburuk selama dua minggu hingga menghembuskan nafas terakhir. Jakob mengawali karir sebagai guru, namun kemudian dia memilih jalan sebagai wartawan dan mendirikan jaringan media terbesar *Kompas* bersama rekannya PK Ojong.

Jakob membesarkan Intisari dan Kompas bersama PK Ojong, namun setelah 15 tahun kebersamaannya, PK Ojong meninggal dunia, sehingga Jakob yang awalnya fokus pada redaksional, terpaksa turut mengelolah urusan bisnis yang selama ini dipegang PK Ojong. Namun berkat kegigihannya,

Kompas menjadi salah satu media harian terbesar di Indonesia.

Dahlan Iskan dalam website resminya *disway.id*, mengungkapkan, Jakob adalah sosok yang santun dan representasi orang Jawa yang sempurna. Kesantunan Jakob tercermin pada gaya pemberitaannya di *Kompas*.

“Jurnalistik *Kompas* adalah jurnalistik yang santun”, tutur Dahlan.

Menurutnya, *Kompas* sebagai media pengkritik pemerintah saat itu mampu bertahan dari pembredelan. Berbeda dengan media massa lainnya saat itu, yang mati karena dibredel pemerintahan Orde Baru, misalnya *Kami* milik ayah Nadiem Makarim, *Nusantara* milik TD Hafaz dan *Indonesia Raya* yang didirikan Mochtar Lubis. Kenyataannya *Kompas* paling Hebat, paling kaya raya dan besar.

Jakob mewarisi nilai yang menjadi tonggak hidup jurnalisme. Tidak hanya bagi *Kompas*, tetapi juga mewarnai perjalanan jurnalisme nasional. Minat dan kepekaan Jakob pada masalah-masalah kemanusiaan yang kemudian menjadi spiritualitas *Kompas* diakuinya sebagai warisan yang dipupuk selama pendidikan di seminari menengah.

“Saya sangat terbantu dan diperkaya oleh kepekaan humaniora yang terpupuk dan berkembang berkat pendidikan di seminari menengah,” kata Jakob sebagaimana dituturkan dalam buku *Syukur Tiada Akhir: Jejak Langkah Jakob Oetama* (2011).

Ia pernah ditawarkan menjadi menteri di era Soeharto, tetapi ditolak. Ia merasa lebih bahagia menjalani misi hidupnya denganewartakan kemanusiaan dan ke-Indonesiaan yang majemuk melalui berbagai tulisannya. Ia lebih senang dan bangga disebut wartawan daripada pengusaha.

Bagi Jakob, kebesaran nama dan cerita sukses perjalanan hidupnya bukanlah semata karena kehebatan dirinya, melainkan *providentia dei*, bahasa latin yang berarti penyelenggaraan Ilahi. *Providentia Dei* adalah kata-kata yang selalu ia selipkan tiap kali ia berkisah tentang pengalaman hidupnya, terutama tentang perjalanan panjang membesarkan *Kompas*. Di balik maknanya, tersirat kerendahan hati luar biasa. Dia mengimani, Tuhanlah yang menuntun langkah hidupnya melalui berbagai peristiwa kebetulan dalam hidup.

Dengan begitu, suara kalbu Jakob untuk memanusiaikan manusia melalui karya-karya jurnalistik semakin tersebar luas dan mewarnai negeri ini.

Di hari yang sama Pak Jakob meninggal, tokoh sekaligus budayawan Muhammadiyah MT. Arifin juga menghembuskan nafas terakhir. Arifin meninggal di Solo, pada pukul 12.00 WIB, di usia 64 tahun. Menurut keterangan sang istri, Muji Wahyani (64), Arifin mengidap gagal ginjal selama empat tahun terakhir. Meski telah rutin melakukan cuci darah selama empat tahun itu di setiap Selasa dan Jumat, namun almarhum tidak melakukan cuci darah pada Selasa (8/9), dan satu



Jakob Oetama

harinya langsung meninggal dunia.

Semasa hidupnya, Arifin seringkali menghiasi layar kaca sebagai pengamat politik dan militer. Dia banyak melakukan studi tentang budaya sejarah, politik hingga mengamati persoalan militer yang membuat dirinya sering didapuk sebagai narasumber. Mantan aktivis ini bahkan pernah mendekam di penjara karena protesnya di tahun 1998. Ia menjadi saksi betapa kekejian dan kebusukan rezim Soeharto telah memporakporandakan Solo di kala itu. Apa yang ia lihat, amati dan teliti tertuang dalam bukunya *Solo Bangkit* (2008).

Pergaulannya yang luas serta pendidikannya yang matang, mengantarkan ia pada jabatan struktural di kampus. Arifin menyelesaikan pendidikannya

di IKIP Yogyakarta (UNY) sampai tingkat doctoral. Ia berguru kepada Ahmad Syafii Maarif. Gayanya berceramah ia akui mengadopsi dari Syafii Maarif. Pada 1985, dia menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta aktif di Lembaga Penelitian dan Studi Kemasyarakatan UMS. Di lembaga ini, Arifin meneliti dan mendalami topik tentang Muhammadiyah dan menjadi perintis majalah *Akademika*, yang cukup penting di kala itu.

Arifin kemudian lebih intens meneliti tentang Keris dan Ratu Kidul. Bukunya yang berjudul *Keris Jawa* (2006) menjadi karya penting dan ensiklopedis tentang perkerisan. Selamat jalan para tokoh bangsa, karyamu pada bangsa Indonesia akan senantiasa harum. • Ika

KEBIJAKAN BANTUAN KUOTA INTERNET DIRESMIKAN MENDIKBUD

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020, Jumat 9/25/2020) secara virtual.

Kebijakan itu diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi.

Peresmian disaksikan langsung secara virtual oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan para Direksi operator seluler yang ada di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, AXIS, 3 (Tri), dan Smartfren.

“Keterbatasan ketersediaan paket data internet bagi pendidik dan peserta didik selama ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” ujar Nadiem.

Solusinya, Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan senilai Rp 7,2 triliun.

“Saya bersyukur atas kerja sama dan koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga sehingga kebijakan bantuan kuota data internet dapat terealisasi. Seluruh penerima manfaat yakni peserta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mendapatkan kuota internet sesuai yang diperlukan selama empat bulan ke depan,” tutur Mendikbud.

Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan rasa syukur bahwa asistensi fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk mendukung PJJ bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen bisa terwujud dengan kerja keras Mendikbud, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Bappenas, dan banyak pimpinan lembaga lainnya serta keberpihakan dari Presiden Joko Widodo untuk mengerjakan ini.

“Asistensi fiskal diberikan kepada 60 juta siswa

untuk pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Tentunya asistensi ini sangat bermanfaat. Apalagi Menteri Nadiem sudah mengatur alokasi pemanfaatannya dengan baik. Saya kira ini keputusan yang baik sekali,” ujar Menkominfo.

Dari sisi Kemenkominfo, dia memastikan operator seluler terus menjaga kualitas jaringan agar terjaga dengan baik.

“Kami meminta agar operator seluler turut mengambil bagian penting untuk memerhatikan betul kondisi jaringan di lokasinya masing-masing. Perhatian dari seluruh pemangku kepentingan ini sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar-mengajar,” kata Menkominfo.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerja sama itu adalah hal yang sangat positif karena negara hadir untuk rakyat, bekerja baik untuk rakyat, dan bekerja 24 jam untuk rakyat.

“Program kerja kami dari awal tidak pernah berubah. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh adalah tiga strategi yang dijalankan secara baik. Kebijakan bantuan kuota data internet menjadi bagian dari Indonesia tetap kerja,” jelas Menteri BUMN.

Bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum berarti yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar berarti yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>.

Alokasi kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

• adv



JOHNNY G PLATE: OPERATOR JAGA KUALITAS JARINGAN BANTUAN KUOTA BELAJAR



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta operator seluler yang terlibat dalam program bantuan kuota belajar untuk menjaga kualitas jaringan mereka.

“Kominfo memastikan operator seluler menjaga kualitas jaringan dengan baik. Setiap operator seluler yang ambil bagian, perhatikan betul ketersediaan infrastruktur di tempatnya masing-masing,” kata Menteri Kominfo Johnny G Plate, saat peluncuran Bantuan Kuota Data Internet 2020, secara daring, Jumat.

Kominfo mengharapkan bantuan kuota internet untuk belajar tersebut bisa menjangkau lebih dari 60

juta siswa yang harus mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi COVID-19.

Kominfo menyatakan perhatian mereka saat ini untuk perce-



patan perluasan jaringan dan infrastruktur agar penyelenggaraan PJJ bisa berlangsung dengan baik. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan penataan dan penataan ulang spektrum frekuensi.

“Kami akan memperhatikan penataan spektrum frekuensi, dengan *farming* dan *refarming* supaya PJJ bisa berjalan dengan baik,” kata Johnny. Dalam jangka menengah, Kominfo akan mempercepat perluasan akses internet di ribuan desa/kelurahan dan 150.000 titik fasilitas publik.

Hingga akhir 2022, pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan diprioritaskan untuk menghadirkan sinyal 4G di 12.548 desa/kelurahan. Sementara, akses internet di 150.000 titik layanan publik ditargetkan selesai pada kuartal III 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini meluncurkan program Bantuan Kuota Data Internet 2020 untuk pelajar dan guru di Indonesia untuk Pembelajaran Jarak jauh.

Kuota tersebut akan diberikan mulai September hingga Desember 2020, untuk nomor ponsel Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, 3 (Tri) dan Smartfren.

Pemerintah akan memberikan kuota sebesar 20GB per bulan untuk peserta didik Pendidikan anak usia dini (PAUD), 35GB per bulan untuk pelajar SD-SMA dan 42GB untuk pengajar PAUD, SD hingga SMA. Sementara itu, mahasiswa dan dosen akan diberikan bantuan kuota sebesar 50GB per bulan. • **adv**

Mendikbud: Bantuan Kuota Internet Disederhanakan Persyaratannya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pihaknya menyederhanakan persyaratan bantuan kuota internet yang diperuntukkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

“Kami memastikan bahwa persyaratan tersebut dilakukan agar meminimalisir isu-isu birokratis yang bisa menghalang. Jadi kami buat persyaratannya sesederhana mungkin untuk mendapat kuota data internet,” ujar Nadiem dalam peresmian kebijakan bantuan kuota data internet 2020 di Jakarta, Jumat.

Nadiem menambahkan garis besar mekanisme atau proses penyiapan data awal verifikasi dan validasi data nomor ponsel. Langkah pertama adalah pendataan nomor ponsel oleh operator satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik, dan kalau di Universitas PD Dikti tahap awal.

“Ya ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Lalu langkah kedua adalah melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler pada perusahaan-perusahaan telekomunikasinya,” tambah dia.

Langkah kedua tersebut untuk memastikan apakah nomor tersebut aktif atau tidak aktif atau tidak ditemukan. Langkah ketiga adalah pimpinan satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

“Jadinya poin yang penting di sini adalah semua pimpinan satuan pendidikan yaitu kepala sekolah maupun pimpinan universitas adalah penanggungjawab untuk akurasi dari pada nomor-nomor tersebut,” jelas dia.

Langkah keempat, operator melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan dan langsung dikirim kuotanya kepada penerima.



“Jadi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau saya masih belum menerima bantuan. Kalau masih belum menerima bantuan kuota. Tahap pertama adalah untuk segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan, dan juga operator sekolah yang ada. Jadi yang pertama adalah lapor kepada pimpinan satuan pendidikan, kepada kepala sekolah, karena mereka adalah yang bertanggungjawab untuk akurasi nomor-nomor tersebut,” terang Nadiem.

Peserta didik maupun tenaga pendidik dapat menyampaikan nomor ponsel yang didaftarkan dan cek operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif.

“Jadinya bagi yang belum menerima. Jangan khawatir penyaluran ini dilakukan secara bertahap bahkan tiap bulan ada dua tahap yang bisa dilakukan dan saat ini diberikan masa berlaku terhitung sejak bantuan kuota belajar diterima,” cetus dia.

Bantuan kuota internet bulan pertama tahap pertama disalurkan mulai 22 September hingga 24 September. Untuk tahap dua bulan pertama pada 28 September hingga 30 September 2020.

Bantuan kuota internet tersebut diberikan selama empat bulan mulai September hingga Desember.

Selanjutnya, bantuan kuota data internet untuk bulan kedua yakni tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020. Selanjutnya, tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020 dan tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. • **adv**



KSDI, UTAMAKAN KESEHATAN DARIPADA POLITIK

Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) mendorong komitmen pemerintah untuk memprioritaskan sektor kesehatan dibanding ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Seluruh pembantu presiden dan aparaturnegara harus satu visi dalam mengambil kebijakan di masing-masing lembaga.

Sebab itu, Ketua KSDI Yayan Sopyani Al Hadi dalam seminar Web bertajuk “Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi” pada Minggu (20/9) berharap pemerintah bisa

menerbitkan Perppu Pilkada yang berisi larangan kampanye dengan melibatkan kerumunan massa; mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan; dan menjadi payung hukum bagi Polri dan TNI untuk mendisiplinkan dan menertibkan warga agar mentaati protokol kesehatan.

Dia juga mendorong supaya KPU melakukan berbagai upaya progresif dan menerbitkan PKPU untuk keselamatan jiwa rakyat Indonesia saat mengikuti proses Pilkada. Selain itu PKPU juga harus berisi aturan-aturan

tegas karena ada indikasi politik uang yang akan semakin marak dalam Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Pelaksanaan Pilkada perlu diikuti dengan partisipasi pemilih yang dominan sehingga hasil Pilkada *legitimate* dan di saat yang sama harus menjamin keamanan dan keselamatan pemilih,” jelas Yayan.

Covid-19 masih menjadi ancaman yang nyata hari ini, sehingga untuk merespons penanganan wabah ini secara umum, penting sekali bagi pemerintah merealokasikan anggaran untuk melakukan *tracing massive* berupa *Swab*

Test serentak secara gratis kepada masyarakat secara luas.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, apabila ekonomi mau kembali berjalan maka mau tak mau kesehatan juga harus ditangani dengan baik. Karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang harus benar-benar dilakukan. Dengan mendorong untuk menjadikan kesehatan sebagai hal utama.

Wiku berpendapat agar anggaran kesehatan ditingkatkan bukan hanya untuk membangun rumah sakit, melainkan membangun garda preventif promotif, promosi kesehatan yang masif di seluruh Indonesia. Tantangan terbesar negeri ini dalam menangani pandemi adalah mengintegrasikan data penyebaran Covid-19.

Masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 secara berbeda-beda sehingga kerap menjadi kendala pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemkes) saat memverifikasi data yang diterima dari daerah.

Wiku berharap antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memiliki keselarasan sistem dalam

memasukkan data Covid-19. Kualitas penanganan pandemi Corona dapat dilihat melalui data-data kasus Covid-19. Sebab melalui data, Satgas Covid-19 dapat menganalisa dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Data-data ini tidak hanya berbicara mengenai akumulasi jumlah kasus positif, tetapi juga meliputi jumlah kasus aktif dari waktu ke waktu.

Dalam kesempatan ini, Wiku juga menyoroti daerah yang merupakan zona merah risiko Covid-19. Apabila daerah tersebut masih berada di zona merah selama dua minggu, ia meminta agar pemerintah daerah segera siapkan langkah-langkah antisipatif. Sebab kalau zona tidak berubah, dalam kondisi zona merah terus dalam 2 minggu saja itu harus antisipasi segera.

Di kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan kurva Covid-19 di Indonesia terus naik sebab tindakan preventif belum maksimal. Tindakan preventif itu adalah *testing*, *tracing* dan *treatment*, serta program BKS, alias bagi masker; Kampanye 3 M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan); serta saksi pelanggaran Covid-19.

Menurutnya, *testing* berguna un-

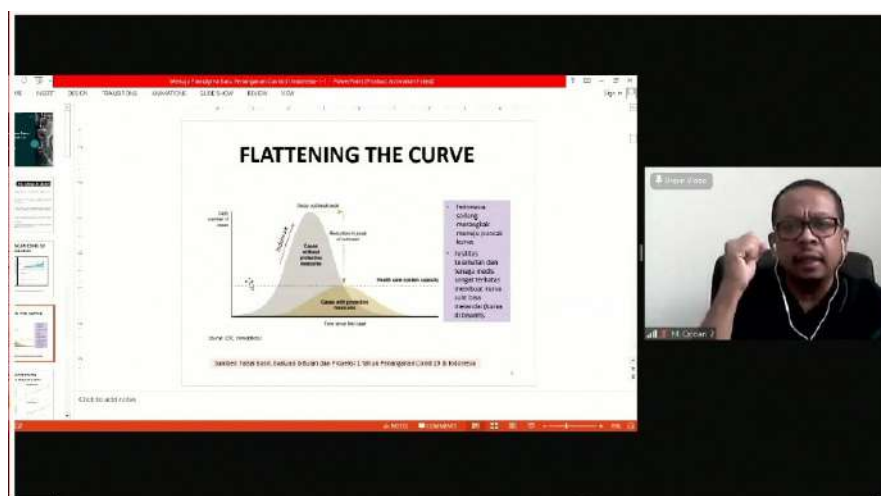
tuk mengidentifikasi orang terinfeksi Covid-19 untuk selanjutnya dilepas karena negatif; diisolasi atau dirawat agar tidak menular pada orang lain atau memburuk. Sementara *tracing* berguna untuk menelusuri semua orang yang berinteraksi erat dengan pasien Covid-19, untuk selanjutnya dikarantina dan dites karena potensial tertular, sementara yang tanpa gejala juga tetap harus dikarantina dan dites karena 86 persen adalah orang tak bergejala (OTG).

Sementara *treatment* adalah dengan menyediakan fasilitas isolasi bagi OTG dan gejala ringan, serta fasilitas perawatan bagi pasien Covid-19 gejala sedang dan berat.

Sebab itu, program *testing* ini harus ditingkatkan jumlahnya agar merata seluruh provinsi sesuai standar WHO. Pun demikian, *tracing* juga harus ditingkatkan rasionya agar sesuai standard WHO yakni 30 orang. *Tracing* sangat besar dampaknya dalam menurunkan penyebaran Covid-19. Testing pun harus diprioritaskan ke kontak erat pasien agar berdampak.

Qodari menawarkan strategi lokomotif kereta api dalam penanganan Covid-19. "Strategi yang tepat bukan Rem dan Gas, tapi strategi Lokomotif Kereta Api, yakni kesehatan, khususnya pencegahan Covid-19, menjadi lokomotifnya dan ekonomi, politik, pendidikan, kesenian, olahraga, dan lain-lain menjadi gerbongnya. Sebagai lokomotif, kesehatan dijadikan prioritas baik secara regulasi, kelembagaan, personalia maupun anggaran," kata Qodari.

Dikeempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ada lima prinsip dalam menangani



M. Qodari,
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Covid-19, yaitu pro-aktif, transparan, ilmiah, inovatif dan kolaboratif. Pemerintah Jawa Barat terus aktif tanpa harus selalu menunggu pusat karena pemerintah pusat pun tidak semuanya punya kapasitas untuk memahami sepenuhnya bagaimana Covid-19 ini.

“Memang harus ada yang selalu disinkronkan antara kombinasi *knowlegde* di daerah dan kebijakan pusat frekuensinya. Jangan terjadi kegaduhan-kegaduhan karena multi-tafsir,” kata Ridwan Kamil.

Emil. Dia menganggap bahwa Covid-19 ini sebagai medan peperangan. Karena dalam kondisi perang maka semua orang harus bela negara, baik dengan harta, ilmu pengetahuan atau tenaga.

“Jika tidak ingin membela, maka jangan jadi korban dengan menjauhi kerumunan dan kalau terpaksa berada di dalam kerumunan gunakan 3 M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak),” kata Emil.

Emil pun menilai ada pola komunikasi dalam penanganan Covid-19 ini dengan menggunakan tiga jenis kacamata, yaitu kacamata politik, ilmiah dan kemanusiaan. Kalau menggunakan kacamata politik, isinya senantiasa ingin menyalahkan para pengambil keputusan. Ingin membanding-bandingkan antara satu pengambil keputusan dengan pengambil keputusan yang lain.

“Harus kurangi mendiskusikan Covid-19 ini dengan kacamata politik yang sangat bising. Kita harus bergeser membaca Covid-19 ini dengan kaca-

mata ilmiah, solidaritas kemanusiaan, saling memahami, dan saling mengapresiasi,” ungkap Emil.

Sementara itu, dari pandangan ekonomi Kepala BPS Suhariyanto menyambung, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada 10-26 Juli 2020 dengan melibatkan 34.559 responden yang terdiri dari 6.821 pelaku Usaha Menengah Besar (UMB), 25.256 Pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK) dan 2.482 pelaku usaha pertanian, didapatkan banyak temuan.

“Dari 82,9 persen pelaku usaha yang mengaku pendapatannya menurun akibat Covid-19, rinciannya adalah 82,3 persen UMB mengaku pendapatannya menurun, dan 84,2 persen UMKM mengaku pendapatannya menurun. Dan sektor usaha yang pendapatannya menurun paling drastis adalah akomodasi dan makanan minuman, jasa lainnya, serta transportasi dan pergudangan,” papar Suhariyanto,

Ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan selama pandemi Covid-19 antara lain, 8 dari 10 perusahaan, kehilangan pelanggan atau klien. Sementara 6 dari setiap 10 perusahaan menghadapi kendala akibat rekan bisnis mereka terdampak sangat buruk atau tidak bisa beroperasi secara normal, baik di skala UMK maupun UMB. Kemudian sekitar 53,17 persen UMB dan 62,21 persen UMK mengha-

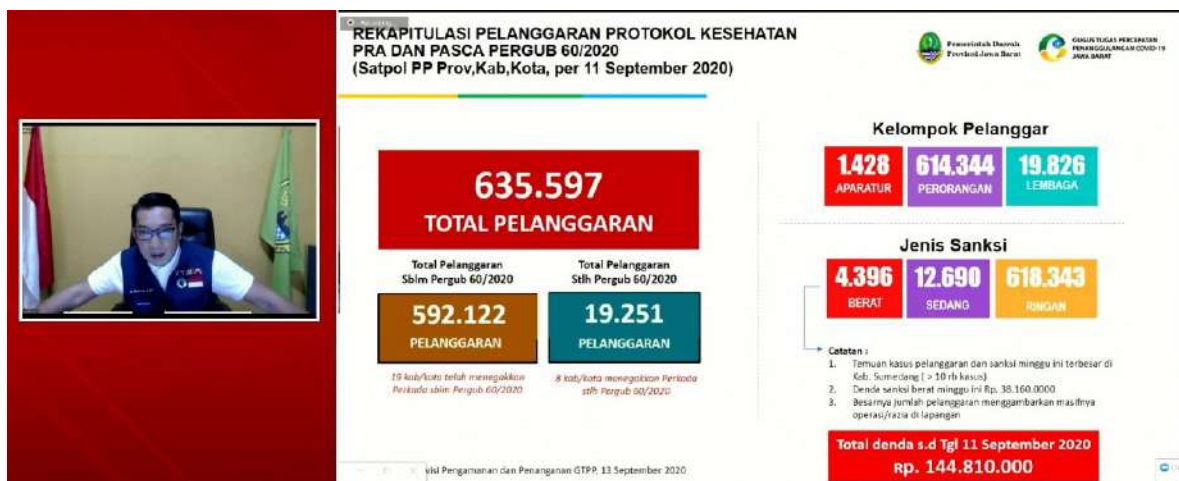
dapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Pakar Epidemiologi UI Iwan Ariawan menanggapi tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, PSBB berpengaruh terhadap penekanan laju Covid-19. Risiko penduduk tertular Covid-19 pada saat PSBB 0,55 kali dibandingkan sebelum PSBB. Dengan kata lain, PSBB berhasil menurunkan risiko penduduk terinfeksi Covid-19 setengah kalinya dibanding awal epidemi.

Data di Jakarta, ketika proporsi penduduk di rumah saja berada di 55-65 persen, tidak ada perbedaan kasus per hari. Namun ketika proporsi penduduk di rumah saja 50-55 persen, maka setiap penurunan 1 persen di rumah saja, estimasi kasus meningkat 20 per hari. ketika proporsi penduduk di rumah saja kurang dari 50 persen maka setiap penurunan 1 persen di rumah saja mengakibatkan estimasi kasus meningkat 100 per hari.

“Jadi sebetulnya dari analisa kami, PSBB lalu manfaatnya banyak karena kita bisa menurunkan risiko penduduk Indonesia untuk terinfeksi Covid-19,” kata Iwan.

Saat DKI Jakarta menjalani PSBB Transisi, seluruh kegiatan ekonomi mulai berjalan dan penduduk mulai bergerak ke luar rumah. Hal ini pun

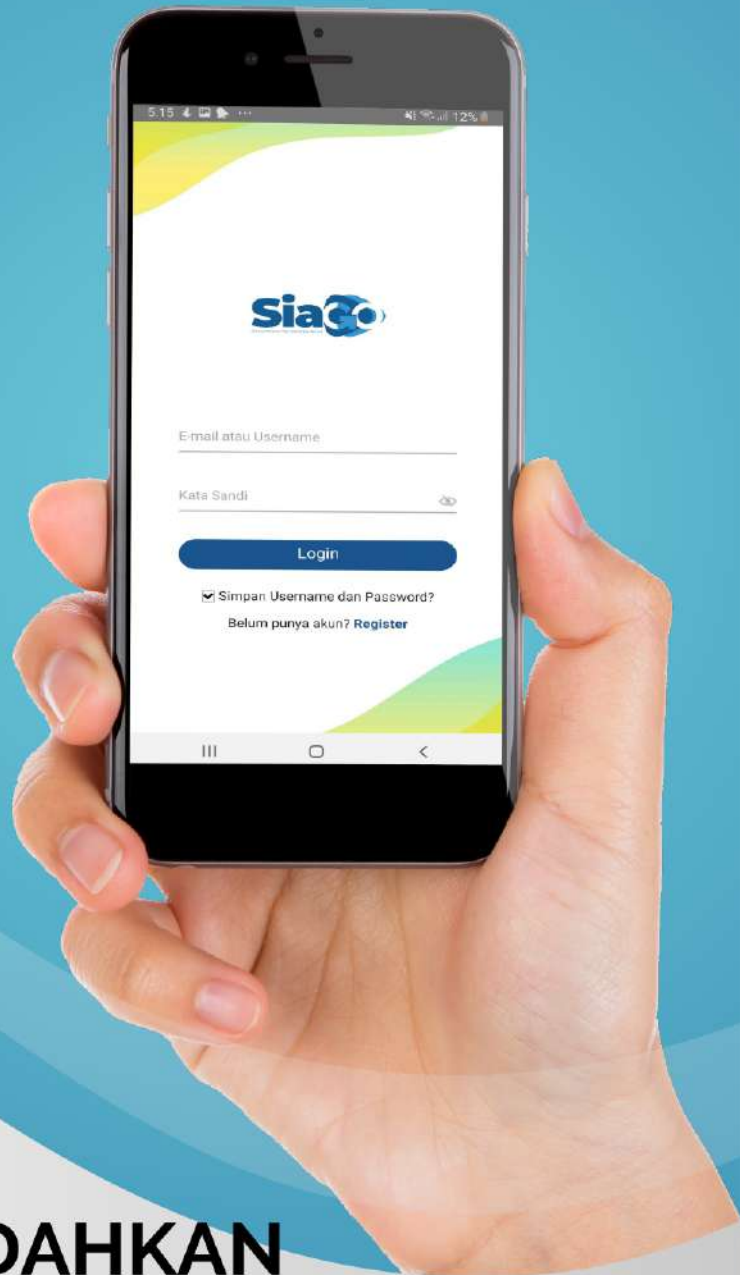


Solusi Kemudahan Transaksi Online



SiaGO adalah platform pembayaran yang dibangun berdasarkan komitmen untuk memberikan solusi layanan pembayaran yang mudah bagi mitra kami

 www.siago.id



MEMUDAHKAN PEMBAYARAN & PEMBELIAN



Customer Service

021 82760392
0812-1120-4801





berpengaruh terhadap kurva dimana kasus konfirmasi Corona mengalami peningkatan.

Penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 semakin meningkat jika pemerintah melonggarkan PSBB. Hal ini dilihat dari semakin banyak warga yang bergerak melakukan kegiatan ekonomi, semakin banyak pula warga yang terpapar Covid-19.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, Indonesia sedang merangkak dan menuju puncak kurva gelombang I Covid-19. Dan saat ini, Covid-19 telah merambah ke semua provinsi dan 493 (96 persen) dari 514 kabupaten (416)/kota (98).

Kini, kasus baru harian dan jumlah kematian harian masih mengalami peningkatan. Tambahan kasus baru setiap hari selalu lebih banyak dari jumlah pasien yang dinyatakan sembuh. Akibatnya, kasus aktif terus naik. Di saat yang sama fasilitas dan alat kesehatan yang terbatas serta tenaga kesehatan yang kian banyak meninggal dunia dan kelelahan mengancam kenaikan angka kematian. Sehingga sekalipun kasus aktif sudah menurun dan telah mencapai puncak kurva seperti di Iran, tak ada jaminan Covid-19 di Indonesia sudah terkendali.

Ketika indikator dasar Covid-19 belum stabil atau membaik sedangkan

PSBB tidak bisa terus-menerus diperpanjang, maka jalan tengahnya adalah menggencarkan testing-tracing-isolating yang mengidap virus dan yang bebas virus sampai tersedia vaksin. Namun sejauh ini testing di Indonesia sangat sedikit. Selain itu harus menerapkan kewajiban menggunakan masker wajah di ruang publik, menjaga jarak.

“Ingat, setiap langkah harus berdasarkan landasan ilmiah serta data yang akurat. Vaksin belum tersedia, dan tak dapat dipastikan kapan tersedianya,” jelas Faisal.

Faisal juga menilai Perppu 1/2020 bukan merupakan payung untuk mengatasi keadaan darurat pandemi corona virus dengan cara-cara luar biasa, serta bukan juga untuk memperkuat otoritas Gugus Tugas sehingga menyebabkan koordinasi penanganan lemah, pengelolaan data parah dan tidak menggunakan standar WHO, serta di saat yang sama kurang berbasis *scientific* dan data akurat.

“Belum ada Perppu khusus menangani Covid, yang ada Perppu menangani APBN dan sektor keuangan,” kata Faisal, sambil mengatakan bahwa virus ini sangat bahaya sekali sehingga butuh panglima perang yang harus *full time* dan bukan kerja sambilan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Tito Karnavian mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan pandemi terluas dalam sejarah umat manusia yang menyebar di 216 negara. Covid-19 ini juga pandemi terluas dalam sejarah Indonesia, yang tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya.

Apabila mau menggunakan paradigma perang dalam menghadapi Covid-19, lanjut mantan Kapolri dan mantan Kepala BNPT itu, maka semua pihak harus serempak bergerak, yang salah satunya dengan menggunakan strategi militer Tiongkok yang berasal dari Sun Tzu dan sudah terkenal di berbagai belahan dunia.

“Virus corona kuat di dalam paru-paru, jantung hingga pembuluh darah. Sehingga penularannya sangat cepat. Karena penularannya di sistem pernafasan. Sistem yang paling aktif dengan dunia luar. Kita bisa puasa, tapi tidak bisa kita bernafas tahan satu jam,” ungkap Tito.

Tito berpendapat hingga saat ini masih sangat minim penjelasan kepada masyarakat terkait dengan penularan virus corona. Dia menegaskan tak hanya melalui droplet, pada saat orang berbicara melalui aerosol pun virus Covid-19 bisa masuk ke tubuh. Maka dari itu Tito mengatakan sejauh ini pemakaian masker cukup efektif menekan penularan virus corona jika digunakan dengan benar. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak warga yang tidak memakai masker dengan baik.

“Strategi kita yang paling utama yaitu, memakai masker. Tetapi tidak hanya memakai masker saja, memakai masker dengan benar. Ada yang memakai hidungnya terbuka, ketika ada razia dipakai, lalu dibuka. Tak cukup kampanye masker, tetapi memakai masker dengan benar,” ucap Tito.

• **Amir Fiqih**

SALAH SASARAN, SUBSIDI KUOTA MENYASAR KE ANGGOTA OMBUDSMAN



Penyaluran subsidi kuota oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah sasaran. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie salah satunya, ikut mendapat kuota 'nyasar'. Dia mengatakan dalam Twitter-nya, *"Saya bukan pelajar/guru/ dosen yg berhak mendapat Kuota Internet. Dini hari tadi jam 01:19 WIB masuk SMS notifikasi dari @Telkomsel bahwa Kuota Internet Pendidikan bantuan Kemendikbud telah aktif Mohon perhatian @bpkri @AchsarulQosasi," ungkapnya melalui akun Twitter @alivinlie21, Selasa (22/9).*

Mengomentari kejadian tersebut Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam pendataan. *"Kembali masalahnya ada pada 'data yg tdk akurat...'," tulisnya, menjawab mention dari Alvin Lie.*

Selain itu, Alvien juga meretweet

uitan salah seorang warganet yang khawatir bahwa penyaluran subsidi kuota banyak yang tak tepat sasaran. *"Wah bahaya nih, jangan-jangan kuota gratis nya banyak yang salah alamat," tulis akun @ImadHasan95.*

Dalam cuitannya, Alvin pun mengatakan, banyak orang tua siswa dan juga guru yang mengeluhkan belum mendapatkan bantuan kuota padahal sudah mendaftarkan diri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na'im memberikan keterangan bahwa bantuan kuota data internet akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen berupa kuota data internet dengan perincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar.

Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Sementara, Kuota Belajar adalah kuota yang

hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Sedangkan, untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. • **Maliq**



BERULAH, CHARLIE HEBDO KEMBALI TERBITKAN KARIKATUR NABI MUHAMMAD

Salah satu isyarat yang wajib ditunaikan warga Prancis adalah sikap yang beradab, menghormati satu sama lain, serta menghindari dialog yang bernarasikan kebencian. Demikianlah inti pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat mengunjungi Lebanon pada Rabu (2/9). Tampaknya, pernyataan Macron ini hanya pemanis bibir. Nyatanya, dia tak cukup berani menegur majalah mingguan *Charlie Hebdo* yang kerap melecehkan politikus, agama, dan realitas sosial di pelbagai belahan dunia melalui sampul halaman majalahnya.

Airin Miranda dalam artikel

Gambar Sampul Charlie Hebdo Sebagai Kritik Terhadap Fanatisme Beragama (2019:291) menyebutkan, dari 523 terbitan Charlie Hebdo—terhitung dari 2005 hingga 2015, tujuh persen di antaranya menimbulkan reaksi dan teror lantaran memprovokasi ajaran agama tertentu.

Miranda mencontohkan beberapa pelecehan majalah mingguan yang terbit tiap hari Rabu ini, di antaranya: Sampul majalah yang menggambarkan sosok pria berpakaian laiknya muslim sedang bersujud di samping sosok pria berdasi yang tangannya di atas pria bersujud, seakan pria berdasi itu memberikan restunya. Sosok pria

muslim tersebut mengucapkan “Sarko Akbar!”, sebuah pelesetan dari ucapan “*Allāhu Akbar*”, yakni kalimat takbir yang biasa diucapkan setiap muslim saat sholat. Sedangkan pria berdasi yang menggambarkan Nicolas Sarkozy, presiden Prancis saat itu, mengucapkan “*Ça c’est bon musulman laïc ...*” (Nah, itu baru muslim sekuler yang baik).

Lalu, sampul majalah edisi 1 Oktober 2014 yang berjudul “Si Mohamet revenait ...” (Jika Muhammad kembali). Sampul tersebut menggambarkan seorang pria bergamis putih, sorban di kepala, berjenggot, sedang tunduk dari ancaman pisau di lehernya oleh seorang yang berpakaian serba abu-abu

dengan tutup kepala dan muka berwarna hitam. Sosok pria bergamis putih tersebut berucap “*Je suis le prophète, abruti!*” (Akulah sang Rasul, tolol!), sedangkan pria yang menodongkan pisau berucap “*Ta guele, Infidèle!*” (Diam kau, Kafir!).

Ada lagi, sampul majalah edisi 19 September 2012 yang berjudul “iNTOUCHABLES 2” (Tak Tersentuh 2). Karikatur di dalamnya menggambarkan dua orang pria, yang satu bergamis putih duduk di atas kursi roda, sedang seorang lainnya berpakaian laiknya Yahudi yang mendorong kursi roda tersebut. Kedua orang tersebut mengucapkan “*Faut pas se moquer!*” (Jangan meledek!), seraya menghadap pembaca.

Diidentifikasi bahwa judul pada contoh terakhir, Charlie Hebdo meledek umat Islam dan Yahudi. “Intouchables” merupakan judul film yang mewakili Prancis dalam piala Oscar pada 2013 silam. Menceritakan persahabatan antara pria difabel keturunan Prancis dan pria Negro yang merawatnya. Menurut Miranda, sampul ini mengilustrasikan kedua kedudukan umat beragama ini yang sama-sama marginal.

Selain tiga contoh sampul di atas, sebenarnya Charlie Hebdo masih banyak menyajikan satire yang menghina umat Islam secara khusus dan umat beragama lain pada umumnya. Hal ini dibuktikan dari sampul majalahnya pada 6 Januari 2016, sebagaimana dikutip *antaranews.com*, Rabu (6/1/2012). Charlie Hebdo menggambarkan Tuhan berjenggot, berlumuran darah, dan menyampirkan senapan Kalashnikov di bahunya. Gambar tersebut oleh Vatikan telah dikecam dan dianggap sebagai penghinaan terhadap Katolik.

Memang, sejak awal majalah mingguan ini telah bersikukuh bahwa jalan yang mereka tempuh adalah perjuan-

gan untuk kebebasan. Dalam *republika.co.id*, Kamis, (10/9) yang lalu Laurent Sourisseau, Direktur Charlie Hebdo bahkan menegaskan “Karena jika kita tak berjuang dengan kebebasan, kita akan menjadi budak dan kita mempromosikan ideologi mematikan”.

Serangan Balasan

Entah beragama, berpolitik, atau berinteraksi sosial apa pun namanya, merupakan ekspresi dari paham yang dianut individu atau kelompok tertentu. Meski dalam satu identitas, terkadang pemahaman antar individu atau kelompok satu sama lain tak seragam. Penghinaan identitas tertentu lantaran perilaku sebagian orangnya, tentu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta menimbulkan kemarahan. Apalagi, yang dihina adalah sesuatu yang dilarang oleh paham identitas tersebut.

Penggambaran sosok nabi dalam ajaran agama Islam adalah hal yang tabu apa pun alasannya. Terlebih, jika penggambarannya adalah ejekan terhadap nabi. Satire untuk umat Islam yang

diterbitkan oleh Charlie Hebdo melalui karikatur Nabi Muhammad tentu saja dianggap melangkahi dan menginjak-injak harga diri umat Islam di penjuru dunia.

Seperti kata pepatah Jawa ‘*Ojo keminter mundak keblinger!, Ojo cidro mundak ciloko!*’ (Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah! Jangan berbuat curang agar tidak celaka), tampaknya Charlie Hebdo menuai hasil *keminter* dan *cidro*-nya. Terhadap serangkaian satire yang diterbitkan melalui karikatur sampul majalahnya, Charlie Hebdo telah terhitung dua kali mendapat serangan.

Serangan pertama terjadi pada 2 November 2011. Sebuah bom molotov meledakkan kantornya dan menghancurkan beberapa peralatan produksi majalah mingguan. Menurut Istiqomah dalam artikel *Pemaknaan CNN Indonesia.com Mengenai Gambar Kartun Nabi Muhammad di Sampul Majalah Charlie Hebdo Edisi 1178*, teror tersebut dilancarkan sebab terbitnya karikatur Nabi Muhammad yang bertuliskan “*Charia Hebdo*” (Hebdo Syariah). Charlie Hebdo





Aksi pengutukan terhadap terbitan Charlie Hebdo santer didengungkan aktivis Muslim di berbagai dunia.

dianggap telah mengolok konsep syaria dalam Islam (2018:49).

Sedangkan serangan kedua terjadi pada 7 Januari 2015. Juru Bicara Kepolisian Paris, Rocco Contento menyebutkan bahwa empat orang bersenjata telah memasuki kantor Charlie Hebdo dan menembak secara membabi buta. *Antaraneews.com*, Rabu (7/1/2015) menyebutkan bahwa insiden tersebut memakan korban 11 orang tewas dan 4 orang lainnya dengan cedera serius. Adapun penyebabnya – tak jauh berbeda dari serangan yang pertama – yakni dugaan penghinaan terhadap umat Islam.

Sejumlah Negara Mengecam

Kini, dalam rangka memperingati dimulainya persidangan para ter-

duga pembantu teror 7 Januari 2015 yang lalu, Charlie Hebdo kembali berulah. Mereka kembali mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad yang dulu sempat memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Seraya mengklaim perjuangan atas kebebasan berpendapat, mereka kembali menyulut kedengkian.

Tentu saja, terhadap perbuatan Charlie Hebdo yang seakan tak mengenal kata ‘kapok’ ini, banyak pihak yang bereaksi. Mulai dari agamawan, organisasi, hingga para pemimpin di pelbagai negara mulai mengutarakan kecamannya. Hingga berita ini ditulis, sekurangnya ada empat negara, yakni Indonesia, Iran, Turki dan Pakistan. Bahkan, keempat negara tersebut telah mengutarakan kecamannya sebagai sikap resmi negara. Sedangkan dari kalangan agamawan dan organisasi, terdapat Imam Besar Al-Azhar, Mesir

dan Komisi Hak Azasi Manusia Permanen Independen, Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Saat ditanyakan kepada otoritas tertinggi negaranya, Emmanuel Macron seakan tak berkutik. Dalam *antaranews.com*, Rabu (2/9) ia hanya berpendapat bahwa dirinya tak berkapasitas untuk menghakimi keputusan Charlie Hebdo tersebut, dalam pahamnya Prancis memiliki kebebasan berekspresi.

Akhirnya, pernyataan Presiden Macron yang mewajibkan rakyatnya untuk beradab, menghormati satu sama lain, serta tidak mendialogkan narasi kebencian perlu diperhatikan. Mengingat serangkaian perbuatan Charlie Hebdo dalam lintasan sejarah yang melukai pelbagai agama, realitas politik dan budaya, tentu pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Apakah Charlie Hebdo adalah wujud Prancis yang beradab?”. • **Nabil**

TERJUN BEBAS EKONOMI GLOBAL

Ekonomi global dapat menyusut hingga satu persen pada 2020 karena pandemi Virus Corona baru atau COVID-19, dan dapat berkontraksi lebih jauh jika pembatasan kegiatan ekonomi diperpanjang tanpa respons fiskal memadai. Hal itu disampaikan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) yang dilansir *Antara* pada Kamis (2/4).

Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko ekonomi yang meningkat. Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan, dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang pulau kecil, yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.

Badan penerbangan sipil PBB, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, menyambut baik komitmen para pemimpin ekonomi utama G20 akhir pekan lalu yang menunjukkan bahwa dukungan fiskal yang berani diperlukan untuk melindungi industri perjalanan global, untuk membantu pemulihan global dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, penurunan pendapatan terkait komoditas dan pembalikan aliran modal meningkatkan kemungkinan tekanan utang bagi banyak negara. Pemerintah mungkin terpaksa membatasi pengeluaran publik pada saat mereka perlu meningkatkan pengeluaran untuk menahan pandemi dan mendukung konsumsi dan investasi.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pandemi virus corona

merusak ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya. IMF kini memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5%, atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April. Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan pada Rabu (24/06), disebutkan dengan penurunan maka dunia bakal kehilangan output ekonomi senilai US\$12 triliun selama dua tahun.

China adalah satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% tahun ini, sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis, diperkirakan akan mengalami penyusutan lebih dari 10%, sebagaimana dilaporkan oleh wartawan BBC urusan ekonomi, Andrew Walker.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, sudah memperingatkan bahwa berbagai peristiwa telah mengugurkan perkiraan versi bulan April. Ditambahkan arah perekonomian global kini lebih buruk.

Ancaman PHK

Pembatasan yang sedang diterapkan di beberapa negara terkait pandemi Corona, telah membuat banyak pabrik beroperasi. Apple, Jaguar, Diageo, Land Rover hingga Volkswagen, merupakan segelintir pabrik besar yang saat ini sudah mulai membatasi produksinya. Sebagai contoh, Bloomberg Economics mencatat pabrik-pabrik besar yang ada di China hanya menggunakan 60-70 persen kapasitas produksi mereka, bahkan beberapa pabrik di negara yang terkena dampak paling parah, seperti Italia, dilaporkan terpaksa menghen-

tikan produksi mereka. Penurunan jumlah produksi inilah yang memicu PHK besar-besaran, dan gelombang pengangguran pun sulit dihindarkan. Kondisi ini dipastikan akan menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang seperti India, dan lainnya.

Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*). Pekerja dan dunia usaha menghadapi bencana, baik di negara maju maupun negara berkembang. Kita harus bergerak cepat, tegas dan bersama-sama. Tindakan yang tepat bisa membuat perbedaan antara bertahan hidup dan keruntuhan” kata Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam *press release* 7 April lalu.

Hilangnya jam kerja terbanyak diprediksi terjadi di negara-negara Arab, yakni sebesar 8,1% atau setara PHK terhadap 5 juta tenaga kerja, kemudian Eropa sebesar 7,8% sama dengan PHK 12 juta tenaga kerja, dan Asia Pasifik sebesar 7,2% atau sama dengan 125 juta tenaga kerja, menurut ILO.

Pasar Saham Terjun Bebas

Menurut Cedric Chehab, Kepala Risiko Negara dan Strategi Global di Fitch Solutions, ketakutan terkait dampak virus Corona secara global, akan menyebabkan para investor enggan mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Di sisi lain, ketakutan global pun akan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Sementara di sisi



lain, kekhawatiran atas penyebaran global dari Virus Corona telah mendorong para investor menawarkan harga obligasi ke titik terendah. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian arah ekonomi terkait dampak Covid-19 secara luas. Dampak ini diperkirakan akan terus terjadi hingga masa pandemi virus Corona benar-benar selesai.

Indeks Dow Jones Industrial Average Indeks (DJIA), yang menjadi salah satu indikator utama perdagangan saham di Amerika Serikat, pada bulan Februari masih berada di level tertinggi sepanjang tahun, yakni 29.551. Indeks kemudian mengalami penurunan signifikan hingga mencapai level terendah pada akhir Maret ke posisi 18.591. Pada minggu ketiga Mei, DJIA kembali naik ke posisi 24.206.

Indeks Nikkei yang menjadi indikator perdagangan saham di Jepang pada awal 2020 mencatat Indeks saham tertinggi di kisaran 24.083. Pada pertengahan Maret, saat wabah Covid-19 masih memuncak, indeks saham Nikkei terkoreksi hingga ke level terendah 16.552. Pada minggu ketiga Mei, indeks Nikkei sudah mulai naik ke kisaran level 20.595.

Bagaimana dengan bursa saham di Tiongkok? Negeri Tirai Bambu ini menjadi lokasi pertama penyebaran virus Covid-19. Saat ini, Tiongkok telah berhasil menurunkan penyebaran virus secara signifikan. Pada awal Januari 2020, yaitu pada saat wabah ini masih belum menyebar luas, indeks saham Shanghai tercatat di angka 3.116. Pada minggu keempat Maret, indeks Shanghai merosot ke posisi terendah tahun ini, yakni 2.660. Sejalan dengan wabah yang mereda, minggu ketiga Mei indeks saham Shanghai sudah ada pada level 2.899.

Selain itu, bursa saham di Eropa juga menunjukkan kondisi setali tiga

Pasar saham di dunia mengalami penurunan signifikan sebagai dampak atas penuluran Covid-19 yang terus meluas.

uang. Indeks bursa saham Inggris FTSE, salah satunya, pada bulan Januari 2020 sempat menyentuh level 7.675. FTSE mengalami koreksi dalam hingga pada akhir Maret, berada pada posisi di bawah level 5.000. Namun, pada minggu ketiga Mei, FTSE sudah beranjak ke kisaran 6.002.

Industri Travel dan Wisata Menurun

Industri pariwisata juga terkena dampak signifikan dari adanya Covid-19. Penyebaran virus yang terus meningkat di berbagai negara menyebabkan orang semakin takut untuk bepergian. Beberapa negara seperti Amerika Serikat bahkan memberlakukan travel ban untuk memperlambat penyebaran virus corona. Presiden Trump sempat memberlakukan travel ban selama 30 hari untuk Eropa. Perjalanan ke Eropa pun banyak yang dibatalkan. Maskapai penerbangan menelan kerugian cukup besar dan pemesanan tiket pesawat menurun hingga 50%.

Jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan internasional yaitu 1 milyar jiwa pada tahun 2010 dan 1,4 milyar pada tahun 2018. Menurut WHO, angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Akan tetapi, semenjak virus corona menyentuh skala global, angka ini menurun. Asosiasi Industri Penerbangan Internasional (IATA) bahkan sudah mengumumkan bahwa kerugian in-

dustri penerbangan akibat virus corona bisa menginjak angka U\$113 miliar.

Resesi Global

ADB telah memprediksikan kerugian berkisar antara 77 miliar Dolar AS hingga 347 miliar Dolar AS. Salah satu penyebab kerugian ini adalah berhentinya aktivitas perdagangan, pariwisata, manufaktur, dan transportasi di Tiongkok. Setelah beberapa negara lain mengalami krisis yang sama, kemerosotan ekonomi semakin parah. Salah satunya Italia.

Harga minyak mentah Brent jatuh hingga 30 persen ke harga 21,14 Dolar AS per barel atau setara dengan Rp 306 ribu per barrel. Angka ini merupakan yang terparah sejak dimulainya Perang Teluk pada 1991. Minyak ikut merosot lantaran Saudi Arabia tiba-tiba saja menaikkan jumlah produksi harian untuk melawan kompetitor. Padahal, dalam kondisi wabah, kebijakan tersebut meningkatkan kekhawatiran atas perlambatan ekonomi global. Negara di Jazirah Arab ini pun tak cukup menambah kapasitas produksi, tetapi meningkatkan pengamanannya.

Australia juga ikut terjun bebas dengan penurunan hingga 7,3 persen pada pasar sekuritasnya. Kondisi tersebut menjadi yang terparah semenjak krisis ekonomi global tahun 2008. *"Saya pikir semua perkiraan sudah tak sesuai lagi. Ini seperti ada perlombaan ke bawah untuk menyelamatkan ketertiban,"* ucap Jonathan Barrat, Chief Investment Officer di Probis Securities Sydney. • Ika

CHINA DAN AS ABSEN, 156 NEGARA BUAT SKEMA VAKSIN GLOBAL



Sebanyak 156 negara bergabung dalam skema global distribusi vaksin COVID-19 yang adil, menurut sebuah aliansi yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin, (20/9) tanpa keikutsertaan China dan Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengamankan pasokan vaksin COVID-19 masa depan melalui kontrak bilateral, menuai tuduhan sikap egois yang merugikan negara-negara miskin.

China juga tidak tercantum dalam daftar 64 negara kaya yang tergabung dalam rencana yang disebut COVAX untuk menyalurkan 2 miliar dosis

vaksin di seluruh dunia pada akhir 2021. Nantinya, para tenaga medis dan orang-orang yang rentan menjadi prioritas dalam penyaluran tersebut.

Namun pejabat aliansi mengatakan dialog dilanjutkan bersama Beijing.

Skema itu akan mencakup sekitar dua pertiga dari populasi dunia, menurut WHO dan aliansi vaksin GAVI, yang merilis daftar penandatanganan setelah batas waktu pendaftaran ditutup pada Jumat.

Puluhan vaksin sedang dalam proses pengujian virus corona, yang secara global telah menginfeksi sekitar 31 juta orang dan menelan hampir 1 juta korban jiwa, seperlima di antaranya tercatat di AS.

“COVAX akan memberi dunia portofolio calon vaksin terbesar dan paling beragam,” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat konferensi virtual.

“Ini bukan amal, ini demi kepentingan terbaik seluruh negara. Kami tenggelam bersama atau berenang bersama ... Ini bukanlah hak untuk melakukan sesuatu, ini hal yang cerdas untuk dilakukan.”

Dengan sejumlah negara kaya yang enggan terhadap COVAX, rencana tersebut

telah menyoroti tantangan dalam menyalurkan vaksin secara merata di seluruh dunia.

Aliansi vaksin mengatakan mereka berharap 38 negara kaya lainnya akan bergabung dengan gagasan tersebut.

Mereka mengaku telah menerima komitmen sebesar 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp20,6 triliun) untuk pengembangan dan penelitian vaksin, namun membutuhkan dana tambahan 700 - 800 juta dolar AS (sekitar Rp10,3 - 11,8 triliun) segera.

Lebih dari 150 calon vaksin COVID-19 di seluruh dunia sedang dikembangkan dan diujicobakan, dengan 38 di antaranya dalam tahap uji klinis manusia. • **Hafit zulka**

WATAK OLIGARKI MILENIAL MAS NADIEM

Fachry Ali, pengamat sosial dan politik dalam beranda media sosialnya menulis kritik cukup tajam terhadap Mendikbud Nadiem Makarim. Kritik itu tertulis sebagai berikut “ketika keluar dari istana, sehabis dipanggil presiden terpilih, akhir 2019, calon menteri pendidikan yang masih muda belia itu berkata kepada wartawan: ‘Saya tidak tahu masa lalu. Tapi saya tahu masa depan.’ Lalu ia pulang naik ojek”. Pernyataan tersebut dilontarkannya untuk merespons keputusan Muhammadiyah dan NU yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP).

Sebelumnya, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim pada diskusi publik yang digelar *Pustaka Pedia* (7/7), menyampaikan komentarnya, Nadiem Makarim sesungguhnya tidak mengerti problem pendidikan. Menurutnya, Kemdikbud belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Konsep merdeka belajar pun implementasinya tidak maksimal. Saya sendiri mengikuti diskusi sejak awal hingga akhir.

Di samping itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Najih Prastiyo dalam opininya di salah satu kanal online, (Kamis, 23/7) menulis cukup keras. Di bagian akhir esai itu tokoh aktivis muda tersebut mengatakan “tiket Nadiem sebagai inovator digital teknologi dalam dunia bisnis nyatanya juga belum dapat terwujud dalam melakukan invasi digital dalam dunia pendidikan”.

Sejak terpilihnya pada Oktober 2019, hingga hari ini telah banyak kalangan yang ragu dengan kinerja mantan CEO Gojek tersebut. Benar saja, sudah hampir satu tahun masa

kerja, Mendikbud dapat dinilai belum menyentuh akar persoalan pendidikan. Sebaliknya, berbagai kebijakannya kerap mengundang kontroversi.

Salah satu masalah yang baru-baru ini menarik keprihatinan publik adalah terkait POP. Mulanya, program ini bertujuan mendukung komitmen Kemdikbud untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan mendemonstrasikan *Instructional Leadership* lewat ribuan sekolah penggerak yang diseleksi. Namun, sesungguhnya konsep itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah digagas

Najeela Shihab, dengan nama “Semua Guru, Semua Murid”.

Dalam tahap pelaksanaan, Nadiem rupanya salah kelola. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan korporasi bukan layaknya pendekatan sebuah lembaga pendidikan. Hemat penulis, pendekatan yang demikian ini semacam *butterfly effect* dari orientasi Nadiem yang terlalu menekankan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Pada kasus POP, Muhammadiyah menilai Mendikbud tidak bisa membedakan kategori lembaga *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan Organisasi

Kemasyarakatan (Ormas). Penulis berpendapat dengan pandangan Muhammadiyah bahwa seharusnya CSR yang memberikan dana bantuan kepada negara dan organisasi lain di bidang pendidikan. Bukan sebaliknya, lembaga CSR yang mendapat saluran anggaran dari pemerintah.

Atas kebobrokan itu, sesuai surat pemberitahuan hasil evaluasi POP nomor 2314/B.B2/GT/2020 Kemendikbud mengumumkan dua lembaga CSR yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar sebagai penerima anggaran negara kategori Gajah (paling besar) dengan





Ode Rizki Prabtama

Pegiat di The Center of Research in Education for Social Tranformation (CREASION)

jumlah dua puluh milyar rupiah per tahun. Ini anggaran yang tidak kecil, tentu saja. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Muhammadiyah mundur dari program tersebut meski telah dinyatakan lolos. Muhammadiyah berkomitmen, tanpa program tersebut ormas yang didirikan K.H Ahmad Dahlan sebelum Indonesia merdeka itu akan terus membantu negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa lewat tiga puluh ribu satuan pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di penjuru negeri.

Di sisi lain, pada kasus yang sama Ormas NU pun menyatakan mundur. Menurut Arifin Junaidi, ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, POP sejak awal sudah janggal. Sebab NU diminta mengirim proposal hanya dua hari sebelum pendaftaran ditutup. Ini tentu saja, Nadiem seolah memperlihatkan kepada publik bahwa sesungguhnya ia tidak bisa mengelola lembaga negara dengan baik. Minimal, komunikasinya dengan ormas yang telah meyelenggarakan pendidikan puluhan tahun lamanya sangat tidak baik. Tak berhenti di NU, kemudian organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga angkat kaki.

Kiranya statementnya yang mengatakan “saya tidak mengerti sejarah, namun saya mengerti masa depan” seperti dikutip pada paragraf pertama memiliki arti buruk. Alih-alih mengerti masa depan, hari ini saja Mas Menteri tidak mengerti keadaannya. Hemat saya, bahwa saran Fachry Ali supaya Mas Menteri belajar sejarah adalah benar, mendesak. Tentu bangsa ini tidak menginginkan pemimpin yang ahistoris.

Simbol Oligarki Milenial

Persoalan yang lain adalah formasi pejabat Kemdikbud itu sendiri. Publik perlu bertanya, mengapa sampai hari ini Wamendikbud belum diangkat? Padahal sangat banyak tanggung jawab yang nyatannya tidak bisa diurus oleh Nadiem seorang.

Di samping itu, terjadi perampangan (pindah-copot) di jajaran direktur dan staf. Misalnya, staf ahli hanya diang-

kat satu orang, biasanya kementerian ini merekrut staf ahli tiga sampai lima orang, bahkan lebih. Di satu sisi, Nadiem malah mengangkat staf khusus yang belakangan dikumpulkan menjadi tim merdeka belajar.

Jelas bahwa Mas Menteri tidak memilih orang cerdas namun memilih orang yang mau disuruh untuk mengekskusi ide-ide dan kepentingan yang sudah dikonsep oleh korporasi. Dibuktikan ketika dilantikannya Iwan Syahrir, dari Universitas Sampoerna sebagai Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI memiliki implikasi cukup kuat atas keterlibatan Lembaga CSR Sampoerna sebagai salah satu penerima anggaran POP. Pun kedekatan konglomerat, Tanoto Sukanto pemilik Tanoto Foundation sekaligus penguasa lahan ibu kota baru juga patut dipertanyakan.

Padahal, kalau mau *inline* dengan visi presiden dalam percepatan akses pendidikan, lebih-lebih di masa pandemi, maka yang harus secara serius didorong Nadiem adalah kerjasama dengan Kemkominfo dan Kemendes membangun infrastruktur untuk meretas keterbatasan akses teknologi informasi di pelosok negeri. Di samping pekerjaan instrumentalis itu, yang juga paling penting adalah bagaimana Mendikbud mendesain paradigma pendidikan Indonesia yang fundamental, tidak parsial dan instrumental belaka.

Wajar ketika belakangan dikabarakan Mas Menteri mengaku *stress* mengurus pendidikan Indonesia. Sebab, beliau tinggal di Singapura dengan pengalaman mengelola perusahaan, tidak di Indonesia dengan pemahaman atas kompleksitas kebudayaan yang plural. Saya berani jamin, lebih sering Mas Menteri berkunjung ke Negeri Singa itu daripada ke Pelosok Maluku atau Tanah Rencong, Aceh misalnya.

Sebagaimana oligarki bekerja, dengan segala retorika yang muncul, konsep dan keuntungan hanya lahir dan kembali kepada segelintir orang saja. Ini adalah perseelingkuhan antara pebisnis dan birokrasi. Hemat penulis, inilah sulitnya mantan bos perusahaan diangkat menjadi birokrat pembuat kebijakan pendidikan. •

JAKSA PINANGKI, AKTOR FIGURAN YANG DIKORBANKAN?

Tertangkapnya buron kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra atau yang akrab disebut Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020 di Malaysia, awalnya merupakan kabar gembira bagi penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, pemerintah dianggap sudah menunjukkan ketegasan dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, cikal bakal penangkapan Djoko Tjandra merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Idham Azis. Dari hasil tersebut, banyak pihak yang mengapresiasi kinerja pemerintah melalui Polri.

Namun, ibarat pepatah “belum beranak sudah ditimang,” tampaknya terlalu dini untuk menyimpulkan penegakan hukum di Indonesia sudah berangsur membaik. Faktanya, di balik penangkapan Djoko Tjandra diketahui masih banyak oknum penegak hukum yang diduga menjadi “karpet merah” bagi kebebasan koruptor di negeri ini. Mereka yang seharusnya berperan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, malah berkhianat.

Diklasifikasikan menurut profesinya, ada tiga jenis penegak hukum yang oknumnya diduga membantu Djoko Tjandra meloloskan diri, yakni: polisi, advokat, dan jaksa. Pada jajaran kepolisian, terdapat Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Prasetyo diduga telah memfasilitasi Djoko Tjandra dalam membuat surat bebas Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan. Sedangkan Napoleon, diduga terlibat dalam penghapusan *red notice* saat Djoko Tjandra masih buron.

Pada jajaran advokat, Anita Kolopaking yang merupakan pengacara Djoko Tjandra, diduga turut serta dalam membuat surat bebas Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan kliennya yang digunakan untuk mondar-mandir dari satu kota dan negara ke kota dan negara lainnya. Selain itu, perempuan kelahiran Makassar, 28 September 1963 ini pun diduga membantu kliennya yang berstatus buron un-

tuk meloloskan diri.

Sedangkan pada jajaran kejaksaan, jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga telah menerima suap dari Djoko Tjandra sebesar USD 500 ribu atau senilai dengan Rp7 milyar. Penerimaan itu ditujukan agar Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung tersebut memuluskan jalannya pengajuan peninjauan kembali (PK) pada vonis perkara korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra pada 2009.

Pinangki Bukan Aktor Utama

Pinangki adalah wujud mafia peradilan berbentuk makelar kasus (markus) yang patut dijadikan permisalan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Pasalnya, dibandingkan dua kalangan penegak hukum yang oknumnya turut menjadi tersangka, Pinangki menjadi satu-satunya aktor yang jabatannya tak memiliki kewenangan untuk meloloskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum. Namun, *aneh bin ajaib* Pinangki seakan *powerfull* dalam perkara ini.

Kontribusi Pinangki dalam membebaskan Djoko Tjandra dari jerat hukum adalah dengan cara menawarkan sejumlah nama di Mahkamah Agung (MA). Beberapa nama tersebut dicatut guna menunjukkan betapa Pinangki memiliki relasi yang kuat dalam mempengaruhi pembentukan fatwa di MA. Fatwa MA kendati hanya merupakan pendapat hukum, namun praktiknya, fatwa MA memungkinkan untuk menjadi doktrin yang dijadikan rujukan pada suatu persoalan yang terjadi.

Tak heran, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana pada diskusi publik bertajuk *Menyoal Integritas, Profesionalitas, dan Independensi Kejaksaan Agung dalam Menangani Perkara Korupsi Djoko S Tjandra dan Pinangki*





Nabil Nizam

Pemerhati Kajian Hukum, tinggal di Malang

Sirna Malasari, yang diunggah melalui video di akun *Facebook* “Sahabat ICW” pada Selasa (8/9) menyatakan, pengusutan pihak yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra, tak cukup berhenti pada Pinangki semata. Kepercayaan diri Pinangki, adalah bukti bahwa masih ada pihak dari MA sendiri yang patut dicurigai.

Meski Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menyatakan bahwa Pinangki adalah aktor utama dalam kasus ini. Namun, tampaknya hal tersebut tidaklah tepat karena fakta tercatatnya Pinangki melakukan serangkaian penerbangan Indonesia-Malaysia secara bolak-balik tanpa izin pimpinannya dan sikap arogan saat diperiksa oleh penyidik, adalah buktinya.

Sebelum dididuk pada Rabu (12/8), Pinangki tercatat mulai dari tahun 2017 hingga 2019 telah 27 kali melakukan perjalanan ke luar negeri, namun hanya tiga kali mengantongi izin. Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, sepanjang November 2019 hingga Januari 2020, Pinangki sudah bolak-balik Indonesia – Malaysia untuk mengurus keperluan Djoko Tjandra.

Sikap arogan Pinangki sudah ditunjukkan sejak pertama kali akan dilakukan pemeriksaan pada 27 Agustus 2020 lalu. Pinangki menolak untuk diperiksa, lantaran ia memiliki jam besuk dari anaknya. Akibatnya, pemeriksaan tersebut dijadwal ulang pada 2 September 2020. Namun demikian, kendati akhirnya pemeriksaan dapat dilakukan, Pinangki masih seakan menunjukkan sikap yang arogan, yakni membatasi pemeriksaannya hanya sampai pukul 17.00 WIB.

Petrus Selestinus, seperti dikutip *TribunJateng.com* (Minggu, 6/9), menyebutkan bahwa arogansi Pinangki menjadi tanda adanya kekuatan besar dari kalangan Kejaksaan Agung yang siap melindunginya. Dia diduga memiliki “senjata” yang dapat digunakan ketika merasakan adanya bahaya yang mengancam.

Selain dijerat Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kini Pinangki juga dijerat oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Empat tempat yang dijadikan sasaran pemeriksaan pencucian uang haram Pinangki, adalah dua unit apartemen di Jakarta Selatan, satu unit apartemen di Sentul, dan lokasi dealer mobil BMW SUV X5 miliknya.

Ketamakan sebagai Musuh Utama

Jika merujuk pada usia jabatan jaksa yang sudah 15 tahun, sebenarnya gaji Pinangki – disertai beberapa tunjangan – tergolong rendah, dibanding gaya hidupnya yang mewah. Harta kekayaannya yang sebesar Rp6,8 milyar tidak masuk akal ditimbun jika dalam sebulan gajinya hanya Rp13 Juta. Terlebih banyak perilaku Pinangki yang dianggap boros, seperti operasi wajah di New York, Amerika Serikat, makan malam mewah di restoran berbintang tiga Michelin di New York, penggunaan perhiasan berlian, dan lain sebagainya.

Bagi sebagian kalangan masyarakat dengan kondisi finansial yang menengah ke bawah, tentu status pekerjaan PNS – dengan segala gaji dan tunjangan – lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan sandang, pangan, dan papan. Namun demikian, sifat tamak amat memungkinkan untuk menutup mata hati siapapun, tak terkecuali aparat penegak hukum.

Akhirnya, terjeratnya Pinangki dalam skandal Djoko Tjandra, tentu memberikan luka begitu mendalam bagi siapapun yang cinta tanah air. Pinangki laksana ‘pagar makan tanaman,’ jabatan yang disandang sebagai pengacara negara, berbalik menjadi pengacara koruptor. Pinangki hanyalah aktor figuran yang *apes* dijadikan tumbal bagi kesuksesan panggung mafia peradilan di negeri ini. Entah nantinya terungkap atau tidak, aktor utama masih menunggu waktu yang tepat untuk menampilkan aksinya. •

BASIS PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keragaman budaya, suku, dan agama. Keragaman merupakan kekayaan dan modal sosial, politik, dan spiritual yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan yang memajukan bangsa dan negara. Sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola dengan seksama, kemajemukan bisa menjadi sumber perpecahan dan memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan.

Secara umum, umat beragama di Indonesia hidup berdampingan secara damai. Umat beragama bahkan dapat saling bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, bahkan keagamaan. Hidup rukun dan damai adalah budaya yang mendarah daging bangsa Indonesia. Di berbagai forum internasional, Indonesia adalah *champion* dalam kerukunan intern dan antar umat beragama.

Akan tetapi, dalam satu dekade terakhir, ada gejala meningkatnya tiga bentuk intoleransi: ekonomi, budaya, dan agama. Indonesia mengalami masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial akibat perilaku ekonomi yang eksploitatif dan kapitalis. Terdapat sekelompok kecil elite ekonomi yang menguasai sebagian besar aset ekonomi. Penguasaan akses informasi, media, dan jaringan kekuasaan juga menimbulkan terjadinya intoleransi budaya di mana kelompok tertentu—yang cenderung sekuler—dapat mengaru-

sutamakan paham dan nilai budaya tertentu.

Yang mendapat sorotan tajam adalah intoleransi keagamaan. Secara umum, konflik dan kekerasan fisik antar dan intern umat relatif rendah, meskipun ada kecenderungan meningkat. Yang menunjukkan gejala peningkatan signifikan adalah kekerasan spiritual dalam bentuk ujaran kebencian, penyesatan

paham keagamaan, dan penghinaan terhadap tokoh dan simbol-simbol keagamaan. Yang juga meningkat adalah kekerasan politik bernuansa agama seperti kesulitan pendirian tempat ibadah, hambatan pelaksanaan ibadah, penyediaan lahan pemakaman, pembatasan perkawinan, dll.

Kekerasan keagamaan adalah fenomena global. Akar masalahnya sangat kompleks mulai dari masalah identitas, kesejahteraan, politik, dan teologi. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah adanya beberapa temuan penelitian bahwa intoleransi keagamaan di Indonesia

sebagian disebabkan oleh faktor pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian PPIM (2018) menunjukkan muatan kurikulum PAI, paham Islamisme guru, materi keagamaan di internet, dan kinerja pemerintah berkontribusi terhadap sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid.

Tulisan ini menawarkan model PAI yang Pluralistik—se-



VECTORSTOCK.COM



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

**Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

lanjutnya disebut PAI Pluralistis sebagai sebuah pembaruan sistem PAI yang diharapkan dapat membentuk murid yang berjiwa pluralis, yakni: memahami ajaran dan nilai-nilai Agama secara mendalam, taat beribadah, berakhlak mulia, dan bersikap toleran, serta menghormati, menerima, mengakomodasi, dan bekerja sama dengan pemeluk Agama dan keyakinan yang berbeda. Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi aktor dan pelopor dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku, dan Agama berdasarkan atas nilai-nilai pluralitas dalam Agama Islam.

Basis nilai-nilai pluralitas dalam Islam terdiri atas nilai ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerja sama. Nilai ketuhanan mengandung pengertian bahwa sesuai fitrahnya, manusia adalah makhluk beragama. Manusia sudah berikrar sejak dalam alam arwah bahwa mereka akan menyembah Allah. Manusia lahir ke dunia sebagai seorang Muslim. Meskipun banyak kritik dari para ilmuwan dan kaum Ateis, mayoritas manusia percaya kepada Tuhan dan menjadikannya sebagai landasan moral untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sesuai nilai kebebasan, beragama adalah sukarela.

Tidak ada paksaan dalam agama dan beragama. Dengan segala konsekuensinya, manusia memiliki kebebasan menentukan pilihan apakah mereka menjadi pemeluk Agama yang teguh atau tidak beragama sekalipun. Konsekuensi dari nilai kebebasan adalah adanya pluralitas agama dan keberagaman sebagai kehendak Tuhan (Sunnatullah). Plu-

ralitas adalah ujian Tuhan dan tantangan bagi umat Islam untuk menjadi yang terbaik, berkompetisi yang fair (fastabiqul khairat), dan tidak memusuhi kelompok lain. Manusia adalah umat yang satu dan setiap Muslim adalah saudara.

Karena itu setiap manusia hendaknya hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, tidak boleh saling mencela dan menyakiti sesama manusia dan kelompok lainnya, apa pun agamanya. Demikianlah nilai-nilai kebersamaan yang menjadi kerangka manusia untuk saling bekerja sama, tolong menolong, gotong royong untuk dan atas dasar kebaikan dan takwa.

“KEKERASAN KEAGAMAAN ADALAH FENOMENA GLOBAL. AKAR MASALAHNYA SANGAT KOMPLEKS MULAI DARI MASALAH IDENTITAS, KESEJAHTERAAN, POLITIK, DAN TEOLOGI. HAL YANG SAMA JUGA TERJADI DI INDONESIA.”

Untuk mengembangkan model PAI Pluralistis diperlukan empat arah pembaruan. *Pertama*, pembaruan kebijakan ke arah PAI yang lebih inklusif. Sesuai peraturan, ruang lingkup pendidikan agama terbatas pada enam Agama “resmi”: Is-

lam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu serta aliran kepercayaan. Pendidikan Agama dapat dilaksanakan apabila dengan beberapa ketentuan: (1) dalam satu kelas terdapat murid seagama, minimal 15 (lima belas) orang; (2) apabila dalam satu kelas murid yang seagama kurang dari 15 (lima belas) maka dapat digabung dengan murid seagama dengan kelas lain dalam satu satuan pendidikan. Apabila dalam satu satuan pendidikan terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) murid yang seagama maka pendidikan agama dapat dilaksanakan dengan kelas tersendiri; (3) apabila ketentuan (1) dan (2) tidak terpenuhi, maka pendidikan agama dilaksanakan di luar satuan pendidikan dengan kerja sama lembaga keagamaan di wilayah setempat. Ketentuan

ini menimbulkan dua masalah; (1) eksklusi pemeluk Agama di luar Agama resmi dan aliran kepercayaan; (2) hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan agama bagi pemeluk Agama resmi dan aliran kepercayaan yang tidak memenuhi ketentuan jumlah minimal yang dipersyaratkan. Peraturan ini perlu diubah ke arah yang lebih inklusif, sehingga setiap pemeluk Agama, apa pun Agamanya dan berapa pun jumlahnya dapat memperoleh pendidikan Agama yang sesuai dengan Agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

Kedua, pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih *mindful*, *meaningful*, dan *joyful*. Pendekatan yang *mindful* mengandung dua pengertian dan implikasi: (1) memahami, menerima, dan mengakomodasi murid yang memiliki manhaj dan mazhab keislaman yang berbeda-beda; (2) mendorong pembelajaran yang dialogis-kritis di mana guru memfasilitasi dan memandu murid untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, memahami ikhtilaf dari asal: dalil, metode, dan hasil ijtihad serta mengembangkan pemikiran kritis (*critical thinking*) yang memungkinkan mereka menentukan pilihan paham keagamaan secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pendekatan yang *meaningful* ditandai oleh pembelajaran yang aktual dan kontekstual di mana murid menemukan makna dari pembelajaran yang menjawab pertanyaan, memenuhi kebutuhan, dan memberi bekal dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Pendekatan yang *mindful* dan

meaningful dapat terlaksana dengan baik apabila metode dan suasana pembelajaran menyenangkan (*joyful*).

Selama ini pembelajaran PAI masih terlalu *teacher-centered*, *top-down*, dan doktriner sehingga murid cenderung belajar dengan orientasi *surface* (sebatas mengerjakan tugas) dan *achievement* (berkompetisi mendapatkan skor tinggi) sesuai kehendak guru. Selain tidak menemukan makna, orientasi *surface* dan *achievement* juga bisa menimbulkan penyeragaman paham agama karena murid akan men-

cari jalan “aman” dengan mengikuti kehendak dan keagamaan guru. Perlu pembaruan pembelajaran PAI ke arah yang lebih *children-centered* di mana murid memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, dan berdialog dengan murid yang lain.

Orientasi belajar bukan sebatas melaksanakan tugas dan menjadi juara

kelas, tetapi belajar mendalam (*deep learning*): mendalami dan menciptakan ilmu dengan motivasi intrinsik yang kuat, memanfaatkan informasi dan sumber-sumber belajar yang terbentang luas di satuan pendidikan, masyarakat, dan internet. Karena masih *teacher-centered* maka PAIKEM atau PAIKEM GEMBROT dalam pembelajaran PAI belum mampu menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan (*fun/joyful*), bermakna, dan terbuka karena murid diliputi rasa ketakutan, kekhawatiran, dan tekanan guru.

Ketiga, pembaruan kurikulum. Banyak pihak menilai muatan PAI terlalu berat, tumpangtindih, banyak redun-

“PENDEKATAN YANG MEANINGFUL DITANDAI OLEH PEMBELAJARAN YANG AKTUAL DAN KONTEKSTUAL DI MANA MURID MENEMUKAN MAKNA DARI PEMBELAJARAN YANG MENJAWAB PERTANYAAN, MEMENUHI KEBUTUHAN, DAN MEMBERI BEKAL DALAM KEHIDUPAN SEKARANG DAN MASA DEPAN.”

dancy, terlalu dominan aspek ritual ibadah mahdlah, muamalah, dan akhlak personal. Muatan toleransi dan kehidupan keummatan dan kebangsaan sangat minim. Sejalan dengan konsep growth mind, kurikulum PAI Pluralistis memuat materi yang esensial: muatan pokok yang terkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Tidak semua hal harus diajarkan di satuan pendidikan. Dengan materi yang esensial, murid berkesempatan mengembangkan dan menerapkan pengetahuan serta menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Pelajaran tentang bagaimana melaksanakan (kaifiat) shalat tidak perlu diajarkan di satuan pendidikan, tetapi cukup dipelajari di dalam keluarga atau lembaga pendidikan agama tradisional seperti masjid, mushalla, dsb. Yang diajarkan di satuan pendidikan adalah dalil-dalil naqli dan aqli tentang

kedudukan shalat, waktu-waktu shalat, hikmah, dan makna shalat dalam meraih ketenangan hidup, kebahagiaan, dan kehidupan serta transformasi shalat dalam kehidupan kebangsaan yang bebas dari kemungkaran dan kerusakan. Dengan cara demikian, pluralitas keberagamaan tetap mendapatkan tempat dan muatan tidak terlalu padat. PAI Pluralistis meniscayakan eksplorasi materi dari internet, integrasi ilmu pengetahuan, dan kreativitas menciptakan konten dengan beragam media digital.

Keempat, pembaruan sistem penilaian. Selama ini praktik pendidikan, termasuk PAI, terlalu sarat dengan ulangan (examination ridden). Belajar identik dengan mengerjakan

tes dari LKS dengan model objektif: pilihan ganda atau isian dengan satu jawaban tunggal. Model tes ini dapat menimbulkan penyeragaman paham agama. Ruang pluralitas terbatas bahkan mungkin tertutup karena tidak ada kesempatan bagi murid mengemukakan pendapat atau menuangkan pengalaman keagamaan.

Evaluasi perlu lebih diarahkan pada aspek sikap dan perilaku, bukan menguji pengetahuan semata (evaluation of learning). Murid didorong untuk melakukan refleksi diri sebagai suatu bentuk belajar metakognisi atau

refleksi pengamalan dan perwujudan Agama dalam kehidupan (teaching from religion). Ujian nasional pendidikan Agama Islam sudah seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan tujuan pendidikan agama dan tidak kondusif dalam konteks PAI Pluralistis.

Yang tidak kalah penting adalah pembaruan pembinaan dan pendidikan guru PAI. Meskipun bukan segala-galanya, guru merupakan central figure yang menentukan keberhasilan pendidikan. PAI Pluralistis meniscayakan guru yang pluralis: berwawasan luas, bersikap terbuka, dan perilaku yang inklusif sebagai salah satu kompetensi sosial guru agama. Inilah yang menjadi tantangan, tugas, dan tanggung jawab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) sebagai produsen guru dan guru PAI. Mampukah FITK mewujudkannya? Waktulah yang akan membuktikannya. •

**) Tulisan ini merupakan ringkasan eksekutif Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam, Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed.*

“SELAMA INI PRAKTIK PENDIDIKAN, TERMASUK PAI, TERLALU SARAT DENGAN ULANGAN (EXAMINATION RIDDEN). BELAJAR IDENTIK DENGAN MENERJAKAN TES DARI LKS DENGAN MODEL OBJEKTIF: PILIHAN GANDA ATAU ISIAN DENGAN SATU JAWABAN TUNGGAL.”

BAHASA DAN PERLAKUAN PADA BINATANG



Achmad Santoso

Editor bahasa Jawa Pos

Pada sebuah diskusi April 2016, Budi Darma mengatakan bahwa hal ihwal binatang telah lama melekat dalam keseharian manusia. Binatang, lanjut sastrawan yang juga guru besar Universitas Negeri Surabaya itu, kerap kali dijadikan manusia sebagai simbol tertentu dalam laku kehidupan. Kala itu, Budi Darma menjadi narasumber dalam bedah novel *O* karya Eka Kurniawan yang diselenggarakan oleh *Jawa Pos*. Sebuah novel yang berkisah tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan kaisar dangdut.



Jauh sekali sebelum novel *O*, George Orwell telah menjadikan binatang sebagai tokoh utama dalam fabel *Animal Farm* (1945) yang legendaris itu. Binatang, tampaknya, memang merupakan personifikasi paling pas bagi manusia minimal karena dua hal: dekat secara fisik dan mirip secara sifat. Tapi, lantaran dua hal itulah, selain mendapat "penghormatan", binatang juga bisa diperlakukan secara semena-mena.

Penghormatan

Salah satu cara menempatkan binatang dalam posisi "terhormat" yang dilakukan bangsa kita adalah menjadikannya sebagai representasi. Mulai lambang kota sampai julukan klub sepak bola. Surabaya menjadikan *suro* (ikan) dan *boyo* (buaya) sebagai ikon kotanya. Sidoarjo yang dijuluki Kota Udang juga memasang logo hewan tambak di berbagai momumennya.

Sepak bola malah lebih seragam. Sebagian besar klub di tanah air menjadikan hewan-hewan sebagai julukan. Mulai dari yang buas seperti Bajul Ijo (buaya) untuk Persebaya Surabaya, Singo Edan (singa) bagi Arema FC, Maung Bandung (harimau) milik Persib Bandung, Macan Kemayoran (harimau) yang melekat pada Persija Jakarta, Laskar Sappe Kerab (sapi) untuk Madura United, sampai yang jinak sebagaimana Ayam Kinantan julukan PSMS Medan, Juku Eja (ikan) buat PSM Makassar, hingga Pesut Etam (ikan)-nya Borneo FC.

Pemberian label dengan nama-nama hewan itu tentu sudah melewati sejarah yang panjang. Madura United, misalnya, dijuluki

demikian karena terkait dengan budaya karapan sapi yang telah lama menjadi aktivitas yang dijalani secara turun-temurun oleh warga Kota Garam tersebut. Pesut merupakan mamalia langka yang ada di Sungai Mahakam, Samarinda.

Di sisi lain, mengamati sifat hewan buas seperti buaya, singa, dan macan sedikit banyak juga bertujuan agar sang lawan sudah "kalah sebelum bertanding". Sebab, mereka akan siap mencabik-cabik siapa pun "mangsanya". Kita bayangkan, misalnya, ketika membaca narasi berita berikut: *Singo Edan menerkam Ayam Kinantan lima gol tanpa balas!* Pilihan kata "menerkam" itu terasa presisi karena yang menerkam adalah "singa", sang raja hutan pemakan daging.

Nenek moyang kita zaman dulu juga menghormati makhluk Tuhan ini sedemikian rupa. Bentuk penghormatan itu bahkan mereka aplikasikan langsung dengan menyematkan nama binatang sebagai nama seseorang. Pada masa Majapahit, contohnya, kita kenal nama-nama seperti Lembu Peteng, Lembu Anabrang, Bango Sampar, Kebo Kicak, dan sebagainya.

Penghinaan

Namun, dalam kondisi tertentu, binatang juga ditempatkan di posisi yang berbalik 180 derajat, pada situasi tidak menguntungkan. Bahkan tidak jarang menjadi bulan-bulanan atas perlambang suatu keburukan. Kambing hitam, misalnya. Istilah itu bermakna *orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan*. Apakah kambing yang berwarna hitam merupakan representasi dari orang apes?

Serigala berbulu domba terdiri atas dua binatang yang berbeda watak, yang malangnya sama-sama nista. Serigala dipersonifikasi sebagai manusia yang kejam, jahat, dan curang. Sedangkan domba mengacu pada orang yang bodoh dan penurut. Maka, jadilah peribahasa itu dimaknai *orang yang kelihatannya bodoh dan penurut, tetapi sebenarnya kejam, jahat, dan curang. Gupak pulute, ora mangan nang Kane*, kata



peribahasa Jawa.

Kita juga menampatkan hewan tikus pada posisi yang "berlumur dosa" lantaran diidentikkan dengan koruptor. Meskipun di sisi lain kita juga memakai "tetikus" di dunia komputer dalam pengertian yang lebih baik. Tikus, sudah lama kita ketahui, adalah representasi dari koruptor. Apakah benar tikus, mengutip Fariz Alniezar (2017), melulu merupakan lambang ketamakan?

Padaahal, binatang, tikus sekalipun, tidak mengenal istilah rakus. Tidak ada ceritanya hewan menimbun makanan secara berlebihan. Prinsip mereka: makan untuk hari ini, urusan besok cari lagi.

Istilah embat-mengembat tidak hanya diidentikkan dengan tikus. Codot, jenis kelelawar pemakan buah-buahan, oleh orang zaman dulu juga dimitoskan sebagai pencuri. Kasihan sekali hewan-hewan yang terpaksa didegradasikan untuk perilaku manusia itu. Fariz Alniezar menamai fenomena tersebut sebagai fabelisasi dan binatangisme.

Kucing *garong* dan buaya darat setali tiga uang. Dua binatang itu telah dihina dina untuk menggambarkan lelaki hidung belang, lelaki yang suka bermain-main dengan perempuan. Kucing *garong* bahkan dilegitimasi menjadi sebuah judul lagu koplo. Demikian pula buaya darat yang menjadi judul lagu pop: *Lelaki Buaya Darat*. Garangan atau musang bernasib tak jauh berbeda. Karena sering memangsa ayam, musang dengan gampang diibaratkan sebagai laki-laki yang suka menggoda perempuan.

Bahkan, kini muncul fenomena bahasa kekerasan di dunia kuliner. Manusia "memperlakukan" binatang secara "kejam". Contohnya, ayam (di)-penyet, ayam (di)-geprek, ayam (di)gebrak, dan ayam (di)gepuk.

Tersebab dekat dan bahkan menjadi teman keseharian manusia, binatang memang bisa dengan mudah diperlakukan apa saja. Bisa di posisi terhormat, tapi tak jarang pula di tempat yang paling berlumur dosa. Mungkinkah hewan-hewan itu, seandainya kita tahu, juga akan menjadikan manusia sebagai perumpamaan di dunia mereka? •

ASAL MUASAL BAHASA

Sejak dilahirkan, manusia membawa potensi linguistik berupa kelengkapan alat berbahasa. Berpikir adalah berbahasa. Jadi permasalahan bahasa sangatlah kompleks. Bukan hanya tentang realita yang direpresentasikan melalui bunyi, tetapi juga melampaui batas-batas bahasa yang berkembang dalam diri secara spontan. Tanpa usaha sadar dan instruksi formal, lalu bagaimana bahasa terbentuk? Bagaimana sejarahnya?

Kunci Membuka Jendela Dunia

Bahasa adalah hal yang penting dalam kehidupan. Melalui bahasa manusia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang sempurna. Bahasa juga sebagai alat komunikasi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya bahasa merupakan sistem kode suara yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan yang lain. Pandangan lain bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya.

Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Integrasi antara manusia dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Perkembangan suatu bahasa didasarkan pada sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Sistem tersebut mencakup makna yang dapat dipahami, kesepakatan yang bersifat arbitrari, terbatas namun produktif. Setiap bahasa memiliki keunikan tersendiri yang

tidak sama dengan bahasa lainnya, serta memiliki kaidah yang universal.

Sejarah Bahasa secara garis besar ada dua versi, yakni berdasarkan teori evolusi (Barat) dan teori Agama. Teori Barat sangat dipengaruhi oleh Teori Darwin. Menurut teori Darwin, evolusi kera menjadi manusia, juga mempengaruhi bahasa, dari evolusi itulah muncul bahasa. Pikiran manusia berevolusi sehingga bisa mendefinisikan sesuatu lalu

berkomunikasi sampai pada akhirnya muncul banyak bahasa sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Bahasa erat kaitannya dengan Simbol. Di jaman purba, manusia berkomunikasi dengan tanda, misalnya relief, asap dan sebagainya. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh saja. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit.

Menurut teori ini, bahasa diperkirakan muncul 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, manusia hanya berkomunikasi sebatasnya yaitu melalui mulut dan gesture tubuh, kemudian otak kita

berevolusi sehingga otak manusia bisa memahami hal lebih kompleks. Mulai benda, makanan, kegiatan hingga situasi bahaya menjadi suatu teori-teori simpel yang diteorikan menurut sumber suara tersebut.

Kemudian setelah itu, manusia mulai bisa memikirkan dua benda dalam satu konstruksi. Seperti misalnya benda apel dan pohon, yang kemudian dijadikan sebagai satu kon-





struksi yaitu pohon apel. Kombinasi dari kata-kata tersebut kemudian berkembang menjadi struktur dan menjadi cikal-bakal dari bahasa.

Dalam agama Islam dikenal Adam dan Hava, dan dalam literatur agama lain disebut Adam dan Eve. Dalam Agama Islam yang dijelaskan pada surah Al-baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan Adam karena akan menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi. Kemudian pada Surah al- Baqarah ayat 31, Adam diajari nama-nama benda. Disinilah awal mula bahasa dalam manusia. Komunikasi antar manusai kemudian terjadi saat Allah menciptakan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa diturunkan di bumi yang lantas mempunyai banyak keturunan dan mulai menyebar ke berbagai pelosok bumi dan menciptakan berbagai macam bahasa.

Manusia dulu bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain guna mencari sumber makanan. Kemudian disetiap daerah tersebut membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa ditiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Secara Geografis, Indonesia merupakan Negara Kepulauan hal ini menyebabkan isolasi yang tinggi dan menjadikan Indonesia mempunya banyak ragam bahasa yang unik. Selain itu, faktr Lingkungan juga mempengaruhi intonasi, aksen dan bahasa.

Kemudian nenek moyang disatu tempat bertemu dengan nenek moyang ditempat lain menyebabkan adanya percampuran bahasa dan melahirkan bahasa baru yang disebut dengan *Super Language*. Misalnya *Broth* dan *Brood* menjadi *Bread*. Karenanya faktor jarak yang dekat atau jauh mempengaruhi kemiripan bahasa. Kelompok manusia yang dekat tempat tinggalnya dengan kelompok manusia lain cenderung memiliki bahasa yang mirip dan sebaliknya.

Seperti misalnya Negara yang berdekatan seringkali memiliki bahasa yang mirip karena saling berbaur.

Noam Chomsky, seorang professor linguisistik modern dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), memiliki pandangan bahwa bahasa itu dimiliki oleh anak manusia sejak dia lahir. Dalam teori perilaku tuturnya Noam Chomsky berusaha menunjukkan dan membuktikan keterlibatan potensi dalaman pada otak. Sebagai seorang mentalis ia berusaha menelaahnya lewat perilaku tutur antara penutur dan pendengar. Penutur dan pendengar haruslah mengetahui dan menguasai bahasanya dengan baik.

Menurut Noam Chomsky ada beberapa hal yang menjadi konsep dasar dalam perolehan bahasa seseorang. Pertama, proses-proses pemerolehan bahasa semua anak-anak bisa dikatakan sama. Kedua, Proses pemerolehan bahasa itu tidak berkaitan dengan I.Q. Ketiga, Proses pemerolehan bahasa tidak dipengaruhi oleh motivasi dan emosi anak-anak, dan Keempat, Tata bahasa yang dihasilkan oleh semua anak bisa dikatakan sama sebab ia bersumber dari LAD dan skema nurani.

LAD yang dimaksud oleh Noam Chomsky adalah *Language Acquisition Device*, yakni seperangkat “chips” yang ada pada diri manusia. Sehingga secara potensial manusia punya kemampuan untuk mempelajari dan berbahasa seluruh bahasa. LAD ini sebagai kemampuan internal yang telah didimilki manusia sejak lahir dan tinggal mau dikembangkan melalui proses pengajaran atau tidak.

Pendapat Noam Chomsky ini sesungguhnya mengamini versi Agama dimana telah dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat alat bahasa yang terdiri atas akal, pendengaran, penglihatan, mulut tenggorokan dan lain sebagainya. Meski begitu, asal muasal bahasa masih diperdebatkan dan diteliti hingga sekarang.

• Ika

MENYOAL FENOMENA HIJRAH DAN KOMODIFIKASI AGAMA

Belakangan ini sedang menjadi perhatian publik, artis menikah dengan prosesi *ta'aruf*, yang berarti meniadakan pacaran sebagaimana yang umum dilakukan anak-anak muda kekinian. Lalu, setelah menjalin pernikahan, mereka tak segan mengunggah ibadahinya seperti sholat dan mengaji di akun media sosial mereka, dengan maksud agar ditiriru oleh para pengikutnya (*followers*). Bahkan, yang lebih jauh lagi, tak sedikit pasangan muda artis tersebut yang mengabadikan prosesi *ta'aruf* hingga pernikahannya menjadi sebuah film atau lagu bernuansa islami, yang lalu menjadi *trending topic* di tengah masyarakat.

Namun, penting diketahui, ada satu tahap bagi kaum muda Muslim milenial tersebut sebelum menjalani proses *ta'aruf*, yaitu apa yang sekarang populer dengan istilah hijrah. Dalam pengertian yang sederhana, hijrah sekarang ini diteladankan kepada seorang artis atau sosok *influencer* tertentu yang berperilaku lebih islami dibanding sebelumnya dengan mengenakan jilbab bagi artis perempuan secara mendadak. Melalui akun-akun jejaring sosialnya, para selebritas hijrah tersebut kerap mengunggah berbagai model jilbab dan pakaian bermerek “islami”.

Maka secara tidak langsung, paradigma tentang jilbab sekarang ini tak bisa lagi dianggap kuno. Justru naik kelas menjadi *outfit* berharga mahal, trendi, sekaligus glamor akibat

diseminasi wacana hijrah yang tak terelakkan oleh sejumlah selebriti, ustadz medsos, dan para mikro selebriti –*influencer* yang memiliki lebih dari 5 ribu follower (Akmaliah, *The Rise of Cool Utstaz*, 2020). Bahkan, beberapa desainer pakaian muslim memamerkan karyanya di sejumlah ajang *fashion show* tingkat internasional. Tak hanya jilbab, belakangan banyak produk barang dan jasa dengan label islami, biasanya ditambahi juga dengan keterangan halal dan syariah. Kini, halal bahkan menjadi tren gaya hidup masyarakat muslim kontemporer.

Sangat bertolak belakang dengan masa Orde Baru (1966-1998), di mana agama hanya didapati di ritual-ritual keagamaan. Perempuan berjilbab dianggap kuno. Jilbab dipandang sebagai simbol penindasan, serta menjerat karir kaum Muslimah karena dianggap tidak mencerminkan kebebasan perempuan. Namun, dewasa ini, setuju atau tidak, kemunculan dan perkembangan sejumlah gerakan konservatisme Islam, turut mengubah persepsi tersebut.

Hal ini karena sejumlah kelompok bercirikan fundamentalis tak lagi mau diidentifikasi sebagai komunitas muslim yang kaku, konservatif, atau berpikiran tertutup (eksklusif). Sebaliknya, mereka mengidentifikasi diri sebagai gerakan moderat, yang ingin menghubungkan budaya populer dengan doktrin keislaman. Salah satu faktor yang melatarbelangi yaitu perkemban-

gan teknologi dan dunia industri yang semakin maju.

Ahmad Najib Burhani dalam karya terbarunya bertajuk *Heresy and Politics: How Indonesian Islam Deals with Extremism, Pluralism and Populism* (Suara Muhammadiyah, 2020) mengurai benang merah atas fenomena keagamaan ini. Dalam bukunya, Najib menyebut adanya perkembangan islamisasi dari 1990-an hingga 2020. Menurut Najib, diawal tahun 1990-2000 banyak fenomena yang mempengaruhi sehingga di masa ini, Islam mengalami kejumudan. Kemudian pada 1998-2010, ada fenomena yang berbeda dalam dinamika keislaman yang seringkali disebut dengan konservatisme. Kenyataan ini tampak dari banyaknya perda syariah yang dibuat oleh puluhan daerah dan sejumlah aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

Buku ini memotret dinamika dealektika perkembangan Islam yang dimulai tahun 2005-2020. Buku ini sebenarnya berisi kumpulan refleksi dari tulisan-tulisan pendek Najib yang dikirim ke berbagai media massa baik di Indonesia maupun luar negeri seperti, *Kompas*, *Today*, *The Jakarta Post*, *Firstpost*, dan *ISEAS Commentary*. Meski demikian, isu dalam buku ini tetap runut sesuai dengan minat Najib yakni tren fenomena keagamaan di masyarakat. Minat Najib pada fenomena yang termaktub dalam buku ini dapat dilihat dari beberapa kata kunci, misalnya politik identitas, islamisme, kon-

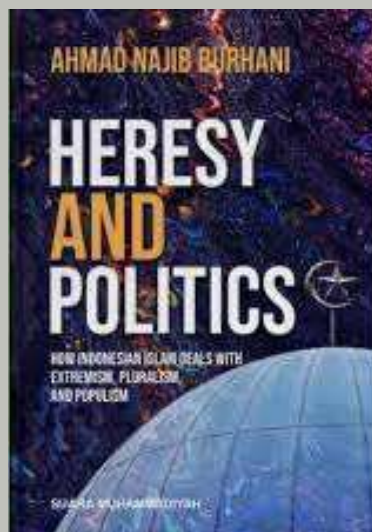
servatisme, pluralisme dan berbagai isu tentang kelompok minoritas.

Menurut Najib, pijakan awal melihat fenomena dan berbagai hal yang terkait dengannya adalah agama. Agama adalah benang merah bagi semua fenomena politik, sosial budaya di masyarakat. Karenanya, Najib menyebut *heresy* berarti *bid'ah*, yang selama ini diterjemahkan sebagai proses ibadah atau ritual keagamaan saja. Namun *heresy* dalam buku ini telah dielaborasi, sehingga agama dapat masuk dalam semua aspek kehidupan.

Konsep *heresy*, menurut Najib, merujuk pada hasil dari keterlibatan dalam empat tingkatan, yaitu: *Pertama*, pengadopsian narasi, istilah-istilah, dan jargon keagamaan dalam persaingan politik dan persaingan; *Kedua*, keterlibatan politik dalam “kampanye anti *bid'ah*” yang menyatakan mereka yang memiliki pandangan agama yang berbeda sebagai orang murtad atau sesat dan menyesatkan; *Ketiga*, modifikasi dan politisasi ritual keagamaan untuk keuntungan ekonomi dan politik; *Keempat*, kampanye negara khalifah, politik yang berorientasi pada syariah, dan penyebaran radikalisme dan terorisme keagamaan.

Menurutnya, fenomena ini dapat dilihat sebagai “*bid'ah baru*” yang hanya dapat ditemukan pada zaman modern ini sebagai hasil dari ikatan antara agama dan politik.

Di bagian awal isi buku ini, penulis menguraikan permasalahan mengenai politik identitas. Menurut Najib, politik identitas turut mewarnai kancah perpolitikan di Indonesia sehingga tak jarang simbol-simbol keagamaan menjadi alat jitu dalam melaksanakan strategi politik untuk meraih kekuasaan. Tak cukup dengan menggunakan simbol, fatwa Ulama juga ikut andil da-



Judul Buku :

Heresy and Politics: How Indonesian Islam Deals with Extremism, Pluralism and Populism

Penerbit :

Suara Muhammadiyah
Jml Halaman, Tahun :
Viii + 204 hal, Cetakan I, Juli 2020

Penulis :

Ahmad Najib Burhani

Peresensi :

Imro'atus Sholihah,
Staf di Laboratorium Hukum
Keluarga Islam, Fak. Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

lam memengaruhi masyarakat muslim di tanah air dalam menggunakan hak pilihnya di pemilihan daerah maupun presiden. Selain itu aksi-aksi keagamaan yang dikenal dengan istilah “Aksi Bela Islam dan Aksi Bela Tauhid” sebagai langkah praktis bagaimana politik identitas begitu massif dilancarkan. Di bagian berikutnya, Najib

membeberkan wacana keterlibatan ormas keagamaan Islam dalam politik praktis.

Selain itu penulis juga menjelaskan hubungan pengaruh tokoh keagamaan yang dijadikan pasangan politik dalam mengikuti konstelasi pemilihan. Tak lupa di bagian selanjutnya Penulis menguraikan serta mengkritik perkembangan gerakan radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Kemudian menjelaskan bagaimana hubungan Abu Jundal dan geneologi Islam radikal serta memahami sosiologi agama terorisme.

Kemudian di bagian akhir, Najib mendiskusikan Islam Indonesia antara ideology ritual dan sosial praktis. Penulis menjelaskan fenomena perkembangan hijab di Indonesia dari penindasan sampai ke gaya hidup atau menjadi trend fashion. Kemudian perkembangan antara ibadah ritual Islam dan realitas. Di sini penulis mempertanyakan cara keberagamaan muslim Indonesia yang lebih mementingkan ibadah *ilahi-yah* (kesalehan individu) daripada ibadah sosial (kesalehan sosial).

Najib menekankan bagaimana komodifikasi dan modifikasi agama mempunyai kepentingan beragama dalam sosial, ekonomi, politik dan bisnis, sehingga aktornya tidak hanya orang Islam, namun mereka yang berkecimpung di aspek tertentu, misalnya sinemator film Islam, desainer jilbab dan sebagainya. Dengan demikian, agama menjadi hikmah bagi segala persoalan masyarakat.

Karenanya, persoalan keagamaan yang dituangkan Najib dalam buku ini bersifat penuh tantangan sekaligus kesempatan. Karena itu, masyarakat harus bisa berdampingan dengan yang lain agar doktrin beragama senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. •

BELAJAR KETEKUNAN DARI AINI

“DALAM PERJALANAN MENUJU KEIKHLASAN, KITA AKAN MENEMUKAN HARAPAN, DALAM PERJALANAN LIKA-LIKU PENGORBANAN, KITA AKAN MENEMUKAN KEBERANIAN. NAMUN KE KEJUJURAN PADA DIRI SENDIRI, AKHIRNYA KITA AKAN PULANG”.

Guru Aini (2020) merupakan prekuel dari novel Andrea Hirata berjudul *Orang-Orang Biasa*. Sebelum membaca novel ini, memang sebaiknya membaca terlebih dahulu *Orang-Orang Biasa* (2019). Prekuel tersebut merupakan awalan dari cerita sebelumnya. Nuraini binti Syafrudin –biasa dipanggil Aini– adalah tokoh utama yang termuat dalam novel ini. Wataknya paling bebal dalam pelajaran Matematika.

Sejak SD, Aini mempunyai keunikan dengan selalu mencari alasan sakit perut ketika tiba waktunya pelajaran Matematika. Sebuah kebiasaan yang entah kenapa bisa diturunkan dari ibunya Aini yang bernama Dinah yang juga mempunyai kasus sama sewaktu masih sekolah. Namun demikian, cita-cita Aini sungguh tinggi ingin menjadi seorang dokter.

Keinginan itu muncul ketika ayahnya sakit keras dan memerlukan perawatan yang cukup panjang. Selama 7 bulan dirawat, Aini terus menjaga ayahnya. Hingga, Aini tidak naik kelas karena tidak pernah masuk sekolah selama itu. Di tengah menjaga ayahnya itulah, dia bertemu seorang tabib yang merawat ayahnya. Tabib tersebut mengatakan kepada dirinya bahwa penderitaan ayahnya harus ditangani seorang dokter dengan pengobatan modern.

Nah, sejak itu dia membenihkan diri ingin menjadi seorang dokter. Tetapi, keinginan itu tidaklah mudah karena menjadi dokter harus bisa Matematika. Jadi, dia harus bisa menaklukkan pela-

jaran hitung-hitungan tersebut supaya bisa kuliah di Fakultas Kedokteran. Maka tidak ada jalan lain, kecuali harus mempelajari dari Guru Desi, guru Matematika terbaik yang idealis di sekolahnya.

“Tanpa idealisme, Matematika akan menjadi lembah kematian bagi pendidikan,” kata Bu Desi. Bu Desi dikenal sebagai guru yang jenius, galak dan eksentrik.

Dengan tekad yang kuat, Aini memutuskan untuk pindah ke kelas yang diampu Bu Desi. Sayangnya, masuk ke kelas Bu Desi bukanlah perkara mudah. *Bu Desi tak serta merta menerimanya. Aini harus mengetahui seberapa kuat nyali Aini. Menurut Bu Desi, ada tiga cara mempersulit diri sendiri di sekolah itu: “Pertama, masuk ke kelasku. Kedua, belajar matematika. Ketiga, belajar matematika dariku.”*

Bu Desi berasal dari keluarga cukup mampu, seorang berkepala batu, lulusan terbaik, bercita-cita menjadi guru Matematika. Ia siap, meski harus ditempatkan di pelosok. Pada saat penempatan kerja, Desi sebetulnya mendapat keistimewaan untuk memilih lokasi penempatan kerja karena ia lulusan *cum laude* pertama dari sebuah perguruan tinggi. Namun Desi tetap ikut undian dan tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Ketika mengambil kocokan, ternyata Desi mendapatkan tulisan Baggansiapiapi.

Namun karena Salamah, sahabatnya sangat bersedih ditempatkan di Pulau Tanjung Hampar, akhirnya Aini merelakan diri bertukar tempat loka-

si penugasan ke daerah pelosok yang perjalanan ke lokasi harus ditempuhnya selama enam hari enam malam, dengan naik berbagai macam kendaraan, mulai dari bus, angkot, hingga perahu untuk tiba di tempat tujuan.

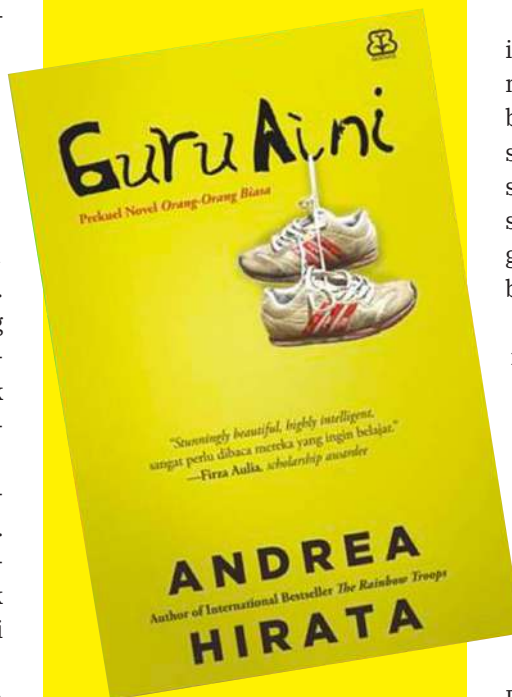
Sebetulnya, ibunya Desi menentang cita-cita anaknya tersebut. Dia ingin anaknya masuk Fakultas Kedokteran. Tetapi lain hal dengan ayahnya yang mendukung apa pun cita-cita putri kesayangannya tersebut. Meski dibujuk dengan cara apa pun, Desi tetap bersikukuh tidak mau.

Kembali ke Aini. Dengan berjalannya waktu, Bu Desi bisa menerima Aini. Namun kekebalan tetap menjadi musuh utama baginya, seperti punggung pengkor yang tak mau terbang dari tempurung kepala Aini.

Bu Desi berusaha mencari cara bagaimana Aini bisa memahami Matematika. Dia tak mau Aini menjadi bagian dari cerita kegagalannya mengajar. Juga, tak mau menjadi bagian dari kisah buram pembelajaran Matematika di dunia ini. Selain itu, karena Aini mempunyai tekad kuat yang berusaha tabah dengan kelakuan gurunya.

“Di tiang bendera mana kepalamu pernah terbentur sehingga kau telat mikir begini?” teriak Bu Desi kepada Aini ketika tak mampu menjawab soal Matematika. Bu Desi hampir menyerah sampai ia menemukan suatu cara terakhir.

Andrea Hirata memang sangat dikenal lincah dalam bermain kata-kata, menggabungkan cerita dan membuat inovasi dalam cerita. Dia juga ahli dalam menjabarkan suatu angka dengan uraian kalimat yang cukup panjang. Selain itu, Andrea juga mahir memancing haru biru juga gelak tawa dengan humor-humornya. Karakter Bu Desi yang kuat menjadi daya pikat



Judul:
Guru Aini

Penulis:
Andrea Hirata

Penerbit:
Bentang Pustaka

Bulan/Tahun Terbit:
Februari 2020

Jml Halaman:
xii + 336

Peresensi:
Amir Rifai
Pendidik dan Pegiat
Literasi Pendidikan

novel yang terbit di tahun ini.

Sekilas pada buku karangan Andrea ini terkesan biasa, namun cukup membuat orang penasaran. Pada bagian sampul, terdapat sepasang sepatu yang bukan seperti sepatu seorang guru, namun lebih kepada sepatu olahraga. Terdapat juga tiga garis berjajar yang pastinya kita bayangkan ke merek sepatu tersebut.

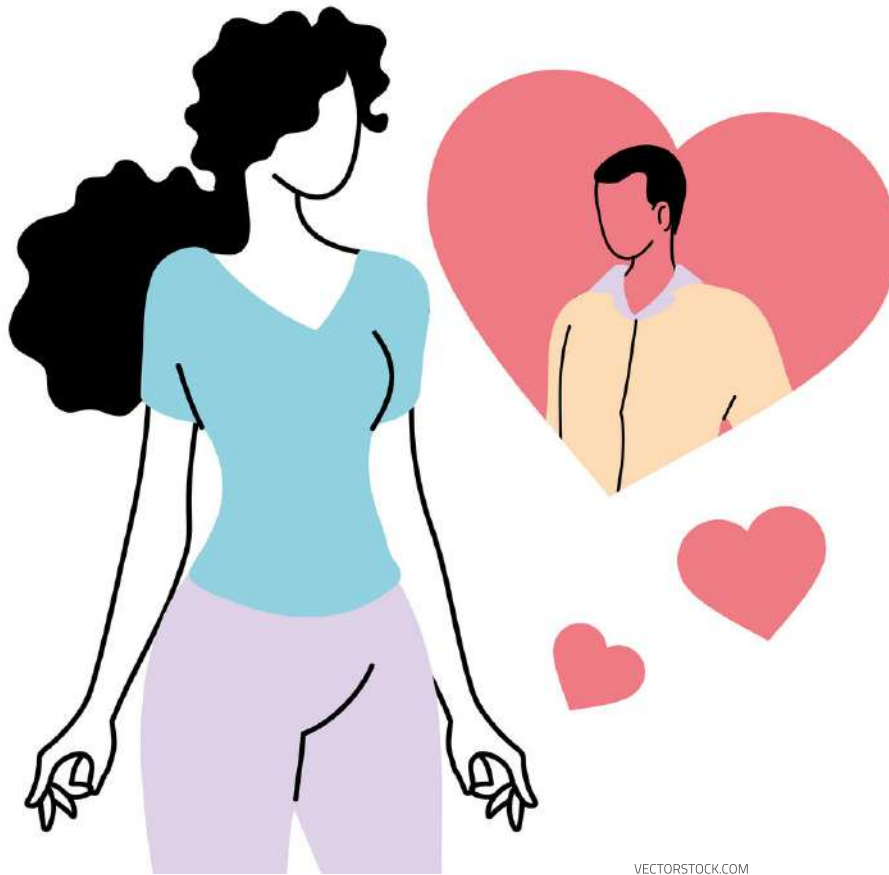
Dalam buku setebal 336 halaman ini, tak jarang Andrea menuliskan obrolan-obrolan khas Melayu, dibalut dengan komedi kala berbincang. Terkadang terasa seperti ironi tapi penuh kelucuan. Juga diselipi dengan sedikit sentilan kepada pemerintah.

Kemudian, pada bagian awal halaman buku ini, semua cerita ini Andrea Hirata dedikasikan untuk Bu Guru Marlis. Sosok yang menjadi inspirasi dalam membuat novel dan mempertegas tokoh pada cerita yang dia ciptakan.

Bagi saya, kata Andrea Hirata, ini merupakan novel pendidikan yang memotivasi kita bahwa keberhasilan akan penguasaan terhadap suatu ilmu tidak hanya diperoleh oleh orang yang mempunyai bakat tertentu saja, namun bagi mereka yang memiliki keinginan kuat akan bisa mendapatkannya.

Selain itu, tantangan dalam diri dan keluar dari zona nyaman adalah bentuk lain dari diri yang jarang dimiliki banyak orang, seperti yang digambarkan oleh Andrea dalam cerita guru Desi.

Akhirnya, bagaimana cara jitu Guru Desi mengajarkan Matematika kepada Aini? Mampukah Aini seperti pesan Guru Desi kepadanya di suatu hari? “Buatlah sesuatu, supaya aku tak dapat melupakan namamu!” dan Bisakah Aini masuk Fakultas Kedokteran? •



VECTORSTOCK.COM

Tersirat tak Terucap

Rosyidatul Hikmawati

Penikmat buku-buku sastra tinggal di Malang

Satu jam lagi dia sampai. Begitu yang dikatakannya lewat pesan. Aku bersiap menemuinya di serambi masjid seperti biasa. Ya, seperti biasa. Hujan dari pagi belum benar-benar reda, menyisakan gerimis mengurai sengatan panas matahari pada tengah hari ini. Sudah lima belas menit aku mematut diri di depan cermin, seraya berpikir tentang pertemuan kali ini. Akankah berjalan seperti biasa, mengulang kembali pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Meskipun begitu hati ini tetap merasa bahagia.

Dia, kakak kelas satu jurusan di kampus tempatku bela-

jar. Kami memiliki hobi yang sama, menikmati karya sastra baik itu novel, cerpen, ataupun yang lainnya. Kedekatan yang berawal di perpustakaan kampus saat aku mengambil novel Pramoedya Ananta Toer, *"Gadis Pantai"* berlanjut sampai sekarang. Saat itu menginjak awal tahun kedua aku kuliah, hingga kini menginjak tahun yang sama dari kelulusanku.

Aku menengok jam tangan, tiga puluh menit lagi dia sampai. Segera kusambar tas selempang butut kesayangan. Menuju masjid kampus yang berada di bagian paling depan. Perjalanan ke kampus memakan waktu lima belas menit.

Namun seperti biasa, aku yakin dia akan sampai sebelum waktu yang dikatakannya.

Kaki melangkah lebih cepat dari biasanya. Dan benar saja, aku melihatnya dari kejauhan, dia duduk di serambi masjid dengan memegang buku.

“Sudah lama?” tanyaku. “Sekitar setengah jam. Kok kurus?” Dia mengoreksi keadaanku. “Susah nyari uang buat makan.” Jawabku asal-asalan membuat dia tertawa yang terdengar merdu di telinga. Dia berdiri, beranjak berjalan ke samping kampus tempat kantin berada. Kami makan sambil sesekali membicarakan beberapa kabar teman yang kami kenal.

Selalu seperti ini semenjak merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya, dia akan mampir ke kota tempat kami belajar sebelum pulang ke kampung halamannya di Tulungagung. Pun demikian kami akan bertemu lagi sebelum dia kembali berangkat ke tempatnya belajar sekarang. Seakan ada perjanjian di antara kami. Padahal tak satupun tentang janji itu tersebut dari mulut. Bahkan sampai sekarang aku tak tahu apa yang ada di pikirannya mengenai pertemanan yang seperti ini.

Setelah makan kami berjalan ke gedung tempat kami dulu belajar, meneliti perkembangan yang terjadi. Biasanya untuk memperlama kebersamaan kami akan jalan ke mall terdekat dengan kampus, menonton film atau sekedar membeli minuman sembari duduk di tempat yang dari situ terlihat lalu lintas kota Malang.

Kali ini kita membicarakan “*Kitab Omong Kosong*” karya Seno Gumira Ajidarma yang memuat kisah Rama-Shinta, penerbitan ulang ceritanya yang dimuat di Majalah Tempo dan mendapatkan penghargaan *Kusala Sastra Khatulistiwa*. Dari perdebatan kecil kami aku tahu baginya cinta itu menyiksa. Tragisnya akhir nasib Shinta dan berubahnya sikap Rama karena rasa tersiksa seakan sebuah keniscayaan bagi dia. Beberapa kali aku katakan keadaan dalam tokoh ini akan berakhir bahagia jika semua diletakkan pada porsinya.

Entahlah, seakan kami menyentil pada hubungan ini, membicarakan keadaan diri sendiri. Aku yang menegaskan bahwa semua akan bahagia jika cinta diletakkan pada porsinya, dia yang meyakini tak ada yang bisa mengukur keadaan hati jika mencintai. Meskipun telah dibacanya bagaimana akhirnya Lawa dan Kusa bisa mengubah keadaan berikutnya, baginya tak sebanding dengan penderitaan dan korban yang diakibatkannya. Kita selalu berdebat ketika bertemu, beradu argumen mengenai karya orang lain seakan kami pelaku di dalamnya, atau bahkan penulisnya.

Kami diam beberapa saat setelah aku merasa tak ada yang perlu ditegaskan lagi untuk mengubah pandangannya. Meskipun demikian, kemudian terdengar tawa yang aku sendiri tak menyadari jika itu keluar dari mulutku, diikuti tawanya. Sepertinya aku menertawakan diri sendiri untuk menghibur hati, dan aku tak tahu tawanya untuk apa. Aku tak berani menanyakannya. Cukup membesarkan hati ini mendengarnya tertawa saat kami bersama, lagi-lagi itu membuatku bahagia.

Tiga hari kemudian dia mampir, menemuiku kembali sebelum menuju ke tempat studinya. Pertemuan ini tetap menyisakan bahagia bagiku, entah baginya. Yang aku tahu dia tetap tertawa, menepuk bahu sembari berkata, “*Kapan-kapan bertemu lagi ya.*” “*Baiklah, kita akan selalu bertemu lagi entah sampai kapan pertemuan ini akan terjadi.*” Kataku dalam hati. Namun, yang terjadi aku hanya tersenyum meng-iya-kannya.

Begitulah, kebahagiaanku cukup sederhana. Menikmati kebersamaan ini saat tiba waktunya, kemudian berlalu begitu saja hingga datang kebersamaan berikutnya, entah sampai kapan. Aku menekan rasa dalam diam, menikmati sendirian buncah di hati yang tercipta karena tawanya. Aku tak berani berharap lebih, toh tidak hanya aku yang ditemuinya ketika mampir di almamater kami.

Apakah ada rasa sakit di hatiku? Entahlah. Ketika dia pergi hatiku seakan dibawanya. Tapi bagaimana hatinya akan berada di sini jika dia tidak merasa meninggalkannya? Cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipilih begitu saja, bagiku. Keberadaan beberapa teman laki-laki di sekitarku tak ada yang mampu menggeser bayangannya. Bukan tidak pernah aku mencoba menepis, sedikit tak menghiraukan. Namun seakan menjadi perekat, karena ketika kembali teringat akan semakin lekat.

Seminggu kemudian dia mengirim pesan menanyakan aku sedang membaca apa. *Hahaha*. Aku tertawa sendiri. Membaca memang sedikit banyak mampu membunuh waktu dari merindunya, menyibukkan pikir ini dari mengingatnya sampai waktu bertemu kembali tiba. Tidak jarang aku berharap menjadi bayang di setiap langkahnya, tapi sering juga cemas bayanganku tidak membalut kebahagiaan hidupnya, atau malah bahkan menguraikan kebahagiaannya.

Kau boleh menertawakanku, kau boleh mencemoohku yang pada usia ini masih saja menyimpan rasa terpendam, menikmatinya dalam diam, menantikan kehadirannya entah sampai kapan. Bagiku cinta ini menyenangkan. •

BARU MELUNCUR, REDMI 9C SIAP DICOBA

Xiaomi baru saja meluncurkan ponsel dengan berat 196 gram di Indonesia dengan nama Redmi 9C. Ada beberapa kesan dari ponsel ini yaitu *Port* pengisian daya (yang juga berfungsi sebagai transfer data) yang terdapat di sisi bawah ponsel. Ia terletak bersamaan dengan mikrofon dan *speaker* yang terletak di sisi bawah bagian kanan. Ini cukup menguntungkan bagi para *gamer* untuk melakukan permainan dengan berorientasi pada lanskap karena cara menghindarinya tertutup dengan telapak tangan.

Sedangkan *port jack* audio 3,5mm ada di bagian atas. Karena *port* audio ini terlalu di pinggir, kemungkinan akan mengganggu tangan sebelah kiri ketika bermain *game* pada orientasi lanskap. Baik tombol volume maupun tombol daya keduanya ada di sisi sebelah kanan ponsel. Sedangkan di sisi sebelah kiri ada *tray* untuk penempatan kartu SIM dan kartu microSD.

Sebagai catatan, seluruh SIM 1, SIM 2, dan microSD masing-masing memiliki slot. Ini mungkin menguntungkan bagi sebagian orang yang menggunakan dua kartu sim dan ingin menambahkan kapasitas penyimpanan. Adapun bagian belakang Redmi 9C terbuat dari material plastik. Tetapi Xiaomi dapat menanggulangnya agar tidak terlalu terlihat seperti ponsel kelas bawah. Pasalnya, desain di bagian belakangnya terdapat garis-garis melengkung sehingga tidak terlalu polos.

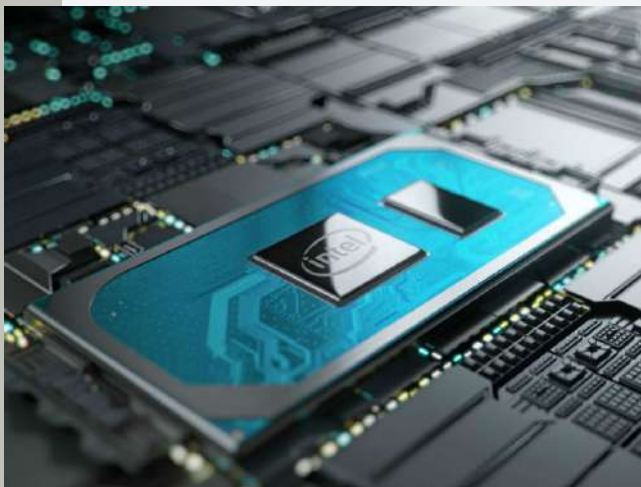
Adapun pada bagian sensor sidik jari ada di bagian belakang, dan mudah digapai menggunakan jari telunjuk. Kamera belakang Redmi 9C dilengkapi dengan tiga kamera, tetapi Xiaomi merancangya di dalam sebuah modul kotak yang seolah-olah terlihat empat kamera. Ini karena ketiga kamera itu digabungkan dengan lampu LED *flash* di dalam modul. Modul kamera belakang Redmi 9C tidak terlalu menonjol. Ini dikarenakan kamera belakang ponsel ini tidak ada yang menggunakan *focal length* yang panjang. Ketiga kamera tersebut mencakup kamera utama beresolusi 13 MP (f/2.2), kamera makro 2 MP (f/2.4), dan terakhir kamera *depth* sensor (f/2.4).



Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 5 MP (f/2.2) yang terletak di dalam *notch* tipe *dot drop* di atas layar. Layarnya sendiri memiliki ukuran 6,53 inci dengan resolusi 720 x 1.600 piksel. Resolusi layar ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi menurut saya konten yang ada pada layar tetap terlihat mulus tanpa pinggiran bergerigi. Ikon-ikon pada posnel juga cukup terlihat jelas.

Prosesor yang digunakan di dalam ponsel ini adalah MediaTek Helio G35. Sedangkan sistem operasinya menggunakan Android 10 dengan antarmuka MIUI 12. Redmi 9C dilengkapi dengan kapasitas baterai 5.000 mAh. Secara teori, kapasitas ini seharusnya menjanjikan daya tahan baterai yang sangat irit. Hasil ulasan lengkap Redmi 9C akan diketahui ketika bermain game, menonton film secara *online* dan durasi yang dibutuhkan ketika mengisi ulang baterai hingga penuh. • Amir

INTEL LUNCURKAN PROSESOR TIGER LAKE BERKEKUATAN IGPU XE SERIES



Akhirnya intel memiliki prosesor baru dengan potensi kinerja yang jauh lebih superior, Tiger Lake series Gen-11 dengan kekuatan Grafis baru Xe Series. Dibangun berdasarkan proses “SuperFin” 10nm terbaru, Intel Tiger Lake ditujukan untuk laptop tipis dan ringan karena menawarkan kinerja lebih tinggi plus tingkat efisiensi daya yang lebih baik. Produsen bahkan mengklaim seri tersebut bisa mengungguli AMD Ryzen 7 4800U.

Jumlahnya ada sembilan prosesor Tiger Lake yang siap dihadirkan bagi penggemar maupun konsumen secara luas, namun dikompilasi menjadi dua grup — lima di keluarga UP3 yang sebelumnya kita sudah mengenal melalui U series dan empat untuk keluarga UP4, sebelumnya adalah seri Y. Kedua set ini memiliki pengaturan TDP yang dapat dikonfigurasi OEM mulai dari 12-28W pada chip UP3 dan 7-15W pada UP4.

Ini akan menjadi pilihan terbaik berada pada Pundak Intel Core i7-1185G7, dimana

ini memiliki kkuatan 4 Core / 8-thread yang menampilkan grafis Iris Xe 1,35GHz dengan 96 EU dan cache L3 12MB. Clockspeed dasar sebesar 3GHz, dan memiliki max boost clock hingga 4,8Ghz dalam Turbo mode. Intel mengklaim CPU ini bisa memberikan “lebih dari satu lompatan generasi dalam kinerja” dalam tolok ukur awal dibandingkan dengan generasi chip seri U sebelumnya. Intel mengklaim Core i7-1185G7 dapat mengungguli Ryzen 7 4800U dengan selisih yang sehat di sebagian besar tolok ukur game, yang dapat Anda temukan di situs webnya. Ingatlah bahwa konfigurasi TDP OEM dan faktor-faktor lain akan sangat berpengaruh. Jadi ambillah kondisi pengujian ideal Intel dengan sebutir garam. Kami ingin menunggu tolok ukur kami sendiri untuk melihat bagaimana silikon baru mengukur pada level dan lapangan bermain praktis.

Tiger Lake

“(Tiger Lake memberikan) pembuatan konten hingga 2,7x lebih cepat, produktivitas kantor lebih dari 20% lebih cepat, dan lebih dari 2x lebih cepat bermain game plus streaming dalam alur kerja dunia nyata” Ungkap Intel.

Sekitar 150 desain berdasarkan prosesor Intel Core Generasi ke-11 diharapkan siap datang dari Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung, dan lainnya. Termasuk lebih dari 20 desain terverifikasi diharapkan tahun ini. Mereka mewakili system-on-chip (SoC) Intel yang paling ambisius, memberikan lebih dari lompatan generasi dalam kinerja dan pengalaman terbaik untuk laptop seri U dalam produktivitas, kreasi, permainan, hiburan dan kolaborasi. • **Amir**



Atiqah Hasiholan

TERGERAK BANTU PROMOSI UMKM

Aktris Atiqah Hasiholan merasa tergerak untuk membantu produk UMKM yang ikut terdampak akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19.

Apalagi setelah Pemprov DKI Jakarta kembali mengumumkan untuk menerapkan PSBB mulai 14 September 2020. Melalui akun *Instagram* pribadinya, Atiqah Hasiholan pun sukarela menawarkan jasa bagi pelaku UMKM untuk berpromosi.

"Hai, dengan keadaan PSBB lagi, hidup jadi tambah susah lagi. Enggak banyak yang bisa kubantu," tulis Atiqah Hasiholan dalam keterangan unggahannya, dikutip Senin (14/9).

Istri dari Rio Dewanto itu mengajak pelaku UMKM mengirimkan foto produk unggulannya dan nanti akan dipilih per harinya sebanyak 15 produk untuk diunggah melalui *Instagram story*.

"Kenapa 15? Kebanyakan nanti viewernya capek melihatnya," lanjut Atiqah Hasiholan.

Tak disangka apa yang dilakukan oleh Atiqah Hasiholan itu pun mendapat sambutan positif dari pelaku UMKM hingga membuatnya kewalahan.

"Kawan-kawan, ini yang DM ternyata ribuan. Harap sabar ya, sabar banget karena hanya 15 post per hari supaya efektif," tulis Atiqah Hasiholan. • **Putra Dinanti**

Ariel Noah

TANGGAPI GIRING NYAPRES 2024

Vokalis Ariel Noah kaget mendengar kabar Giring Ganesha yang mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia 2024. Apalagi, Hal tersebut menuai pro dan kontra.

Hal itu seperti ditanyakan Deddy Corbuzier kepada Ariel Noah dalam video di saluran *YouTube*-nya dengan judul "Ariel Noah, Serem Gue di Podcast Loe. Bahaya Bro!!", Deddy Corbuzier Podcast' yang tayang pada Kamis (10/9).

Dalam wawancaranya, Ariel Noah memberikan tanggapan yang begitu bijak. Dilontarkan pertanyaan mengenai Giring yang mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia 2024, mantan kekasih Sophia Latjuba itu nampak kebingungan dalam menjawab. Ia memilih tertawa dan sempat berpikir cukup lama untuk menjawabnya.

"Giring? (Sebagai calon presiden)," tanya Deddy. "Giring? Hmm," kata Ariel.

Melihat Ariel begitu berpikir saat dilontarkan pertanyaan tersebut, Deddy mengajaknya untuk membahas topik lain. Namun, Ariel pun buka suara dan memberikan tanggapan santainya. "Apa kita ngomongin yang lain aja bro?," kata Deddy.

"Giring, setiap orang punya kondisi ya. Apakah kondisinya mendukung untuk ini atau tidak mendukung. Itu orang harus lihat masing-masing," jawab Ariel.

"Tapi sebagai musisi lu harusnya



mendukung dong?," tanya Deddy. "Kalau gua sebagai musisi, akan sangat senang kalau semisal ada musisi yang mampu berpolitik dengan betul, dengan tujuan yang mulia lah begitu," papar Ariel.

Pertanyaan mengenai Giring yang mencalonkan diri jadi Presiden itu bermula dari Deddy yang menanyakan apakah Ariel tertarik untuk menjadi presiden. Lagi-lagi Ariel memberikan tanggapan bijaknya.

"Lu gak pengen nyalonin presiden?," tanya Deddy. "Gua mau ngapain gua jadi presiden? Kenapa pertanyaannya gak kayak sebagai musisi lu gak pengen bikin lagu yang bagus banget gitu," jawab Ariel. "Lah, untuk bangsa dan negara kan bisa aja lu nyalonin jadi presiden, kan gitu dong," kata Deddy.

"Untuk bangsa dan negara gua bisa bikin lagu yang bisa sih menghibur satu negara sih, sebagai musisi. Otak gua gak nyampe sana. Otak gua tuh cukupnya cuma mikirin lirik gimana, notasi musik gimana. Gua gak ngerti birokrasi soalnya," jelas Ariel. • **Obie**

Gong Yoo

THE SILENT SEA, SERIAL TERBARU GONG YOO

Aktor Korea, Gong Yoo akhirnya kembali bermain dalam sebuah drama Korea usai tiga tahun berhenti. Gong Yoo akan kembali bermain dalam serial bergenre *sci-fi thriller* berjudul *The Silent Sea*.

Film ini berlatar belakang di masa depan, di mana bumi telah mengalami proses berubah menjadi gurun. Tim khusus pun ditugaskan untuk menanamkan sampel misterius dari tempat penelitian yang ditinggalkan di bulan.

Berdasarkan keterangan resmi *Netflix* pada Kamis (10/9), Gong Yoo berperan sebagai Han Yun Jae, seorang pemimpin tim eksplorasi yang harus menjalani misi penting dengan informasi yang terbatas.

Yun Jae sangat mengutamakan keselamatan anggota timnya, walaupun hal ini membuat dirinya sendiri berada dalam situasi yang berbahaya.

Dalam serial ini, Gong Yoo akan beradu akting dengan Bae Doona yang aksinya selama ini dapat disaksikan lewat *Kingdom*, *Sense8* dan *Stranger 1 & 2*.

Bae Doona akan berperan sebagai Song Ji An, seorang ahli astrobiologi yang bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kecelakaan yang terjadi di pusat penelitian Balhae Base yang telah lama ditinggalkan di bulan.

Selain kedua nama di atas, ada juga Lee Joon yang berperan sebagai kepala teknisi Kapten Ryu Tae Seok yang pernah menjadi anggota elit Kementerian Pertahanan Nasional. Dia menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam misi berbahaya ini demi bisa bebas dari ketatnya kehidupan di Kementerian.

The Silent Sea awalnya merupakan sebuah film pendek dengan judul sama yang digarap oleh Choi Hang Yong. Dalam serial ini, dia kembali duduk di kursi sutradara dan bekerja sama dengan penulis naskah Park Eun-kyo (*Mother*) serta aktor Jung Woo Sung sebagai produser eksekutifnya. • **Kasim**



SESAT PIKIR PELAKSANAAN PILKADA



VECTORSOCK.COM

Rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (21/9) memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Penetapan ini

benar-benar menyesatkan nalar sehat kita semua. Tak masuk di akal karena dilakukan di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Meski rapat tersebut juga memutuskan akan memberlakukan protokol kesehatan ketat di setiap tahapan Pilkada, khususnya pada masa kampanye dan pemilihan langsung, namun potensi kerumunan massa dipastikan akan tetap dijumpai. Partai politik dan kandidat tertentu akan lebih memprioritaskan cara-cara pemenangan daripada keselamatan *wong cilik*.

Secara kasat mata, publik bisa menilai bahwa pemerintah memandang aspek kesehatan merupakan prioritas sampingan, sedangkan prioritas utamanya adalah politik itu sendiri. Akhirnya, publik menjadi lebih mengetahui bagaimana sejujurnya sikap dan posisi pembelaan pemerintah terhadap warganya.

Jika pemerintah benar-benar berada di samping warganya, maka suara moral yang sebelumnya banyak didengungkan secara keras oleh sejumlah organisasi masyarakat tentang urgensi penundaan Pilkada di tengah Covid-19 ini, pastilah akan didengarkan. Apalagi ormas sipil yang bersuara adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Komnas HAM, Perludem, Change.org dan Pusako yang selama ini dikenal sebagai arus utama yang menyuarakan kepentingan masyarakat sipil.

Toh, penundaan Pilkada tidak akan menjadikan proses demokratisasi kita jatuh. Sebaliknya, dengan mendahulukan



Nafik Muthohirin

Dosen Fakultas Agama Islam dan Peneliti Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang

keselamatan nyawa rakyat berarti negeri ini tengah merealisasikan esensi demokrasi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Justru, kita menjadi bertanya-tanya, sikap keras kepala pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada tahun ini apakah murni atas nama rakyat atau hanya untuk kepentingan segelintir pemodal.

Senada dengan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustyati yang mengatakan bahwa penundaan Pilkada akibat penularan Covid-19 yang semakin meluas adalah pilihan terbaik. Penundaan ini bukan ukuran kegagalan berdemokrasi, melainkan menunjukkan sikap cepat tanggap membaca situasi dan mengedepankan kesehatan publik.

Begitupun dengan pandangan Muhammadiyah. Penundaan Pilkada di tahun ini murni karena alasan kemanusiaan dan keselamatan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dalam wawancaranya dengan *Republika.co.id* (Selasa, 22/9) menjelaskan, Pandemi Covid-19 yang belum berakhir harus menjadi pertimbangan. Bahkan, kini penyebaran Covid-19 cenderung meningkat seiring timbulnya kluster-kluster baru.

Bahkan, sebelumnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga mendorong pemerintah untuk merealisasikan penundaan tersebut. Sayangnya, pemerintah bersikap pongah dan tetap memutuskan penyelenggaraan Pilkada. Padahal, seperti banyak diberitakan media, tiga dari tujuh pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah dinyatakan positif Covid-19. Jika ditambahkan dengan kasus positif yang mendera pimpinan KPUD dan Bawaslu daerah, maka daftarnya akan bertambah panjang.

Belakangan, KPUD-KPUD sudah “memukul gong” sebagai penanda dibukanya masa kampanye terbuka. Panggung musik didirikan dan mobilisasi massa mulai diker-

jakan. Pun demikian yang dilakukan oleh para kandidat bersama parpol dan tim pemenangannya. Sosialisasi profil, visi dan misi di masa kampanye tak mungkin efektif jika dilakukan melalui platform dalam jaringan (daring).

Pemerintah memberikan instruksi supaya agenda kampanye Pilkada ini tidak dilakukan secara berkerumun. Namun, apakah kedatangan massa dalam jumlah besar di satu tempat bisa benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Tak pelak, banyak pihak yang memprediksi potensi kemunculan kluster-kluster baru penularan Covid-19 akibat pelaksanaan Pilkada.

Hingga hari ini saja, ketika artikel ini ditulis pada Kamis (24/9), penambahan kasus baru penularan Covid-19 sebanyak 4.634 orang positif. Jadi total terinfeksi per hari itu telah mencapai 262.022 kasus, dan yang meninggal ada 10.105 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan sikap abai masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dengan demikian, publik seolah-olah dihadapkan pada dua pilihan, ikut berkerumun dalam nuansa keramaian kampanye atau di rumah saja dan memilih golput.

Hemat penulis, ada baiknya pemerintah kembali memikirkan urgensi penundaan Pilkada 2020. Mumpung belum begitu terlambat. Masa kampanye yang sudah berjalan bisa disudahi. Lalu, sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna, supaya para menteri mengupayakan berbagai program terobosan untuk penanganan pandemi dan memprioritaskan keselamatan warga.

Dalam Islam, terdapat kaidah yang relevan menggambarkan situasi sekarang ini, yaitu menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat (*dar'ul mafasid muqoddimun ala jalbil masholih*). •

RELAKSASI IURAN PROGRAM JAMSOSTEK

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non alam Penyebaran COVID-19



Pemerintah memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran iuran bagi peserta BP JAMSOSTEK selama 6 bulan. Besaran keringanan hingga 99 persen tanpa mengurangi manfaat yang didapat oleh peserta.

KARTU PESERTA

MASA BERLAKU
Agustus 2020 - Januari 2021



TUJUAN



Perlindungan hak jaminan sosial ketenagakerjaan.



Meringankan beban pemberi kerja dan peserta.



Menjaga kesinambungan program perlindungan.



Mendukung pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

RELAKSASI IURAN

Relaksasi jatuh tempo

Dari tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Jaminan Kematian (JKM)
- Jaminan Hari Tua (JHT)
- Jaminan Pensiun (JP)

Keringanan iuran

- JKK
- JKM

1%
Bayar

99%
Potongan

Penundaan pembayaran iuran

- Jaminan Pensiun

1%
Bayar

99%
Penundaan

Relaksasi denda iuran (selama masa relaksasi)

2%

0.5%

Jaminan Pensiun (JP)

Iuran JP dari pekerja

1%
dari upah pekerja

Iuran kewajiban pemberi kerja

2%
dari upah pekerja

BESARAN KERINGANAN IURAN

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

■ Sangat rendah

● 0,0024%

■ Rendah

● 0,0054%

■ Sedang

● 0,0089%

■ Tinggi

● 0,0127%

■ Sangat Tinggi

● 0,0174%

■ Tingkat risiko

● Besaran iuran/bulan

Jaminan Kematian (JKM)

■ Penerima upah

● 0,0030%

■ Bukan penerima upah

● Rp68,0

■ Peserta

● Besaran iuran/bulan



Hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaatnya tetap sebagaimana biasanya ketika tidak ada relaksasi pembayarannya.

Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan

KONTESTAN PILKADA WAJIB TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

Kementerian Kesehatan mencatat 309 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah penyelenggaraan Okada, terdaftar dalam peta zona risiko COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19, bakal pasangan calon wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat saat menjalani tahapan Pilkada Serentak 2020.

PROTOKOL KESEHATAN PILKADA

Kontestan harus menerapkan protokol kesehatan agar aman dari penularan COVID-19.

- 1 Pasangan bakal calon melakukan tes PCR.
- 2 Membatasi pertemuan maksimal dihadiri 50 orang.
- 3 Menjaga jarak minimal 1 meter.
- 4 Menggunakan media daring atau penyiaran untuk debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.
- 5 Dilarang kontak fisik selama proses seleksi.
- 6 Berkegiatan sesuai peraturan dan protokol kesehatan.
- 7 Bahan kampanye disarankan berupa masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan hand sanitizier.

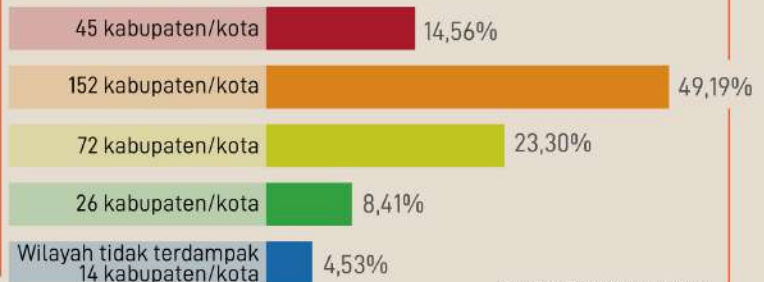
Karena ini pasti memiliki risiko, pemerintah sudah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami mohon ke depan betul-betul anggota masyarakat dan kontestan tertib melaksanakan ini.

Prof Wiku Adisasmito

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19



ZONA RISIKO COVID-19



(Sumber: Kemkes 10/9/2020)

PELANGGARAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pada 4-6 September 2020.

TEMUAN

- 243 pelanggaran protokol kesehatan.
- 75 orang bakal calon di 31 daerah belum serahkan hasil uji PCR.

TINDAKAN

- Memberi teguran Bapaslon melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Meneruskan dugaan pelanggaran protokol kesehatan kepada aparat keamanan.
- Meminta penegakan penanganan pelanggaran.

(Sumber: Satgas Penanganan COVID-19)

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

**Top Up
Uang Elektronik**



**Beli
Paket Data
& Pulsa**



**Beli Voucher
& Bayar Listrik**



**Bayar
Kartu Kredit**



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

